



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**INTERVENSI HOSPITALITAS DALAM PROSES  
INSTITUSI/DESTITUSI *THE SOCIAL* : KAJIAN PEMIKIRAN  
POLITIK ERNESTO LACLAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat**

**SONA PRIBADY**

**NPM. 0806466115**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT**

**DEPOK**

**JULI 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Depok, 2 Juli 2012**



**Sona Pribady**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah karya saya sendiri,**

**dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk**

**telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Sona Pribady**

**NPM : 0806466115**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 2 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Sona Pribady  
NPM : 0806466115  
Program Studi : Filsafat  
Judul Skripsi : Intervensi Hospitalitas Dalam Proses  
Institusi/Destitusi *The Social* : Kajian Pemikiran  
Politik Ernesto Laclau

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Donny Gahrul Adian.

(  )

Penguji : Dr. Budiarto Danujaya

(  )

Penguji : Ikhaputri Widiyanti, M.Si

(  )

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 25 Juni 2012

Oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



  
Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 196510231990031002

## **KATA PENGANTAR**

Terima kasih untuk pembimbing saya Dr. Donny Gahral Adrian. Kemudian juga untuk Mbak Upi (Ikhaputri Widiyanti, M.Si) dan Dr. Budiarto Danujaya selaku penguji saya. Selanjutnya, terima kasih untuk semua yang turut mengkonstitusi di dalam proses pembuatan skripsi saya secara langsung maupun tidak langsung.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sona Pribady  
NPM : 0806466115  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Departemen : Ilmu Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

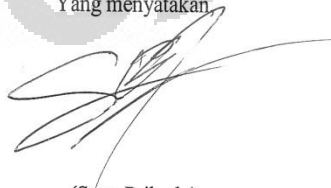
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Intervensi Hospitalitas Dalam Proses Institusi/Destitusi The Social : Kajian Pemikiran Politik Ernesto Laclau*, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 2 Juli 2012

Yang menyatakan



(Sona Pribady)

vi

Universitas Indonesia

vi

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Sona Pribady  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Judul : Intervensi Hospitalitas Dalam Proses Institusi/Destituti *The Social* : Kajian Pemikiran Politik Ernesto Laclau

Politik sebagai salah satu dimensi realitas memberikan sebuah tempat bagi berlangsungnya proses pengelolaan terhadap sistem kehidupan bersama. Politik tidak dapat lagi dipandang sebagai dimensi yang berlandaskan pada sebuah fondasi yang utuh dan tetap, yang mengatasi berbagai dimensi kehidupan lainnya, sehingga mengucilkan posisi politik sebagai sub-sistem. Pengucilan ini membuat politik kehilangan otonominya karena ia harus selalu berbasiskan fondasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pemikiran politik Ernesto Laclau, skripsi ini mencoba menunjukkan bahwa betapa politik adalah sebuah dimensi yang memiliki otonomi relatif, yang berlandaskan pada fondasi yang tidak tetap. Posisi ini membuat model pemikiran politik kontemporer lebih bercorak disensual daripada konsensual, dan lebih memberikan tempat terhadap pluralitas di dalam sistem kehidupan bersama. Dengan membedakan antara *The Politic* dan *The Political*, ketidakmungkinan dari totalitas politik dalam mengelola sistem kehidupan bersama menjadi dapat ditunjukkan. Paradoks antara kedua hal tersebut adalah sebuah ketegangan yang berdiri sebagai batas terluar dari antara masing-masing mereka. Pemikiran politik kontemporer yang bercorak *post-foundationalist* dalam mengatasi permasalahan pluralitas pada sistem kehidupan bersama, tidak menghilangkan dimensi etis dalam proses konstitusinya. Keberadaan dimensi etis ini, sebagai sebuah momen etis, tidak mengurangi otonomi dari politik melainkan justru berdiri sebagai batas terluar dari politik. Momen etis disini memungkinkan proses aktivasi dimensi *The Political*, yang kemudian memiliki potensi dalam mengintervensi *The Politic*.

Kata kunci : *The Politic*, *The Social*, *The Political*, Intervensi, Hospitalitas, Hegemoni, Penanda Kosong, Identitas, Antagonisme

## ABSTRACT

Name : Sona Pribady  
Major : Philosophy  
Title : Hospitality's Intervention in the Process of Institution/Destitution  
of *The Social* : Study of Ernesto Laclau's Political Thought

As one sphere in reality, politic gives a place for the process of maintaining the social system. Politics can not be assumed as a dimension which founded by a single totalized sphere of life, which has the supreme power to solve every social problems, and makes politic inferior as a subsystem. It makes the politic loss its autonomy caused it must following the pattern of its foundation which have been taken place before. Through Ernesto Laclau's political thought, the author try to showing the politic as a dimension which always having its relative autonomy and founded by unstable foundation. This position make the contemporary political thought's model tends to form a dissentient conception instead of consentient, and giving a place for plurality in social system. By separating *The Politic* and *The Political*, the impossibility of politic as totality in maintaining the social system can be showed. The paradoxal relation between them is a tension which makes a conceptual frontier for each of them. *Post-Foundational* political thought, when trying to solve the problem of plurality, was not dismiss ethical dimension in their process of constitution. The presence of ethical dimension, as ethical moment, does not diminish political's autonomy, but take a stand as its frontier. Ethical moment gives the activation process of *The Political* possible, whereupon make it potent to intervening *The Politic*.

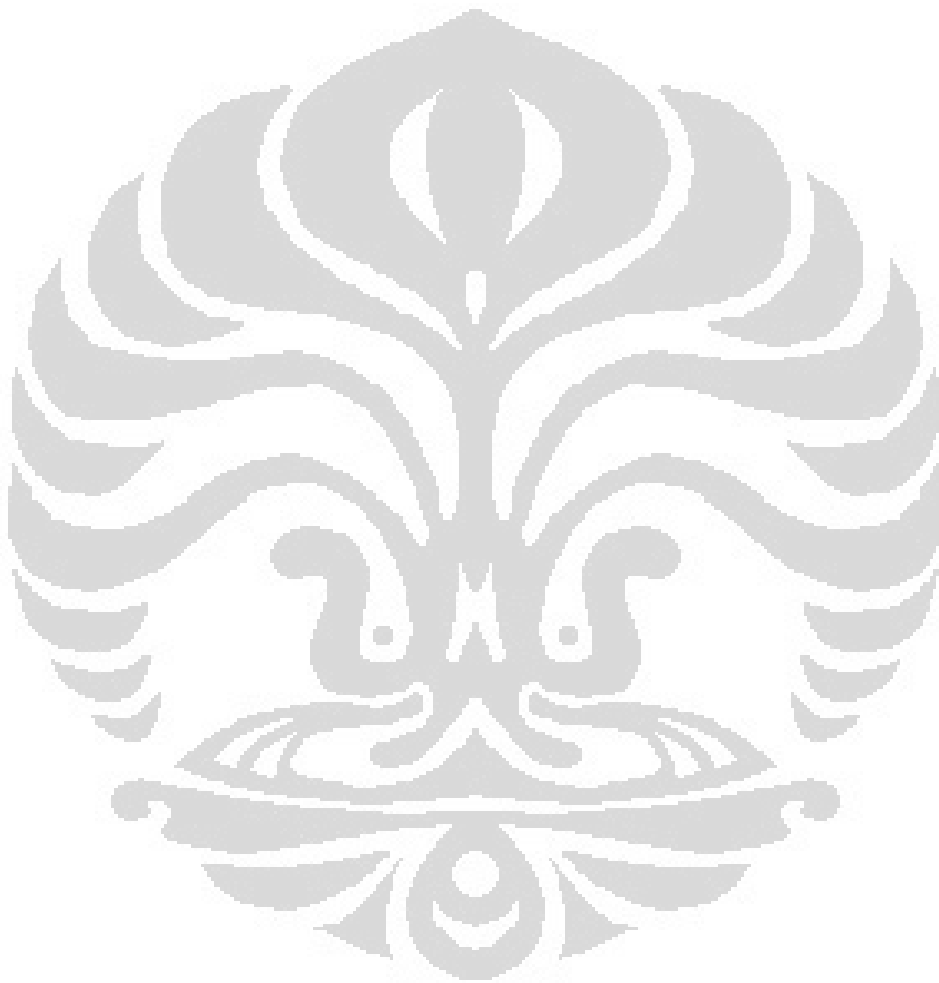
Key words : *The Politic*, *The Social*, *The Political*, Intervention, Hospitality, Hegemony, *Empty Signifier*, Identity, Antagonism



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Landasan Teori .....	6
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.5. Tujuan Penulisan .....	6
1.6. Thesis Statement .....	7
<b>BAB 2 KONSEP PEMIKIRAN POLITIK <i>POST-FOUNDATIONAL</i></b> <b>ERNESTO LACLAU</b> .....	8
2.1. Genealogi Pemikiran Politik Menuju Politik <i>Post-Foundational</i> .....	8
2.2. Pembentukan Identitas dan Posisi Subjek .....	12
2.3. Hegemoni .....	17
2.4. <i>The Impossibility of Society</i> .....	23
<b>BAB 3 KOEKSISTENSI DAN MOMEN ETIS</b> .....	30
3.1. Misrekognisi Subjek Terhadap Dirinya dan Kebutuhan Terhadap Orang lain .....	31
3.2. Koeksistensi dan <i>Hospitality</i> Sebagai Tanggung Jawab Terhadap <i>The Other</i> .....	35
3.3. Antagonisme dan Koeksistensi .....	38
3.4. Momen Etis: <i>Hospitality</i> Sebagai Interupsi .....	40
<b>BAB 4 MOMEN ETIS DALAM PROSES INSTITUSI/DESTITUSI</b> <b><i>THE SOCIAL</i></b> .....	46
4.1. Momen Etis Hospitalitas Sebagai Basis Pembentukan <i>The Social</i> ....	47
4.1.1. Koeksistensi .....	47
4.1.2. Formasi Diskursus dan Antagonisme .....	49
4.1.3. Momen Etis Di Dalam Dimensi Antagonisme dan Pembentukan <i>The Social</i> .....	52
4.2. Sedimentasi <i>The Social</i> Terhadap Dimensi Antagonisme dan Momen Etis .....	58
4.3. Krisis Di Dalam <i>The Social</i> .....	63
4.3.1. Momen Etis Di Dalam Dimensi Antagonisme dan Pembentukan <i>The Social</i> .....	63
4.3.2 Tindak Eksklusi Pada Proses Artikulasi Diskursif .....	67
4.4. Reaktivasi Momen Etis dan Intervensi Terhadap <i>The Social</i> .....	69

4.4.1. Reaktivasi Momen Etis Pada Hiearki Di Dalam Formasi Diskursif .....	70
4.4.2. Reaktivasi Momen Etis Hospitalitas Dan Koeksistensi .....	71
4.4.3. Subjek Emansipatoris Dalam Menyambut Momen Etis .....	73
<b>BAB 5 KESIMPULAN</b> .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Politik, secara umum dapat dimaknai sebagai suatu dimensi dimana kegiatan yang penuh dengan berbagai perebutan dan penyaluran kekuasaan terjadi. Selain itu, di dalamnya juga terdapat berbagai konflik kepentingan antara golongan yang satu dengan yang lain. Berbagai konflik dan artikulasi kepentingan ini bermain di dalam dimensi politik, dan dimensi ini merupakan salah satu dimensi di dalam realitas dimana manusia, baik secara individu maupun golongan berada. Dimensi politik tidak hadir secara tiba-tiba dan menyediakan dirinya sebagai tempat kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung. Sebaliknya, dimensi politik terbentuk karena ada desakan kebutuhan bagi individu untuk dapat hidup di dalam masyarakat. Desakan untuk hidup bermasyarakat ini berlandaskan tentang konsepsi manusia sebagai *zoon politicon*, dimana dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berelasi dengan orang lain. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, dimana ia melakukan interaksi dan berelasi dengan orang lain, individu memerlukan suatu tatanan *order* sekaligus media untuk berkonflik sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Dengan kata lain, politik adalah suatu praktek kehidupan sehari-hari yang tidak pernah terlepas dari individu sebagai subjek sosial. Praktek ini adalah tentang bagaimana individu menyalurkan berbagai kepentingan dirinya menuju eksternalitas dirinya, yaitu lingkungan dimana individu-individu lain berada dan kondisi koeksistensinya, juga sebagai subjek sosial, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dimungkinkan, demi mempertahankan koeksistensi dan memungkinkan aktualisasi diri individu.

Karena politik selalu menyimpan konsepsi tentang bagaimana mewujudkan kondisi dimana individu untuk dapat mengaktualisasikan dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka politik selalu memiliki landasan dan tujuan. Para pemikir-pemikir politik menaruh landasan dan tujuan ini sebagai

batas bagi dimensi politik. Tujuan ini adalah suatu kondisi yang dapat dimungkinkan tercapai di dalam realitas materialistis, misalnya masyarakat sosialis, atau masyarakat tanpa pemerintahan. Dan politik selalu berusaha mewujudkan tercapainya tujuan tersebut melalui praktik-praktik institusional di dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara landasan politik merupakan titik tolak dimana politik terbentuk. Landasan politik ini seringkali ter-kooptasi kedalam dimensi realitas lainnya, sehingga autentisitas dimensi politik menjadi kabur. Misalnya di dalam konsepsi Karl Marx tentang masyarakat kapitalistik, dimana ia menaruh ekonomi sebagai basis-struktur yang memungkinkan terbentuknya masyarakat, sementara politik sebagai supra-struktur yang menyembunyikan berbagai hal yang terjadi di dalam basis-struktur demi mempertahankan relasi produksi di dalam masyarakat capital. Disini, politik hanya merupakan faktor yang mendukung ekonomi, sebagai basis-struktur, untuk terus melanjutkan prosesnya dalam mewujudkan konsepsi ekonomi tertentu. Perubahan atau transformasi masyarakat dimungkinkan bila terjadi transformasi pada level basis-struktur. Contoh lainnya adalah pemerintahan feodal pada abad-abad pertengahan. Pemerintahan feodal mendapatkan legitimasi kekuasaan berdasarkan sesuatu diluar dirinya, misalnya raja sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga disini politik terserap kedalam tataran teologis dan hanya menjadi sekadar alat pendukung bagi teologi tersebut saja.

Sampai disini, politik tidak memiliki autentisitas sebagai dimensi realitas yang berdiri sendiri. Ia selalu terkooptasi kedalam dimensi realitas lainnya yang memungkinkan terbentuknya dimensi politik. Selain itu, konsepsi politik juga selalu membawa konsep imanensi di dalam dirinya yang menjanjikan suatu keutuhan sosial di dalam realitas. Ia berpijak diatas fondasi yang dilukiskan sebagai fondasi yang utuh dan stabil, dan karenanya memungkinkan artikulasi politik dalam mencapai pemenuhan tujuannya.

Barulah kemudian Carl Schmitt memberikan formula baru di dalam pemikiran politik. Dalam upayanya membentuk autentisitas politik tanpa harus bersandar pada dimensi sosial lainnya, Schmitt membagi dimensi politik menjadi dua, yaitu *the politic* dan *the political*. Lebih jauh lagi, ia bahkan membedakan

antara *politic* dan *the political*. Pada *political*, Schmitt melihatnya sebagai basis realitas sosial yang di dalamnya terdapat relasi antagonistik yang bersifat *friend/enemy*. Dimensi antagonism ini bersifat instabil karena relasi antagonism tidak mem-partikularkan dirinya secara ajeg, melainkan bersifat cair dan terbuka, juga memiliki rantai hubungan *friend/enemy* yang tidak terbatas. Sementara pada *the politic*, merupakan dimensi dimana relasi antagonistik tersebut berartikulasi. Dengan begitu, dimensi *politic* terkonstitusi di atas *the political* sekaligus berfungsi menginstitusikan dimensi antagonism di dalamnya. Tindak artikulasi antara kedua dimensi tersebut memungkinkan realitas sosial terus berproses secara kontingen, tanpa ada kemungkinan untuk mencapai keutuhan yang final. Ketegangan konfliktual yang terjadi di dalam relasi *friend/enemy* tersebut adalah ketegangan yang mana setiap pihak saling mengancam eksistensi pihak lainnya, hal inilah yang membuat dimensi politik menjadi otentik. Politik adalah perjuangan mempertahankan eksistensi, tanpa terserap kedalam dimensi realitas lainnya. Pemikiran Carl Schmitt ini kemudian banyak mempengaruhi banyak pemikir politik *post-foundational* setelahnya.

Di dalam pemikiran politik *post-foundational*, politik tidak lagi berbasiskan pada suatu dasar yang utuh dan stabil, tetapi di atas fondasi yang 'hadir sekaligus menarik diri'. Dengan kemunculannya, maka fondasi dimungkinkan untuk ada sebagai basis bagi realitas. Dengan menarik diri, maka fondasi ini selalu berubah dan memungkinkan terjadinya kontingensi. Dasar yang stabil tidak lagi dimungkinkan karena suatu basis tidak pernah dapat merangkul semuanya. Disinilah konsep *quasi-transcendental* mengambil peran, dimana permasalahan basis atau fondasi bukan lagi masalah tentang 'apakah fondasi tersebut', melainkan 'apa-apa saja yang dikeluarkan dari fondasi tersebut'. Konsep ini memungkinkan adanya logika eksklusi/inklusi, bahwa segala jenis identifikasi dan perumusan selalu mengeluarkan apa-apa yang tidak termasuk di dalam kategori pada proses tersebut. Walaupun demikian, apa yang dikeluarkan itu turut berperan melalui negativitasnya dalam merumuskan suatu bentuk identitas. Pada poin ini, *post-foundational* memiliki beberapa poin penting. Pertama, dengan presuposisi bahwa fondasi tidak pernah stabil, maka politik dimungkinkan untuk terus berkontingensi. Kedua, dengan proses inklusi/eksklusi

tersebut maka suatu fondasi selalu memerlukan ‘yang lain’, yang tidak terangkul sekaligus apa yang mengkonstitusi dirinya, yang selalu menghantui fondasi tersebut. Dengan begitu, pemikiran politik *post-foundational* mencoba menghadirkan konsep tentang bagaimana politik tidak dapat pernah mencapai tujuannya secara penuh karena berdiri diatas fondasi yang tidak stabil, sekaligus memiliki kemungkinan yang tidak terbatas dalam mencapai tujuannya tersebut.

Pada Ernesto Laclau, dalam menjelaskan konsepnya tentang *Society*, ia melihat bahwa *society* merupakan dimensi ketika masyarakat telah dapat memenuhi dirinya secara utuh. Dengan kata lain, *Society* berhasil meredam dimensi antagonism dengan menyatukan segalanya menjadi *The Whole*, yang artinya menutup kemungkinan bagi terjadinya kontingensi. Penutupan ini artinya adalah berakhirnya politik. Dalam perspektif *post-foundationalist*, Laclau berpendapat bahwa dimensi yang memungkinkan keberuntungan masyarakat menuju *Society* adalah *The Social*. Dimensi ini kemudian menghisap berbagai dimensi lain dalam realitas, termasuk politik. Hanya saja, dengan ketidakmungkinan *The Social* untuk merangkul semuanya dalam mengidentifikasikan dirinya, maka perlu ada sesuatu diluar dimensi tersebut, yang tidak terhisap oleh *The Social*, yaitu *The Political*. *The Political* mengambil tempat yang berbeda dari *The Politic*. Sementara yang terakhir masuk atau terserap kedalam *The Social* sebagai sub-sistem dalam berbagai prosesnya menuju *Society*, yang kedua merupakan sesuatu yang selalu berada diluar dimensi *The Social*, yang tidak pernah dapat diserap sekaligus apa yang mengkonstitusi identitas dari *The Social*. *The Political* merupakan basis dalam menginstitusikan *The Social*, sekaligus melakukan intervensi terhadapnya. Pembentukan *The Social* hanya dapat terjadi ketika ia diintervensi dan didestitusi dalam pergerakannya menuju *Society*, karena pencapaian *Society* sebagai keutuhan berarti mengakhiri dimensi *The Social* yang penuh dengan berbagai proses pemaknaan. Dengan kata lain, *Society* menurut Laclau dibutuhkan sekaligus tidak mungkin tercapai, karena hanya dengan begitu ia dapat menjadi sesuatu yang produktif, dengan berbagai posibilitasnya, bagi *The Social*.

Dengan posisinya yang tidak terserap kedalam dimensi *The Social*, *Political* memiliki potensi dalam mengintervensi pembentukan *Society*. Sekalipun demikian, keberadaanya sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari hasil identifikasi dan pemaknaan, *The Political* membutuhkan suatu media untuk dapat masuk mengintervensi *The Social*. Ia memerlukan sebuah basis bagi timbulnya semacam ledakan dalam mereaktivasi kembali dimensi *The Political*. Sekalipun politik berdiri secara otentik, ia tidak dapat lepas sepenuhnya dari dimensi lain, justru ia membutuhkan relasi dengan yang lain, yang turut memberikan determinasi sekalipun tidak secara penuh, demi memantapkan otonomi relatifnya. Otonomi relatif inilah yang memungkinkan politik mengandung keterbukaan, dan keterbukaan ini membawa politik hingga pada batas terluar dirinya, pada sesuatu yang dapat mengintervensi politik. Sampai poin inilah maka penulis mencoba menghadirkan konsep tentang momen etis sebagai media bagi reaktivasi tersebut. Momen etis mengembalikan apa-apa yang sebelumnya telah terkonstruksi di dalam *The Social*, menuju kondisi koeksistensi manusia yang paling primer, dimana sebuah penerimaan terhadap yang lain kembali dimungkinkan. Hal ini merupakan proses penting di dalam reaktivasi *The Political* yang menyimpan dimensi kondisi antagonisik, karena hal itulah yang memungkinkan institusi/destitusi dimensi *The Social* melalui keterbukaan yang tidak bersyarat terhadap yang lain atau *The Other*. Dengan begitu, momen etis tidaklah dapat dilihat sebagai sebuah prinsip etika yang berisi tentang tataran moralitas dan menjadi basis bagi sebuah tindakan etis bagi individu, ia justru berada melebihi hal tersebut. Momen etis adalah sesuatu yang hadir, dalam situasi temporal tertentu, yang menjungkirbalikan tatanan sebelumnya di dalam masyarakat dengan mengembalikan kondisi dasar koeksistensi manusia, yaitu dengan sikap penerimaan terhadap yang lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Masih adakah tempat bagi etika di dalam konsepsi politik *post foundational*?
2. Bagaimana momen etis muncul dalam melakukan reaktivasi kondisi antagonisme, sehingga intervensi *The Political* terhadap *The Social* dan

proses institusi/destitusi dapat dimungkinkan sebagai bagian dari proses kontingensi?

3. Bagaimana proses emansipatorik dapat dimungkinkan dengan kehadiran momen etis? Subjek yang bagaimanakah yang mampu melakukan emansipasi?

### 1.3 Landasan Teori

Penulis menggunakan landasan teori dari Ernesto Laclau tentang ketidakmungkinan proses pembentukan *Society*. Dengan membedakan *Politic* dan *Political*, Laclau mencoba mengembalikan otentisitas dari politik yang tidak terkooptasi dari dimensi realitas yang lain. Selain itu, perumusan konsepsi *The Political* memberikan rumusan politik yang bersifat *post-foundational*. Buku yang saya gunakan sebagai landasan teori terutama *Hegemony and Socialist Strategy* dan *Emancipation(s)* karya Ernesto Laclau. Selanjutnya, penulis juga menggunakan konsep Hospitalitas dari Jacques Derrida sebagai konsep yang mencukupi di dalam kehadiran momen etis

### 1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang saya gunakan adalah analisis-ekspalatif, saya mencoba menjelaskan konsep pemikiran politik Laclau untuk menunjukkan basis pembentukan dimensi sosial dan proses emansipasi melalui kehadiran momen etis dalam mereaktivasi kembali dimensi antagonisme.

### 1.5 Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan garis besar pemikiran politik *post-foundational*, khususnya mengenai pemikiran Ernesto Laclau
2. Menunjukkan urgensi etika dalam wilayah politik melalui pemikiran politik *post-foundational* melalui pemikiran Ernesto Laclau
3. Menunjukkan proses emansipatorik dalam konsepsi politik *post-foundational*



## 1.6 Thesis Statement

Formasi diskursif di dalam kehidupan masyarakat memproduksi berbagai pemaknaan dan sistem-sistem tertentu demi menjaga kondisi hidup bersama di dalamnya. Dalam perumusan dan pembentukan sistem-sistem itulah, selalu ada hal-hal yang tidak pernah diserap dan diproses dalam proses pemaknaan tersebut. Selalu ada kelebihan dari setiap hasil artikulasi diskursif. Dalam mengatasi ketidakcukupan itulah *momen etis hospitalitas seharusnya hadir sebagai basis reaktivasi dimensi antagonisme dalam mengintervensi The Social*. Momen etis adalah kondisi dimana etika sebagai dimensi yang merupakan batas terluar dari politik, hadir sebagai batas imposibilitas sekaligus posibilitasnya. Ia mengembalikan kondisi koeksistensi paling primitif di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu melalui penerimaan terhadap yang lain atau *The Other*. Penerimaan terhadap yang lain memungkinkan apa yang tadinya tidak didengar menjadi didengar, yang tidak dapat bersuara menjadi bersuara. Momen etis hospitalitas berada melampaui segala bentuk tataran moral, ia adalah kondisi paling radikal di dalam koeksistensi di dalam penerimaan terhadap yang lain tanpa bergantung pada kondisi apapun.

## BAB 2

### KONSEP PEMIKIRAN POLITIK *POST-FOUNDATIONAL* ERNESTO LACLAU

Ernesto Laclau merupakan seorang pemikir politik yang melanjutkan tradisi Gramscian. Sebagai pemikir yang berangkat dari konsep-konsep Antonio Gramsci, Laclau banyak memberikan penekanan tentang hegemoni di dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Laclau membuat suatu modifikasi terhadap hegemoni ala Gramsci dengan berbasiskan konsepsi-konsepsi kaum poststrukturalis seperti Derrida dan psikoanalisis Lacanian (Butler, Judith, Ernesto Laclau dan Žižek. 2000: 2). Dari situlah, kemudian ia, diantaranya banyak bersama Chantal Mouffe, mencoba merumuskan konsepsinya tentang politik sebagai salah satu dimensi realitas. Pembahasannya tentang politik dan sistem kehidupan bermasyarakat ini kemudian banyak memberikan dampak terhadap pemikiran-pemikiran politik kontemporer. Dalam mencoba menjelaskan pemikiran Laclau, penulis akan menghadirkan penjabaran konsepsi-konsepsi di dalam pemikirannya dan yang berkorelasi secara relevan dengan konsep pemikiran Ernesto Laclau tentang politik sebagai salah satu dimensi realitas yang *post-foundational*.

#### 2.1 Genealogi Pemikiran Politik Menuju Politik *Post-Foundational*

Membahas tentang pemikiran politik kontemporer tidak akan terlepas dari Carl Schmitt, seorang filsuf dari Jerman yang hidup pada masa Perang Dunia. Carl Schmitt, dalam proyek pembangunan konsep politiknya, mencoba menjadikan politik sebagai suatu dimensi realitas yang memiliki otonomi. Dengan kata lain, politik tidak lagi merupakan sebuah sub-sistem dari dimensi lain diluar politik yang mana merupakan determinan bagi pembentukan politik. Sebaliknya, Schmitt mengangkat urgensi politik yang tidak bergantung pada dimensi lain diluar dirinya, melainkan dapat menghadirkan dirinya secara mandiri. Dengan begitu, maka politik disini bukanlah suatu dimensi dalam suatu struktur yang mengibaratkan adanya suatu fondasi yang tetap dan substansial dalam menopang

kehidupan bermasyarakat, melainkan dimensi yang berdiri tanpa berbasis pada dimensi diluarnya, dan memiliki basis atau fondasi yang tidak bersifat tetap. Terkait tentang fondasi yang tidak bersifat tetap ini, merupakan suatu fondasi yang mana tidak pernah menghadirkan dirinya secara utuh dan penuh, tetapi hadir sekaligus mengundurkan diri. Hal ini memunculkan fleksibilitas dalam penempatan fondasi tertentu yang mana ia merupakan ruang yang dapat selalu diisi, tanpa meninggalkan sifat lainnya, yaitu sebagai sesuatu yang selalu dapat dikontestasikan.

Dalam upayanya mewujudkan politik sebagai dimensi yang otonom dan mandiri, pemikiran Schmitt kemudian melahirkan dua konsep yang mana memiliki relasi paradoksal. Kedua konsep tersebut adalah *The Politic* dan *The Political*. Sekalipun penggunaan kedua term tersebut, sebagai sesuatu yang berelasi secara paradoksal, dibahas secara khusus oleh Ricouer, tetapi pemikiran Schmitt sendiri sudah memiliki potensi kearah sana, atau dengan kata lain, sudah memiliki konten yang membawa kedua konsep tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa konsep Schmitt lah yang kemudian memberikan bentuk terhadap dua konsep tersebut. Distingsi antara kedua konsep tersebut kemudian memiliki peran penting dalam menentukan perumusan konsep politik pemikiran-pemikiran kontemporer, yang bersifat post-foundasionalistis, termasuk diantaranya adalah Ernesto Laclau.

Perumusan dua konsep ini merupakan elemen penting bagi konstruksi konsep politik yang otonom dan post-foundationalistik. Penjelasan secara umum tentang keduanya kira-kira seperti berikut: *The Politic* merupakan suatu ruang dimana artikulasi berbagai pandangan dapat dimungkinkan, dan kemudian di dalamnya juga termasuk bentuk-bentuk pembuatan serta pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan maupun perumusan program-program yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat (Marchart, Oliver. 2007: 36). Sementara dilain pihak, *The Political* adalah arena yang menyimpan rasionalitas dari *civil society*, yaitu tempat dimana segala bentuk kuasa berkonfrontasi satu sama lain karena adanya kondisi pluralitas yang radikal. Dengan demikian, maka *The Political* adalah ruang yang mengandung relasi antagonistik, dimana segala

bentuk kepentingan berkontestasi dalam upaya mengartikulasikan kepentingan-kepentingan lainnya (Hal. 36). Pengertian kedua konsep diatas, sekalipun bertentangan, tetapi saling berelasi secara paradoksal. Marchart menuliskan, “*Rather than being separable, the political and politics stand in a paradoxical relation, whose elucidation is the task of political philosophy.*” (2007: 37). Relasi paradoksal yang terjadi antara *The Politic* dan *The Political* inilah yang kemudian memungkinkan terbentuknya suatu masyarakat, tanpa harus terjatuh kedalam jurang esensialisme.

Selanjutnya, pembahasan mengenai *The Political* akan dilakukan secara lebih khusus, mengingat kemunculannya yang memiliki peran penting di dalam pemikiran politik post-foundationalistik dan dalam mengkonstitusi dimensi politik yang otonom serta mandiri.

Schmitt, di dalam bukunya, *The Concept of the Political*, mencoba merumuskan suatu konsep politik yang mandiri. Pertama, dimensi political (*The Political*) bersifat independen, dengan kata lain, ia tidak bisa ditaruh pada suatu wilayah, maupun di dalam berbagai relasi yang kompleks antarwilayah lainnya, sekaligus ia juga tidak bisa dilacak (Hal. 41). Keberadaanya yang independen ini memungkinkan dimensi political untuk menghantui berbagai dimensi lainnya, tanpa harus tereduksi kedalam dimensi tersebut. Otonomi dan sifat independen dalam dimensi politikal dengan berbasis pada suatu hubungan *friend/enemy*. Relasi ini merupakan relasi yang sama sekali berbeda dari relasi lainnya, seperti relasi antara baik/buruk dalam tataran moral, atau benar/salah di dalam epistemologi. Relasi *friend/enemy* adalah kata sifat yang dapat melekat pada apapun. Ia merepresentasikan suatu intensitas konflikual antara dua kutub yang mana kutub yang satu mengancam eksistensi kutub lainnya. Relasi *friend/enemy* bukan relasi yang tunggal dan universal, melainkan bersifat kompleks dan berkelanjutan. Ia merupakan relasi yang terus merangkaikan diri dalam suatu rantai antagonistik yang membagi kedalam berbagai sub-sistem lainnya sebagai sub-ordinasi diantara dua kutub tersebut.

Lebih jauh lagi, Chantal Mouffe bahkan menegaskan bahwa relasi antagonis yang terdapat di dalam dimensi *The Political* merupakan sebuah kondisi

yang mengkonstitusi dimensi politik. Relasi antagonism menunjukkan bahwa kondisi pluralitas yang radikal adalah sebuah kondisi yang niscaya, dimana di dalamnya, terjadi berbagai perbedaan-perbedaan yang saling berkonflik dan tidak dapat terjembatani. Kondisi yang penuh ketegangan ini, yang dirumuskan oleh Schmitt sebagai relasi *friend/enemy* dicoba untuk sedikit dilunakan oleh Mouffe, dengan menggunakan istilah *friend/adversary* (Mouffe, Chantal. 2005: 30). Perubahan term di dalam konsepsi tersebut sengaja dilakukan untuk menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi pada relasi antagonis bukan suatu proses eliminasi terhadap yang lain sebagai ‘seteru’, tetapi merupakan ajang kontestasi dalam perebutan kuasa melalui tindak hegemoni. Dimana kontestasi ini memungkinkan pluralitas semakin beragam. Hal ini dimungkinkan karena hubungan *friend/adversary* ini sekaligus bertendensi antagonis, tetapi tiap-tiap pihak yang saling berantagonis mengakui keberadaan legitimasi dari masing-masing seterunya, yang berada di dalam domain politik yang sama. Seperti ditegaskan oleh Mouffe, “*This means that, while in conflict, they see themselves as belonging to the same political association, as sharing a common symbolic space within which the conflict takes the conflict takes place.*” (Hal. 20)

Dimensi *The Political* yang mengandung relasi antagonis inilah yang kemudian merupakan batas terluar dari dimensi *Politic*. Relasi antagonisme yang sarat dengan konflik atas ancaman eksistensi kemudian dalam proses historis mengkonstitusi kondisi ke-kami-an dengan memunculkan ‘mereka’ sebagai musuh. Kondisi kami ini kemudian menjadi syarat bagi kondisi terbentuknya politik. Dengan begitu, dimensi politik berdiri diatas relasi yang sarat dengan konflik dan pertentangan, dan hadir hanya dengan kondisi dimana ‘kami’ menerima keberadaan ‘mereka’ sebagai sesuatu yang mengancam. Momen ketika kondisi tersebut terjadi adalah suatu bentuk sedimentasi terhadap *The Political*, tetapi karena berdiri diatas fondasi yang sarat konflik, yang selalu dihantui oleh kehadiran yang liyan itulah, maka dimensi *The Politic* tidak pernah stabil. Dalam perjalanan sejarah, terdapat beberapa pemikir politik yang mencoba menghilangkan relasi antagonism dengan menyerap dimensi tersebut sepenuhnya kedalam dimensi *The Politic*. Sebaliknya, penyerapan dimensi tersebut secara utuh tidak akan pernah mungkin, karena relasi antagonism berangkat dari kondisi

pluralitas yang mana disana hadir berbagai perbedaan yang tidak terjembatani. Selain itu, upaya penyerapan tersebut juga berbahaya, karena dengan menghilangkan dimensi dimana relasi antagonis terjadi, maka artinya, suatu rezim kuasa sedang berusaha untuk menyeragamkan heterogenitas kedalam kondisi homogenitas. Paradoks antar keduanya akan mengakibatkan timbulnya konflik terbuka, karena disatu sisi, pluralitas berusaha diredam dengan merangkulnya kedalam homogenitas, disisi lain, perbedaan yang tidak terjembatani ini membuat segala proses yang mengarah pada pembentukan kondisi homogen menjadi tidak mungkin. Dengan begitu, karena tidak memiliki harapan untuk berkontestasi di dalam koridor demokrasi, maka besar kemungkinan pihak-pihak yang tadinya terekslusi melakukan semacam perlawanan dengan bentuk konflik terbuka.

## 2.2 Pembentukan Identitas dan Posisi Subjek

Laclau berangkat dari asumsi bahwa subjek sosial secara ontologis adalah kekosongan dan labil. Artinya, ia kosong karena tidak menyimpan suatu nilai intrinstik apapun di dalam kondisi pre-eksistensinya, dan labil karena pengisian terhadap kekosongan tersebut selalu mungkin. Dengan adanya proses pengisian terhadap kekosongan subjek ini, maka subjek dengan kata lain adalah subjek yang dikonstruksi. Mengenai kekosongan subjek ini sendiri dapat dijelaskan melalui pemikiran kaum strukturalisme, mengenai hubungan penanda-petanda, dimana sebuah penanda tidak dapat menghadirkan yang ditandai secara langsung, melainkan bergantung pada kehadiran penanda-penanda lainnya (*chain of signifier*). Dapat dicontohkan misalnya sebuah penanda 'spidol' tidak dapat menghadirkan konsep spidol, sebagai makna yang dikandung dibaliknya. Tetapi konsep tersebut kemudian menjadi dapat dipahami dengan menghubungkan penanda spidol dengan penanda-penanda lainnya, yaitu apa-apa yang bukan spidol. Dengan begitu, maka sebuah proses signifikasi atau pemberian identitas, adalah sebuah proses kehadiran diri sebagai sebuah *difference*. Pemunculan ini memungkinkan sebuah bentuk identitas dapat dirujuk, karena ia berbeda dari yang lainnya, yang artinya memiliki spesifikasi dan keunikannya sendiri. Pemunculan *difference as such* sebagai kondisi identifikasi ini dituliskan Laclau dalam *Emancipation(s)* sebagai berikut:

*“We know, from Saussure, that language (and by extension, all signifying system) is a system of differences, that linguistic identity – value – are purely relational and that, as result, the totality of language is involved in each single act of signification. Now, in that case, it is clear that the totality is essentially required – if differences did not constitute a system, no signification at all would be possible.”* (Laclau, Ernesto. 2007. Hal. 37)

Sebuah proses identifikasi dan pemunculan identitas melalui cara kerja kehadiran dirinya sebagai *differences* menunjukkan bahwa identitas yang muncul melalui proses signifikasi ini akan memunculkan identitas yang tidak pernah utuh. Kehadirannya sebagai *differences* artinya adalah sebuah konstitusi atas dirinya sekaligus penunjukan kehadiran yang lain, yang hadir sekaligus absen, yang berada diluar dirinya. Signifikasi pada poin ini membawa identitas menjadi mungkin untuk ditunjukkan (dengan berbagai spesifikasi dan keunikannya) sekaligus menaruh batas bagi dirinya dalam menghadirkan perbedaan konstitutifnya.

Sekalipun berangkat dari kondisi kosong tersebut, subjek sosial selalu memiliki hasrat untuk ‘memenuhi’ dirinya. Hasrat tentang pemenuhan diri ini oleh Laclau di adaptasi dari konsepsi subjek Lacan. Dimana menurut tradisi Lacanian, subjek adalah subjek yang tidak pernah utuh sejak ia terpisah dari kandungan. Hal ini dapat dijelaskan di dalam fase mirror stage, dimana ketika seorang bayi melihat dirinya melalui cermin, ia menemukan dirinya dan bayangan dirinya. Penemuannya tersebut membuat ia bertendensi untuk mempertahankan koherensi egonya, sebagai sesuatu yang unik, yang merepresentasikan dirinya, sekaligus melihat sesuatu yang lain, yang berada diluar dirinya. Pada saat inilah individu menyadari bahwa ia adalah dirinya karena ketertarikannya terhadap koherensi permanen atas dirinya, sekaligus menimbulkan keretakan, bahwa dirinya terpisah dari sesuatu diluarnya. Kebersatuan dan keterpisahan subjek yang muncul dalam satu ketukan ini membuat subjek berhasrat untuk menemukan kepenuhan dirinya yang sejati, yang tidak membuat keretakan apapun, yang mampu merangkul segala sesuatu yang berada diluar dirinya. Sesuatu yang memungkinkan kondisi penuh dari subjek ini menurut Lacan adalah dimensi dari *The Real*, realitas sejati yang tidak terbahasakan, yang merupakan tujuan dari proses pemenuhan subjek. Sementara dalam proses pengartikulasian dimensi *The*

*Real* kedalam realitas keseharian, maka ia harus masuk kedalam struktur bahasa, apa yang diistilahkan sebagai dimensi *The Symbolic*. Bahasa kemudian memungkinkan pemaknaan terhadap *The Real* sekaligus mendistorsinya, sehingga perumusan terhadapnya adalah suatu bentuk misinterpretasi.

Dari kondisi individu yang selalu ingin memenuhi dirinya itulah, subjek sosial yang bermula sebagai sesuatu yang kosong ini, kemudian dikonstruksi melalui praktik artikulasi, yang tidak dapat terlepas dari bahasa. Proses artikulasi bahasa dalam membentuk subjek ini mirip dengan penjelasan sebelumnya tentang konsepsi makna. Dengan proses artikulasi, maka proses pembentukan subjek yang tadinya kosong ini, adalah suatu tindak penanaman identitas, yang mana identitas itu sendiri tidak dapat hadir sebagai sesuatu yang memungkinkan kondisi penuh sang subjek. Hal ini dikarenakan identitas itu sendiri tetap bergantung pada hubungannya dengan identitas lain, dengan cara menghadirkan dirinya sebagai sebuah perbedaan. Tanpa keberadaannya yang mampu menghadirkan diri secara utuh dan mandiri, maka identitas tidak mampu membuat subjek sosial menjadi stabil. Sebaliknya, dengan adanya keterhubungan dan ‘celah’ yang disisakan oleh identitas, maka subjek bersifat labil. Setiap identitas dimungkinkan mengidap instabilitas ini karena proses diferensiasi dirinya, yang memungkinkan dirinya hadir sekaligus menaruh batas terluar dirinya, dimana pada batas ini terdapat kehadiran yang lain yang turut mengkonstitusi dirinya. Kehadiran yang lain inilah yang menunjukkan ketidakpenuhan sebuah identitas, karena menghasilkan apa yang berada diluarnya, yang konstitutif sekaligus menghantui dirinya, memungkinkan adanya potensi tindak subversi terhadap identitas.

Proses artikulasi dalam pembentukan identitas subjek ini pertama selalu ditandai dengan proses eksklusi. Dengan menghadirkan suatu bentuk identitas tertentu maka ia mengeluarkan identitas lain yang ‘bukan dirinya’. Proses eksklusi ini memungkinkan identitas menjadi dapat dibentuk, sekalipun tidak pernah merangkul semuanya karena ia harus meng-eksklusi identitas lain yang bukan dirinya, yang mengkonstitusi dirinya dari luar (*constitutive outside*). Maka, suatu identitas tidak pernah berdiri secara utuh-penuh-padu, tetapi pembentukannya bergantung pada sesuatu diluarnya. Yang berada diluar dirinya membantu



pembentukan dirinya, sekaligus menjadi batas terluar bagi dirinya. Kemudian, suatu identitas juga tidak pernah bisa merepresentasikan subjek sosial secara utuh. Hal ini terkait dengan proses kebertujuan subjek Lacanian mencapai *The Real*, yang artinya subjek selalu mengalami kekurangan di dalam dirinya sembari terus berusaha untuk memenuhinya, sekalipun hal ini tidak mungkin. Ketidakmungkinan subjek dalam mencapai pemenuhan atas dirinya inilah yang kemudian menjadi titik berangkat bagi kondisi kontingensi dirinya. Dengan ketidakmungkinannya, maka subjek menjadi selalu dalam kondisi bergerak menuju pemenuhan, dan hal ini merupakan kondisi kreatif bagi subjek dalam membentuk identitas dirinya. Misalnya dapat diambil liberalism sebagai identitas ternyata tidak cukup dalam merepresentasikan dirinya secara tidak utuh, maka ia dapat merangkul identitas lainnya sehingga menjadi anarko-liberal, ataupun liberal-demokrat. Atau antara Marxis dan non-Marxis, dimana Marxis sebagai identitas menghadirkan dirinya sebagai hasil identifikasi melalui prinsip diferensiasi, yang menghadirkan non-Marxis sebagai luaran konstitutifnya. Keberadaan luaran konstitutif ini karena tidak dirumuskan secara positif, menjadikan dirinya hanya sebagai sesuatu yang menandakan ketidakmungkinan finalitas sebuah identitas. Kehadirannya yang subversif inilah yang membuat identitas pertama, yaitu Marxis, menjadi memiliki berbagai kemungkinan untuk meluaskan dan mentransformasi rumusan identifikasi dirinya. Proses keterhubungan ini tentu saja mempengaruhi tindak ekslusi, tentang identitas apa saja yang harus dikeluarkan demi membentuk dirinya. Relasi antara berbagai identitas yang tidak pernah total ini merupakan bentuk dari relasi antagonis, dimana relasi antagonisme adalah relasi yang mensymbolisasikan sebuah kehilangan akan totalitas suatu identitas. Sebuah penunjukan akan keserbakekurangan identitas yang tidak pernah final, tetapi menjadi sebuah produktivitas dalam mengkonstitusi identitas tersebut.

Tindak ekslusi dalam praktik artikulasi pembentukan identitas subjek sosial menjadikan praktik artikulasi bersifat local dan kontekstual. Karena ia tidak memiliki kemampuan untuk merangkul semuanya, maka universalitas tidak akan pernah tercapai. Sekalipun begitu, lokalitas dan kontekstualitas identitas ini memungkinkan terbentuk suatu solidaritas antar anggota-anggotanya, yang

memiliki kesamaan identitas. Solidaritas ini dimungkinkan karena kondisi ‘kami’ telah terbentuk berdasarkan kesamaan identitas, yang kemudian menghadirkan ‘mereka’ sebagai sesuatu yang sebelumnya dieksklusi. Dengan begitu maka subjek sosial, yang bersandar pada identitas-identitas ini merupakan arena dimana relasi antagonistik dapat dimungkinkan. Di dalam relasi antagonistik yang mana terjadi sebuah penunjukan ketidakmungkinan bagi finalitas identitas, maka sampai disini, yang bermain adalah *logic of difference*, dimana identitas hadir sebagai bentuk perbedaan yang membedakan dirinya dari identitas lain. Situasi dimana identitas hadir hanya sebagai perbedaan membatasi proses perluasan kehidupan masyarakat yang sejaitnya terdiri dari berbagai bentuk identitas. Pada poin inilah, berbagai identitas yang muncul sebagai sebuah perbedaan, yang membedakan dirinya dengan identitas yang lain, ternyata memiliki semacam ikatan solidaritas antar dirinya yang berbeda dengan yang lain, yang memungkinkan keberadaan masyarakat yang serba plural. Solidaritas ini, yang ditandai dengan kesamaan identitas sekaligus perbedaan yang tidak terjembatani, menurut Laclau dapat dimungkinkan karena keberadaan *Chain of Equivalence*. (2007: 53) Suatu hubungan antar berbagai identitas secara setara atau ekuivalen ini menunjukkan bahwa berbagai identitas yang plural ini masih berbagai kerangka simbolik yang sama, sehingga kehidupan masyarakat yang penuh dengan pluralitas dimungkinkan. Dengan merujuk pada tindak eksklusi, dimana pembentukan identitas atau identifikasi dapat dimungkinkan, maka antar berbagai keragaman identitas tersebut menghasilkan kesetaraan antar mereka. Laclau menjabarkan kondisi ekuivalen ini terjadi karena relasi dengan yang lain, tidak hanya muncul sebagai relasi perbedaan, yang sejatinya memicu diferensiasi. Sebaliknya, justru karena relasi antara berbagai identitas yang tidak pernah final inilah, maka setiap identitas memiliki kesempatan yang sama di dalam menyatakan tuntutanannya, bahwa dengan keberadaan tuntutan ini, suatu identitas tidak hanya sekedar berbeda dengan yang lain, tetapi juga memiliki posisi yang setara. Hal ini Seperti diutarakan oleh Laclau, “*For if the limit poses an equal threat to all the differences, it makes them all equivalent to each other, interchangeable to each other as far as the limit is concerned.*” (2007: 53) Keberadaan tindak eksklusi sebagai batas konstitutif pembentukan identitas mengeluarkan ancaman terhadap

stabilitas identitas-identitas tersebut. Situasi itulah yang memungkinkan kesetaraan diantara mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka suatu penunjukan terhadap relasi yang setara antar berbagai identitas ini hadir ketika setiap anggota masyarakat yang partikular memiliki hak untuk menghargai diri mereka sebagai sebuah perbedaan. Tuntutan identitas yang partikular ini di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya adalah penunjukan bahwa setiap partikularitas saling berbagi dan berelasi di dalam sebuah kerangka simbolik secara setara. Laclau menuliskan, *“If it is asserted that all particular groups have the right to respect of their own particularity, this means that they are equal to each other in some ways.”* (Hal. 49)

Dengan berbagai kontinuitas pergerakan subjek dalam mengisi kekosongan identitas itulah, maka menurut Laclau, akan lebih tepat untuk menekankan proses identifikasi dibandingkan dengan identitas itu sendiri (Danujaya, Budiarto. 2012: 252). Proses identifikasi merepresentasikan subjek sosial, sebagai subjek yang kosong sekaligus labil. Karena pertama, proses identifikasi menunjukkan kebutuhan subjek untuk mengisi kekosongannya guna menghadirkan dirinya yang terkonstitusi sebagai subjek sosial. Kedua, proses identifikasi tidak pernah dapat merumuskan satu identitas yang merepresentasikan subjek secara utuh, sebaliknya, ia justru memperlihatkan bahwa subjek selalu berada di dalam ketegangan dan karenanya ia berada dalam kondisi yang serba mungkin.

### **2.3 Hegemoni**

Sebagai seorang yang mewarisi tradisi Gramsci, Laclau melihat hegemoni sebagai aspek penting di dalam perjuangan politik. Sebagaimana para pemikir politik yang berkiblat pada Marx, individu yang masuk di dalam masyarakat tidak lagi berjuang demi mencapai tujuan mereka, tetapi juga untuk menekankan siapa mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya sebagai subjek sosial (Anna, Marie Smith. 1998). Dengan begitu, proses perjuangan politik adalah upaya untuk menegaskan identitas subjek sosial yang tidak stabil. Perjuangan politik upaya

stabilisasi identitas tersebut, dan upaya tersebut diusahakan melalui tindak hegemoni.

Berangkat dari Gramsci, secara umum hegemoni dapat didefinisikan sebagai relasi kuasa yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat. Hegemoni merupakan suatu struktur yang berangkat dari sebuah gagasan particular dan kemudian dibahasakan kedalam term-term universal, sehingga mampu merangkul berbagai identitas yang plural di dalam masyarakat. ia bergerak dari level *civil society*, untuk kemudian melakukan tindak dominasi langsung melalui Negara. Dengan begitu, peran Negara tidak hanya sebagai apparatus kekuasaan bagi pemerintah, tetapi juga apparatus pribadi (Butler, Judith, Ernesto Laclau dan Zizek. 2000: 48) bagi hegemoni. Contoh yang paling jelas disini misalnya situasi pada abad pertengahan, dimana Gereja, yang berada pada tataran suprastruktur, sebagai suatu institusi yang bertugas membentuk moral privat individu, mampu menghadirkan dirinya sebagai universalitas, berusaha merangkul segala identitas sosial dengan Negara sebagai salah satu alat bagi mereka dalam menjalankan dominasi. Disini terlihat bahwa hegemoni berangkat justru dari *civil society*, dan peran Negara apparatus pribadinya baru muncul kemudian.

Laclau berpendapat bahwa dimensi politik selalu bersinggungan dengan hegemoni, artinya politik tidak dimungkinkan tanpa suatu tindak hegemoni. Hal ini berhubungan dengan situasi konfliktual dalam relasi antagonism dimana disanalah terjadi persaingan dalam menancapkan hegemoni masing-masing, dimana pihak yang berkontestasi ingin memantapkan posisinya dengan cara menegaskan siapa dirinya. Dan semenjak relasi antagonism itu terjadi, yang mana merupakan kondisi konstitutif bagi dimensi politik, maka menurut Laclau, tidak ada politik tanpa hegemoni (Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001: 151).

Karena setiap pihak di dalam relasi antagonismenya, selain mencapai tujuan, juga ingin menegaskan siapa dirinya, maka hegemoni disini dapat diartikan sebagai proses pemantapan identitas. Sebuah tindakan adalah hegemonik, sejauh ia berasal dari *civil society*, untuk kemudian berupaya mengartikulasikan pihak-pihak yang saling berkontestasi dalam relasi antagonism, dan melegitimasi dirinya dengan pemantapan identitas tersebut. Pemantapan

identitas, artinya berupa pembatasan terhadap makna suatu identitas tertentu, sehingga pluralitas dan konflik dalam relasi antagonism yang justru menunjukkan ketidakmungkinan totalitas sebuah identitas dapat dicegah untuk berkembang semakin tidak beraturan. Hegemoni dapat diartikan mirip dengan identifikasi, karena keduanya menyangkut proses pemantapan sebuah identitas sehingga suatu bentuk ‘pengikatan’ sebagai sebuah artikulasi yang merangkul perbedaan-perbedaan yang berkonflik dalam dimensi antagonis menjadi mungkin.

Semenjak hegemoni merupakan basis dalam pembentukan komunitas masyarakat, yang artinya ia harus membawa nilai-nilai universal sehingga tindak ‘perekatan’ dan ‘pengikatan’ dapat dimungkinkan, maka hegemoni terus menerus melakukan relasi interupsi terhadap dimensi universal ini, yang digambarkan sebagai *undecideable terrain* (Laclau, Ernesto. 2007: 89). Wilayah ini adalah wilayah dimana *empty signifier* berusaha diisi sekaligus dipatenkan melalui berbagai interupsi dan subversi, tetapi ia juga memiliki potensi untuk kembali diinterupsi sehingga perumusan total tidak dimungkinkan, sebagaimana dijabarkan oleh Laclau, “*An empty signifier can, consequently, only emerge if there is a structural impossibility in signification as such, and only if this impossibility can signify itself as interruption (subversion, distortion, etcetera) of the structure of the sign*” (2007: 37). Pada poin ini, tindak pemunculan terhadap penanda kosong ini tidak pernah langsung, melainkan melalui tindak interupsi yang didahului melalui kesadaran akan suatu *lack* atau ‘kecacatan’. *Lack* menunjukkan batas pada makna sebelumnya dan menyingkapkan bahwa ia tidak dapat penuh dan merangkul semuanya, dan kesadaran ini memungkinkan interupsi terhadapnya melalui tindak hegemoni. Karena pemunculan *empty signifier* ini adalah sebuah kehadiran suatu penanda yang tidak mungkin terisi secara total, maka *empty signifier* disini dapat diinterpretasikan sebagai *signifier of the lack*. Dengan begitu, kehadirannya adalah batas dari totalitas proses pemaknaan, bahwa selalu ada kelebihan makna yang tak dapat dirumuskan, selalu ada wilayah abu-abu yang memungkinkan tindak subversi terhadap proses pemaknaan. Tetapi sekalipun begitu, ia tidak pernah benar-benar kosong, melainkan selalu mengisi dirinya menuju sebuah totalitas yang berakhir pula dengan kegagalan perumusan totalitas tersebut.

Tindak hegemoni berawal dari partikularitas, yang kemudian demi mencoba melampaui kondisi tersebut ia berelasi terhadap universalitas dengan melebarkan *chain of equivalence*. Pelebaran ini memungkinkan perangkulan terhadap identitas partikular lain dimungkinkan, sekaligus membuat tujuan awal dari actor utama yang melakukan tindak hegemoni semakin kabur, dan mendekati kondisi *empty signifier*. Proses perluasan *chain of equivalence* ini tidak terlepas dari sebuah relasi oposisional yang opresif. Laclau menjelaskan di dalam *Emancipation(s)*:

*“This last fact is what establishes the link between a variety of concrete or partial struggles and mobilization – all of them are seen as related to each other, not because their concrete objectives intrinsically related but because they are all seen as equivalent in confrontation with the repressive regime. It is not, consequently, something positive that all of them share which establishes their unity, but something negative: their opposition to a common enemy.”*  
(Laclau, Ernesto. 2007. Hal. 40)

Relasi oposisional ini membuat suatu identitas tidak mungkin lagi menuntut haknya sebagai sebuah perbedaan, misalnya tuntutan hak dalam memutuskan orientasi seksual tertentu ataupun tuntutan kenaikan upah kaum buruh, karena tekanan yang terlalu besar dari identitas lain yang mendominasi kedua tuntutan tersebut. Hal ini membuat kedua identitas yang menuntut haknya, yaitu kaum yang menuntut hak menentukan orientasi seksual dan kaum buruh yang menuntut kenaikan upah, memiliki satu musuh yang sama dan membuat mereka berada di dalam sisi yang sama-sama beroposisi dengan identitas yang mereka lawan. Posisi ini menegaskan kebersamaan kedua identitas tersebut di dalam melakukan sebuah tuntutan, sekalipun tuntutan mereka tidak sama. *Chain of equivalences* menunjukkan kebersamaan mereka adalah sebuah perangkulan tanpa harus mereduksi identitas diri mereka, karena mereka tetap dimungkinkan tampil sebagai dua identitas yang berbeda. Relasi yang mengikatkan mereka bukan suatu kesamaan di dalam tuntutan, tetapi kesamaan di dalam menentang musuh yang sama.

Kehadiran berbagai identitas yang berangkul secara bersama-sama, tanpa harus mereduksi mereka kedalam kesamaan, dimungkinkan karena relasi

oposisional ini sama-sama membuka kembali *undecideable terrain*. Ketidakpuasan terhadap tatanan simbolik yang lama, memungkinkan kehadiran *empty signifier* sebagai interupsi. Ia muncul tidak dalam rumusan positif, tetapi sebuah bentuk yang mencegah totalitas, yang dengan begitu sekaligus menawarkan bentuk penanda baru sehingga dapat diisi dengan berbagai proses pemaknaan. Interupsi terhadap *undecideable terrain* secara kontingen inilah yang memungkinkan hegemoni merumuskan pemaknaan yang menjadi basis dari masyarakat, karena ia mengandung universalitas yang tidak dirumuskan. Sampai disini, hegemoni bersifat konstitutif. Tetapi kemudian, ketidakterumusan universalitas dalam *undecideable terrain* ini mengharuskan dirinya mengaitkan diri dengan partikularitas, agar dapat mengejawantahkan dirinya, sekaligus menunjukkan batas-batas terluar dari dirinya, yaitu apa-apa yang tidak dapat dirangkul. Hal ini kembali menghadirkan *lack* dan penyingkapan *undecideable terrain* sehingga tindak interupsi melalui proses hegemonik selanjutnya dapat dimungkinkan. Kondisi *lack* ini membuat hegemoni tidak pernah absolute, ia merupakan basis konstitutif sekaligus kontingensi, karena di dalamnya terdapat ajang kontestasi yang sangat padat, “... *various political force can compete in their efforts to present their particular objectives as those which carry out the filling of that lack. To hegemonize something is exactly to carry out this filling function*” (Laclau, Ernesto. 2007: 44)

Untuk lebih menjelaskan relasi antara partikular dan universal ini, dapat dirujuk pada Judith Butler, dimana di dalam *Restaging The Universal: Hegemony and the Limits of Formalism*, ia menjelaskan bahwa tindak hegemoni adalah sebuah tindakan koruptif suatu bentuk partikularitas terhadap yang universal. Partikularitas yang ingin merangkul berbagai identitas di dalam proyek hegemoniknya harus mengekspos dimensi universalitasnya, yang artinya menangkap nilai universal berdasarkan situasi kontekstual. Situasi kontekstual inilah yang memungkinkan universalitas mengejawantahkan dirinya, melalui berbagai produk bahasa, tetapi tidak dapat menunjukkan dirinya secara total. Butler menuliskan, “*That universality is not speakable outside of cultural language, but its articulation does not imply that an adequate language is available*” (Butler, Judith, Ernesto Laclau dan Zizek. 2000: 41) Inkarnasi universalitas di dalam

identitas partikular adalah penunjukan kehadiran diri sekaligus suatu pengotoran terhadap kemurniannya. Bentuk universalitas yang hadir di dalam kerangkeng partikularitas inilah sebuah bentuk yang disebut sebagai universalitas relatif.

Dengan begitu, maka jelaslah bahwa hegemoni memiliki peran yang sangat penting dalam politik, karena ia adalah sebuah tindak yang mengartikulasikan dimensi antagonism sehingga keterikatan yang menjadi syarat bagi terciptanya masyarakat dapat dimungkinkan, dengan proses pematapan identitas dan pengisian kekuasaan. Kekuasaan yang disini dilihat sebagai ruang yang kosong, yang dapat diisi siapa saja, dan artinya membuka kemungkinan hampir tak terbatas bagi segenap elemen dalam masyarakat yang berkonflik dalam relasi antagonisnya guna memenuhi ruang tersebut melalui tindak hegemonik. Namun, karena ia selalu dapat diisi siapa saja, maka sebuah hegemoni yang absolute, yang tidak dapat dijatuhkan, menjadi tidak mungkin. Hegemoni bersifat sementara, sebelum ia digantikan oleh hegemoni yang lain. Ini tidak membuat politik menjadi tanpa acuan yang jelas, melainkan sebaliknya, ia membuat politik menjadi dimensi yang serba mungkin, yang kontingen, tanpa suatu tindak pematapan identitas yang benar-benar mantap.

Selain sifatnya yang sementara, hegemoni juga tidak pernah dapat merangkul segalanya. Dengan demikian, tindak eksklusi masih terdapat pada proses hegemoni, yang dengan demikian memunculkan identitas-identitas diluar dirinya sebagai sesuatu yang berbeda (liyan) sebagai basis konstitutif luarnya sekaligus batas dari cakupan hegemoni. Pada zaman kontemporer ini, dengan munculnya berbagai gerakan sosial baru (*new social movement*,) seperti kaum feminis-radikal, environmentalist, gay/lesbian, post-anarkis, semakin menunjukkan bahwa ketidakabsolutan sebuah hegemoni dalam mengisi ruang kuasa. Sebaliknya, munculnya gerakan-gerakan tersebut menandakan semakin maraknya tindak kontestasi dalam politik yang semakin memantapkan relasi antagonism sekaligus sebuah penyebaran kekuasaan, yang membuat kekuasaan tidak dapat lagi terpusat pada satu hegemoni tertentu saja (Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001: 178).



## 2.4 *The Impossibility of Society*

*Impossibility of Society* merupakan salah satu pokok pemikiran Ernesto Laclau yang akan dibahas oleh penulis di dalam karya ini. Mengenai hal ini, pertama-tama perlu diperjelas lagi mengenai konsep *The Political*, yang merupakan suatu dimensi dimana relasi antagonism, yang didasarkan oleh kondisi pluralitas radikal, mengambil tempat. *The Political* merupakan basis bagi terbentuknya politik, dengan begitu, politik tidak lagi bersandar pada sesuatu yang harmonis dan stabil, tetapi pada situasi konflik dimana persaingan dan kontestasi terus terjadi. Pengartikulasian antara pihak-pihak yang saling berseteru dalam relasi antagonisme ini melalui tindak hegemonik memungkinkan terciptanya suatu kondisi dimana pertentangan dapat ditangguhkan (walau tidak sepenuhnya hilang) dan bentuk pengikatan antar satu-sama-lain dimungkinkan. Kondisi ketika keterikatan, atau kondisi 'kebersamaan', tanpa menghilangkan perbedaan yang terdapat di dalamnya bahkan tidak dapat dihilangkan, inilah yang mendasari pembentukan dimensi *The Social*. Dimensi ini merupakan tempat dimana kehidupan bermasyarakat terjadi, dengan segala subsistem di dalamnya, termasuk politik. *The Social* membangun dirinya melalui proses-proses institusional dan birokrasi.

Di dalam perjalanannya, *The Social*, dengan segala subsistemnya, melakukan sedimentasi terhadap dimensi *The Political*, sehingga pelupaan terhadap relasi antagonism, sebagai dasar pembentukannya, dapat dimungkinkan. Pelupaan ini membuat *The Social* dapat mungkin untuk terus mengembangkan dirinya, sehingga ia menjadi dimensi yang serba utuh, dimana segala bentuk pertentangan dan kondisi kekurangan atau 'lack' tidak terjadi lagi. Kondisi inilah yang digambarkan oleh Laclau sebagai *Society*. *Society* merupakan penutupan terhadap segala kemungkinan proses pemaknaan oleh *The Social* (Marchart. Oliver. 2007: 135). Sebagaimana dituliskan oleh Marchart, dengan mengutip Laclau, "*I understand 'society' to mean simply the possibility of closure of all social meaning around a matrix which can explain all its partial processes*" (2007: 135). dengan kata lain, *Society* adalah pemberhentian terakhir dari *The Social*. Sementara itu, *The Politic* adalah salah satu subsistem dari *The Social*,

dimensi yang berkaitan dengan berbagai institusi dan program dalam menjalankan proses kerja *The Social*.

Sampai disini, maka jelas hubungan proses perjalanan terbentuknya *society* dengan *empty signifier* yang dirumuskan oleh Laclau. *The Political*, yang menyimpan dimensi antagonism ini juga mengandung apa yang disebut sebagai *undecideable terrain*, wilayah yang penuh dengan kemungkinan/ketidakmungkinan. Hal ini didasarkan pada relasi antagonistik, dimana diantara pihak-pihak yang saling bersaing menandakan suatu kekurangan dalam dirinya, dengan menunjukkan pembentukan pihak yang lain sebagai batas konstitutifnya dan ketidakmungkinan totalitas. Proses ini membuat sebuah kepenuhan dalam identitas dan proses identifikasi menjadi tidak mungkin, sekaligus membuka kemungkinan terjadinya perubahan dan berbagai macam kombinasi berbagai identitas. Berbagai macam pluralitas identitas ini kemudian mencoba menginterupsi *undecideable terrain* tersebut melalui tindak hegemoni, dengan upaya tiap-tiap identitas melampaui identitasnya tersebut, sehingga relasinya dengan yang universal dapat terjadi dan tindak perangkulan terhadap identitas lainnya dimungkinkan.

Berawal dari dimensi *The Political*, tindak hegemoni yang menginterupsi *undecideable terrain* ini terjadi dalam dimensi *Politic*. Politik dengan begitu adalah suatu upaya dalam tindak pengisian ‘penanda kosong’ yang sebelumnya tercipta ketika tindak hegemonik berlangsung, dengan mematenkan makna yang dikandungnya. Pematenan makna ini dibutuhkan guna memungkinkan terbentuknya masyarakat. Suatu pemberian makna terhadap ‘penanda kosong’ memberikan basis atau fondasi sehingga *order* dalam masyarakat dapat tercipta dengan melampaui *disorder*. Selanjutnya, tindak pemaknaan ini disedimentasi di dalam *The Social* melalui berbagai praktik institusional, sehingga makna di dalam ‘penanda kosong’ ini menjadi semakin paten dan mapan. Sedimentasi ini membuat dimensi *The Political* menjadi ‘tertudur’, sekalipun ia tetap ada dan menghantui sedimentasi ini, tetapi kehadiran dirinya tidak muncul secara efektif. Segala proses ini membawa *The Social* menuju *Society*, dimana ia merupakan

bentuk penutupan atas segala kemungkinan artikulasi agen-agen sosial yang memungkinkan kontingensi. *Society* adalah penutupan politik, *The End of History*.

Selanjutnya, Laclau mencoba merumuskan ketidakmungkinan pencapaian pembentukan *society* oleh *The Social*. Pertama, harus diingat bahwa basis dari pembentukan masyarakat adalah relasi antagonism. Relasi antagonism ini menyatakan keberadaan subjek-subjek yang plural secara radikal dan tidak dapat terjembatani. Lebih jauh lagi, subjek-subjek ini memiliki identitas yang senantiasa bergerak dalam kontingensi, yang berarti ia tidak pernah mantap secara penuh dan utuh. Identitas ini tidak pernah merepresentasikan subjek secara penuh, ia selalu menyisakan bagian lain yang tidak tereduksi dalam identitas. Bagian-bagian yang tereklusi ini selalu menghantui identitas subjek sebagai yang lain, yang menetapkan batas terluar dari suatu identitas, sekaligus aspek konstitutif bagi dirinya. Dalam kondisinya itu, yang serba kekurangan, subjek selalu terus menerus mencari kepenuhan dirinya dalam suatu identitas yang utuh, yang *tidak mungkin*, sekaligus membuka kemungkinan tak terbatas bagi subjek untuk melakukan proses identifikasi.

Proses identifikasi ini kemudian membawa kita kepada hegemoni, suatu proses pemantapan atas pemaknaan identitas. Hegemoni selalu mencoba menghadirkan identitas yang menjadi representasi bagi *The Social*, yang memungkinkan stabilitas temporer baginya sehingga *The Social* dapat meregulasi dirinya dalam rangka menuju pembentukan *Society*. Hanya saja, karena hegemoni selalu melakukan eksklusi, yaitu tindak pengeluaran apa-apa yang tidak termasuk dalam kategori identitasnya, guna memantapkan pemaknaan, maka hegemoni juga menghadirkan bagian-bagian luar dirinya. Sesuatu yang bukan dirinya, yang berpotensi membentuk kondisi heterogen demi menumpas homogenitas yang diupayakan dalam proses hegemonik. Kemudian, dalam kondisi itulah maka *The Social* memiliki peluang dalam membangun dirinya menuju *Society*, melalui berbagai proses institusional di dalam dirinya. Proses-proses ini terkategori ke dalam berbagai subsistem seperti pendidikan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Proses perjalanan *The Social* inilah, melalui proses institusionalnya, membuat dimensi *The Political* yang menyimpan relasi antagonis menjadi terlupakan. Ia,

seperti apa yang dikemukakan Heidegger, membuat ‘*Dasein* tenggelam di dalam kesehariannya, sehingga melupakan *being*-nya’. Pada situasi inilah, proses pembentukan *society* dapat dimungkinkan.

Selanjutnya, menilik Laclau, apa-apa yang tadinya tereklusi di dalam proses pembentukan *The Social* maupun perjalanannya kemudian menuju *Society*, menuju penutupan proses pemaknaan *The Social*, menunjukkan bahwa dimensi *The Political* yang mengandung relasi antagonis, tidak pernah dapat dihapuskan. Ia hanya disedimentasi oleh perjalanan *The Social*, tapi ia selalu menghantui *The Social* karena ia adalah batas terluar darinya (Hal. 139). Laclau menekankan bahwa proses re-aktivasi terhadap dimensi ini dimungkinkan, dan reaktivasi dimensi *The Political* akan menghasilkan suatu bentuk intervensi terhadap perjalanan *The Social* dalam pembentukan *Society*. Proses ini dimungkinkan karena relasi antagonism yang terkandung di dalam dimensi *The Political* tidak pernah tereliminasi sepenuhnya, melainkan hanya terkubur oleh sedimentasi.

Momen reaktivasi *The Political* pada Laclau akan banyak menaruh perhatian pada konsep waktu. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa mengenai momen reaktivasi ini, Laclau banyak terpengaruh oleh konsep Derrida tentang *spirit*. *Spirit* merupakan sesuatu yang tidak tampak, yang mana harus menampakan dirinya sehingga dapat ditangkap kehadirannya (Lalau, Ernesto. 2007: 69). Dengan begitu, maka *spirit* selalu menghadirkan *spectre*, yang memungkinkan dirinya terlihat sekaligus memperlihatkan bahwa itu bukan dirinya. Paradoks antara keduanya mengakibatkan bahwa *spirit* tidak pernah menghadirkan dirinya secara penuh, tetapi hanya meninggalkan jejak-jejak melalui penampakan *spectre* yang bukan dirinya sekaligus penampakan dirinya. Karena itulah menurut Derrida, suatu proses dekonstruksi dapat dimungkinkan dengan menelusuri kembali jejak-jejak tersebut, hantu-hantu yang menampakan diri, guna mencari *spirit*, dasar dari penampakan dan jejak-jejak tersebut. Pencarian kembali ini artinya ada suatu upaya untuk melakukan proses pemantapan kembali. Dalam *The Social*, dimana ia melakukan institusionalisasi pemaknaan sehingga menciptakan makna-makna yang ‘mantap’ (fiksasi makna), selalu kemungkinan untuk melakukan de-fiksasi makna itu kembali. Momen

inilah yang disebut sebagai re-aktivasi *The Political*. Sementara mengenai konsepsi waktu yang telah disebutkan sebelumnya, Laclau percaya bahwa waktu, tidak seperti *space* yang mana selalu dapat dilakukan oleh tindak hegemonik (Marchart. Oliver. 2007: 139). Waktu tidak bersifat hegemonik, justru dengannya dapat dimungkinkan terjadinya pergeseran pemahaman terhadap makna yang dianggap mapan, sehingga membawa momen reaktivasi, suatu proses dislokasi terhadap pemaknaan sebelumnya.

Bagaimanakan proses re-aktivasi *The Political* ini dapat terjadi? Hal ini tidak terlepas dari pertama, asumsi bahwa ada *empty signifier*, suatu penanda kosong. Yang artinya, sekalipun ia berusaha diisi melalui tindak hegemonik tertentu dan disedimentasi di dalam perjalanannya oleh *The Social*, proses tersebut selalu mengandung suatu *lack*. Hal ini terjadi karena proses pemaknaan tersebut, yang juga mengandung relasi terhadap universalitas, selalu membentuk dirinya melalui partikularitas. Pemunculan *Empty Signifier* dibutuhkan oleh suatu grup particular tertentu demi merangkul grup-grup particular lainnya, karena ia membawa pesan universal yang memungkinkan untuk diisi oleh berbagai pandangan particular. Sementara demi mengaktualisasikan dirinya, perlu ada suatu tindak pengisian terhadap penanda kosong tersebut. Yang artinya, ia harus mengambil posisi tertentu dalam proses pengisian tersebut, demi menegaskan posisi dirinya, dengan membedakannya dari yang lain. Artinya, proses pengisian makna ini terjadi melalui tindak eksklusi yang membuat perangkulan seluruh elemen masyarakat menjadi tidak mungkin, tindak pengisian makna terhadap ‘penanda kosong’ selalu mengalami kegagalan. Laclau menuliskan sebagai berikut, “*The Universal emerge out of particular not as some principle underlying and explaining the particular, but as an incomplete horizon suturing a dislocated particular identity*” (Laclau, Ernesto. 2007: 28)

Kedua, proses re-aktivasi ini tidak terlepas dari *chain of equivalence*. Dengan keberadaannya, maka suatu tindak opisisi terhadap hasil sedimentasi sebelumnya telah berbagi dimensi universal yang memungkinkan partikularitas-partikularitas di dalam masyarakat berbagai dimensi yang sama. Pembagian (*shared*) dimensi ini hanya dapat terjadi apabila setiap elemen sosial tersebut

memiliki kesetaraan diantara mereka dalam upaya memenuhi penanda kosong tersebut. Karena kesetaraan inilah yang memungkinkan setiap elemen masyarakat, sekalipun berbagai dimensi universal yang sama, untuk tetap mempertahankan identitas partikularnya. Dengan mempertahankan identitas particular ini, maka relasi antagonistik antara mereka tetap terjadi. Sehingga persaingan tidak hanya sekedar rezim sosial dengan oposisinya, melainkan juga antara berbagai oposisi yang bersatu di dalam keberbedaannya tersebut. Hal ini dapat lebih diperjelas melalui ilustrasi berikut: gerakan sosial seperti kaum feminis, liberalis, environmentalist, dan sebagainya, sebagai kaum yang terepresi oleh suatu rezim sosial, bangkit untuk melawan rezim tersebut. Setiap gerakan tersebut memiliki identitas masing-masing, dan memiliki tuntunannya sendiri terhadap rezim sosial. Tetapi mereka berjuang bersama dalam beroposisi terhadap rezim tersebut. Disitulah *chain of equivalence* dapat dilihat lebih jelas, sekalipun tiap gerakan memiliki identitas dan agenda yang berbeda, tetapi mereka disatukan dengan fakta bahwa mereka beroposisi dengan rezim yang sama. Hal ini menciptakan sejenis solidaritas antar mereka, dengan tetap menegaskan perbedaan pandangan di dalamnya.

Poin ketiga yang memungkinkan proses re-aktivasi ini adalah apa yang penulis coba tawarkan sebagai *momen etis*. Disini artinya momen etis itulah suatu momen yang menyibakan kondisi sosial dimana di dalamnya terdapat identitas-identitas yang tidak dapat dirangkul, yang diasingkan, dan hadir melalui keliyanannya di dalam proses sedimentasi oleh *The Social*. Momen etis membuka kemungkinan bagi *The Social* untuk menerima yang liyan tersebut sehingga dapat bersaing di dalam ranah simbolik yang sama, artinya mengaktifkan kembali dimensi *Political* dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsepsi *forgiveness* yang diajukan oleh Derrida, dimana ia hanya dapat berarti sejauh tindak 'memafkan' dapat diterapkan terhadap 'yang tidak termaafkan' (Derrida, Jacques. 2005: 32). Derrida menuliskan, "*One cannot, or should not, forgive; there is only forgiveness, if there is any, where there is the unforgiveable.*" (2005: 33). Dengan keberadaan 'yang tidak termaafkan', maka ia hadir sebagai imposibilitas dari tindak memafkan, dan inilah yang membuat tindak memafkan menjadi berarti. Karena artinya, ia melampaui posibilitasnya, melampaui batas

konstitutif bagi dirinya, dan membuka diri terhadap yang lain yang berada diseberang sana. Kondisi ini analog dengan *The Social*, yang sekalipun melakukan sedimentasi terhadap *The Political* melalui tindak fiksasinya terhadap ‘penanda kosong’, yang kemudian memunculkan tindak eksklusi, memunculkan yang lain sebagai batas luar *The Social*, ‘yang tidak termaafkan.’ Sehubungan dengan kondisi inilah, maka urgensi terhadap momen etis diperlukan, sehingga tindak memaafkan terhadap yang tidak termaafkan dapat dimungkinkan. Dan sejalan dengan itulah dimensi *The Political* kembali direaktivasi guna mengintervensi *The Social* dalam proses pembentukan *Society*.

Dengan adanya proses re-aktivasi ini, maka proses dislokasi terhadap makna yang tadinya telah tersedimentasi oleh *The Social* dapat dimungkinkan. *The Political* sebagai basis dasar dari *The Social* kembali dengan membawa relasi antagonismenya, untuk kemudian melakukan intervensi dalam bentuk dislokasi makna, sehingga proses pemaknaan menjadi tidak berhenti. Ketidakberhentian proses ini membawa masyarakat selalu dalam kondisi yang kontingen, yang senantiasa bergerak, tanpa ada kemungkinan untuk menutup proses pemaknaan tersebut. Dengan begitu, maka *Society* sebagai penutupan proses pemaknaan melalui institusionalisasi *The Social* menjadi tidak mungkin sekaligus kemungkinannya. Ia mendorong *The Social* melalui tindak institusionalnya melakukan pemantapan makna atau sedimentasi, dengan harapan pencapaian final pada terbentuknya *Society*, tapi ia tidak mungkin untuk tercapai. Sebaliknya, ketidakmungkinan ini membuka peluang bagi *The Social*, melalui proses sedimentasinya, untuk terus menerus diintervensi di dalam momen reaktivasi *The Political*, sehingga proses pemaknaan oleh *The Social* tidak pernah berhenti.

### BAB 3

#### KOEKSISTENSI DAN MOMEN ETIS

Berbicara mengenai politik tentu tidak akan terlepas dari peran individu sebagai subjek yang terjun kedalam suatu bentuk relasi sosial. Bentuk relasi inilah yang kemudian memungkinkan suatu proses penciptaan komunitas melalui artikulasi-artikulasi politik dapat terjadi. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, subjek politik ini, yang melakukan hubungan sosial, perlu diberangkatkan melalui titik dimana ia merupakan subjek secara umum. Artinya, subjek yang terlepas dari segala bentuk identitas apapun, subjek yang masih ada bagi dirinya sendiri. Dari poin inilah, baru kemudian ia melakukan tindak imajinatif dalam membayangkan eksternalitas dirinya sebagai sesuatu yang memiliki hubungan dengan dirinya. Lebih jauh lagi, bahkan eksternalitas tersebut semakin mengancam posisi subjek yang berdiri sendiri ini sebagai suatu identitas subjek yang utuh. Dengan kata lain, subjek berbasiskan suatu bentuk misrekognisi terhadap dirinya, sebagai kesatuan yang utuh, dan mengharuskan dirinya, sebagai suatu kebutuhan, untuk melakukan relasi sosial dengan eksternalitas dirinya. Kebutuhan dan keharusan terhadap eksternalitas individu sebagai subjek, mendasari konsepsi mengenai koeksistensi. Dan mengenai penjelasan ini, penulis akan mencoba berangkat melalui konsep subjek menurut psikolanalisa Lacanian.

Selanjutnya, ketika relasi intersubjektif yang didasarkan kebutuhan karena kondisi subjek individu yang demikianlah, yang kemudian mendasari terbentuknya relasi sosial. Di dalam relasi sosial ini, terdapat hubungan yang lebih kompleks antar berbagai individu, dengan berbagai identitas dan kontekstualitas historisnya, sehingga pertanyaan mengenai 'cara hidup bersama' demi mencapai suatu tujuan dan kebahagiaan ini dapat dimungkinkan. Pertanyaan mengenai cara hidup bersama dan segala bentuk sistem yang menaunginya inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan tentang etika. Sebagai suatu kajian ilmu yang membahas tentang tataran nilai yang memungkinkan adanya 'keserasian' di dalam hidup bersama, sekaligus kajian yang mengancam pemahaman tentang



‘keserasian’ tersebut. Mengenai pembahasan tentang etika ini, yang kemudian akan memuncak pada pemunculan ‘momen etis’, penulis akan banyak mengambil referensi dari Jacques Derrida tentang *Hospitality*, selain sumber-sumber lain yang berhubungan.

### **3.1 Misrekognisi Subjek Terhadap Dirinya dan Kebutuhan Terhadap Orang Lain**

Mengenai konsepsi tentang subjek, sejalan dengan Laclau, penulis mencoba berangkat melalui konsepsi subjek Lacanian. Dalam hal ini, artinya subjek adalah subjek yang selalu mengalami keserbakekurangan atau *lack*, yang dengan begitu tidak pernah dapat mencapai pemenuhan identitasnya sebagai sesuatu yang utuh. Subjek selalu kekurangan secara inheren, dan kondisi ini terjadi karena ada ekses terhadap dirinya. Ada sesuatu yang tidak dapat diinklusikan kedalam diri subjek sehingga ia tidak pernah mencapai keutuhan tersebut. Mengenai konsepsi subjek Lacanian ini, penulis akan menjelaskan secara lebih sistematis dengan berangkat dari kondisi terpecahnya subjek melalui hubungan antara *The Real*, *The Symbolic*, dan *The Imaginary*.

Yang pertama adalah fase *The Imaginary*, disini adalah fase yang menandakan keretakan atau terpecahnya subjek, yang terjadi ketika masa kanak-kanak. Fase ini digambarkan Lacan sebagai *Mirror-Stage* atau fase cermin (Robertus, Robet. 2010: 74). Di dalamnya, muncul suatu kesadaran bagi sang anak akan segala macam bagian dan operasionalitas bagian-bagian tubuhnya. Kemudian, si anak melihat dirinya seperti melihat kedalam ‘cermin’. Dengan cermin disini adalah sesuatu yang menghasilkan imaji tentang tubuh sang anak yang kemudian dipersepsi oleh intesionalitasnya. Dalam tindak persepsi ini, sang anak akan menemukan suatu sensasi tentang keadaan dirinya yang utuh, yang lengkap dengan berbagai bagian-bagian dirinya yang menyatu dalam satu tubuh. Di dalam pemunculan sensasi akan keutuhan tubuhnya tersebut inilah, sang anak kemudian menyadari dirinya sebagai sesuatu yang otonom, yang tetap dan koheren dengan dirinya, sebagai suatu *ego* yang permanen (2010:74). Tetapi kemudian, kesadaran terhadap koherensi permanen atas *ego* ini sekaligus memunculkan suatu ekses terhadap sang anak. Ketika ia menentukan dirinya

sebagai bentuk koherensi permanen akan ego, sekaligus pula ia melakukan sesuatu diluar dirinya, yang tidak dapat diinklusikan secara utuh. Suatu pemunculan terhadap ego sang anak tidak dapat berdiri pada dirinya sendiri, melainkan bergantung pada sesuatu diluarnya, melalui identifikasi tentang sebuah imaji tentang stabilitas (Newman, Saul. 2005: 57). Proses sang anak untuk mengidentifikasi dirinya sebagai suatu keunikan tersendiri sekaligus juga membuat dirinya menjadi terpecah, antara apa yang ia identifikasikan dengan dirinya, dengan apa yang merupakan imaji dari dirinya. Dengan mengidentifikasi diri dan imaji tentang dirinya, artinya ia harus dapat membatasi sejauh mana sensasi akan ketubuhannya yang dapat dirangkum dalam suatu identitas, dan itu artinya membuang hal-hal selain dirinya keluar. Keretakan inilah yang membuat subjek selalu mendambakan keutuhan egonya. Dengan kata lain, struktur pertama di dalam fase *The Imaginary* sudah menunjukkan suatu *lack* pada diri subjek di dalam pembentukan dirinya.

Kedua adalah tahap *The Symbolic*, yang merupakan medan dimana realitas terbentuk melalui proses pembahasaan. *The Symbolic* memungkinkan subjek untuk mengetahui realitas, melalui bahasa, sekaligus mengurungnya di dalam penjara bahasa tersebut. Ia mampu menghadirkan realitas kepada subjek, melalui struktur penanda-petanda, dimana struktur ini berproses melalui sistem *chain of signifier*, yang artinya, suatu *signifier* tidak pernah menghadirkan *signified* yang diasosiasikan dengan dirinya secara langsung, melainkan melalui keterhubungannya dengan *signifier* lainnya. Dengan adanya proses ini, maka realitas selalu menghadirkan dirinya sekaligus memiliki akses akan keberadaan yang lain (*The Other*). Berhubungan dengan fase sebelumnya, kehadiran yang lain ini sebagai sesuatu yang alien, memantapkan kegagalan subjek dalam mempertahankan keutuhan dirinya. Karena ia selalu membayangkan yang lain sebagai sesuatu yang tidak dapat dimasukan sebagai bagian dari dirinya. *The Other* dalam realitas simbolis kemudian membentuk diri subjek sebagai sesuatu yang koheren dan unik sekaligus terpisah dari apa yang tidak dapat diinklusikan dan menandakan keberadaan suatu *unikum* lainnya.

Sementara yang terakhir adalah *The Real*, yang digambarkan Lacan sebagai realitas yang belum terbahasakan. Ia merupakan sesuatu yang berada diluar realitas yang mana selalu diusahakan oleh *The Symbolic* agar dapat dibahasakan. *The Real* inilah yang menjaga kondisi keserbakekurangan subjek, karena ia menghadirkan dirinya sebagai sesuatu ‘diluar sana’ yang harus ditangkap, yang sepenuhnya asing dan alien secara radikal. *The Real* adalah suatu keutuhan realitas, yang karena tidak terbahasakan, maka ia tidak menciptakan akses bagi dirinya karena tidak mengalami proses *signified-signifier* dan sistem *chain of signifier*. Tetapi karena tidak terbahasakan ini juga, ia menjadi asing, tidak dapat ditangkap oleh subjek. Tetapi keterpecahannya dalam fase *The Imaginary* dan keterkurungan sekaligus pembentukan dirinya di dalam *The Symbolic*, maka subjek selalu berusaha bergerak menuju *The Real*, sebagai penyaluran kerinduannya akan keberadaan dirinya yang utuh, tanpa *lackness*. Dengan kata lain *The Real* adalah posibilitas sekaligus imposibilitas di dalam proses pemenuhan diri subjek membentuk identitasnya. Ia mengintervensi upaya subjek yang bergerak menuju kondisi kepenuhan tersebut sehingga selalu gagal. Newman menuliskan sebagai berikut, “*The Real is the dimension that intervenes to block the full realization of any identity – it refers to the internal limits in the symbolic structure of identity itself.*” (Newman, Saul. 2005. Hal. 59)

Dengan keberadaan subjek yang selalu mengalami kondisi keserbakekurangan atau *lackness* ini, maka pertama-tama dapat disimpulkan bahwa subjek adalah subjek yang gagal mengidentifikasi dirinya sebagai sebuah kesatuan yang utuh, dan setiap proses kegagalan dalam level struktur inilah yang memungkinkan subjek menjadi subjek. Selanjutnya, dari subjek yang selalu mengalami kegagalan dalam mengkonstitusi dirinya, yang merupakan basis konstitutif pembentukan dirinya, ia mengalami ketegangan antara dirinya dan yang lain, *The Other*. Ketegangan ini merupakan sumber produktivitas pembentukan identitas diri subjek, karena ia menghadirkan diri sebagai sumber posibilitas sekaligus batas imposibilitasnya.

Dari penjelasan tentang subjek inilah, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan hubungan antara subjek dengan yang lain sebagai orang lain. *The*

*Other* disini dilihat sebagai sebagai suatu bentuk *unikum* lainnya, yang juga memiliki *lackness* di dalam dirinya, sehingga relasinya akan menentukan pembentukan subjek dan dirinya. Relasi ini dijelaskan oleh Lacan melalui konsep *desire for other*, suatu hasrat terhadap orang lain, yang kemudian memungkinkan subjek untuk hadir karena keberadaannya tersebut. Hasrat terhadap orang lain ini muncul dari kondisi dasar subjek yang selalu mengalami ‘keberkekurangan’, karena itulah ia membutuhkan yang lain, yang secara konkrit dapat hadir untuk menghasrati dirinya. Bentuk penghasratan dari yang lain ini adalah suatu afirmasi terhadap keberadaan dirinya, yang selalu ingin mencapai kepenuhan (Fink, Bruce. 1995: 59). Dari titik ini, maka Lacan menambahkan bahwa hasrat dari subjek adalah hasrat untuk dihasrati oleh orang lain, seperti dituliskan oleh Bruce Fink, mengutip dari Lacan, “*Man’s desire is for the Other to desire him*” (1995: 59).

Dengan begitu, individu lain hadir bukan sebagai yang subjek yang pasif, yang siap untuk diobjekan. Ia adalah subjek yang juga mengalami kondisi *lackness* di dalam dirinya, yang hadir guna mengafirmasi keberadaan subjek lain. Lacan kemudian menyebut subjek tersebut sebagai *Object Petit a* (1995: 59) atau dapat diterjemahkan penulis secara bebas sebagai ‘Objek a’. Objek a merupakan suatu kondisi dimana ia hadir sebagai pemicu bagi keterpecahan subjek, ia muncul ketika subjek terpecah dari suatu bentuk kesatuan yang utuh, dan hadir sebagai masing-masing *unikum* dan dalam kondisi yang *lack*, tetapi ialah yang mendorong hasrat sang subjek dalam mengatasi keserbakekurangannya tersebut guna mencapai totalitas atau keutuhan. “*Object a can be understood here as the remainder produced when that hypothetical unity breaks down, as a last trace of that unity, a last remainder thereof*” (1995).

Dari penjelasan diatas tentang kondisi subjek Lacanian dan hasratnya terhadap orang lain, dalam bentuk hasrat agar orang lain menghasrati dirinya, konsepsi Lacan tentang subjek mensyaratkan kebutuhan terhadap *The Other*, terhadap yang lain. Karena bagaimanapun, tanpa afirmasi (dalam berbagai bentuk) dari yang lain, maka subjek tidak pernah dapat terbentuk. Bruce Fink lebih menegaskan bahwa Objek a dibutuhkan sebagai komplemen phantasmatik bagi subjek, “*Object a is the subject’s complement, a phantasmatic partner that*

*ever arouses the subject's desire.*" (1995: 61). Subjek Lacanian disini sangat berbeda dari subjek ala Cartesian yang dapat berdiri sendiri, tanpa membutuhkan eksternalitas dirinya, malah sebaliknya, justru eksternalitas tersebut ada karena ia merupakan hasil perluasan dari *ego cogito*. Sementara Lacan memformulasikan subjek yang bereksistensi di dalam relasinya dengan eksistensi orang lain. Subjek disini adalah subjek yang koeksistensial.

Pada pembahasan berikutnya, penulis akan menjelaskan subjek yang koeksistensial ini dengan dimensi etis.

### **3.2 Koeksistensi dan Hospitality Sebagai Bentuk Tanggung Jawab terhadap *The Other***

Suatu pembentukan dasar koeksistensi telah dijelaskan melalui konsepsi subjek dalam psikoanalisa Lacanian. Berikutnya adalah, bagaimana koeksistensi yang didasarkan pada kebutuhan terhadap orang lain dapat memunculkan sebuah bentuk tanggung jawab? Suatu relasi yang menyentuh dimensi etis sang subjek. Koeksistensi mensyaratkan bahwa individu tidak dapat berdiri sendiri, sebagai ada dalam dirinya sendiri, melainkan sebagai subjek yang selalu membutuhkan relasi terhadap eksistensi orang lain. Dengan kebutuhannya terhadap orang lain ini, maka setiap individu memiliki rasa tanggung jawab terhadap lain.

Rasa tanggung jawab bukannya hadir begitu saja sebagai bentuk egoism dari sang subjek, melainkan muncul karena hal ini merupakan suatu pergerakan subjek menuju daerah yang tidak dapat dirumuskan (*undecideable terrain*). Subjek melihat subjek lain, sebagai suatu unikum, membawa sesuatu yang tidak dapat direduksi total kedalam dirinya. Sebaliknya, relasinya dengan yang lain tersebut membawanya masuk kedalam daerah yang tidak dapat dirumuskan, yang belum terbahasakan. Dengan menyadari bahwa subjek yang dihadapi merupakan suatu *unikum* yang tidak dapat direduksi kedalam diri saya, maka saya harus bertanggung jawab terhadapnya, karena ia merupakan sesuatu diluar diri saya yang hadir sebagai sesuatu yang asing, tetapi sekaligus menjadi pendorong bagi saya untuk meng-aktualisasikan diri, sebagai 'pengingat' atau *remainder* terhadap eksistensi saya. Ketegangan antar kedua hal inilah yang memungkinkan

muncul relasi tanggung jawab terhadap yang lain. Dengan kata lain, tanggung jawab selalu berada dalam orbit perputaraannya mengelilingi daerah yang tak terumuskan, daerah dimana yang lain hadir sebagai sesuatu yang asing sehingga membingungkan kita untuk bertindak, tetapi dorongan dari kebutuhan terhadap orang lain tersebut pada akhirnya mengkonstitusi relasi tanggung jawab tersebut.

Selanjutnya, relasi ini adalah suatu bentuk moralitas primitif manusia di dalam relasinya dengan yang lain, sebagaimana dikutip dari Budiarto, "*Jadi, moralitas bersifat niscaya karena mengandaikan dimensi tanggung jawab manusia terhadap yang liyan, yang seperti dikatakan Levinas, bersifat tak terhindarkan sehingga merupakan "prinsip individuasi yang absolute."*" (Danurjaya, Budiarto. 2012: 86). Moralitas menjadi menjadi karena adanya relasi tanggung jawab, dan tanggung jawab muncul karena kebutuhan dan 'keterkejutan' individu terhadap orang lain. Dengan begitu, maka moralitas, dalam bentuk relasi tanggung jawab ini, terdapat dalam berbagai relasi intersubjektif. Ialah yang kemudian mendasari pembentukan suatu komunitas karena ia yang memungkinkan tanggung jawab dan penerimaan terhadap yang lain. Moralitas yang menjadi basis relasi intersubjektif kemudian meluas menjadi basis pembentukan komunitas atau sistem hidup bersama.

Walaupun relasi ini mendasari pembentukan komunitas secara umum, tetapi relasi tanggung jawab dan penerimaan terhadap yang lain ini selalu mengambil bentuk yang lebih spesifik. Hal ini tidak terlepas dari posisinya yang berelasi terhadap 'daerah yang tidak terumuskan', daerah yang hadir sebagai syarat posibilitas tanggung jawab sekaligus batas imposibilitasnya. Tanggung jawab, yang ketika dihadapkan pada situasi yang lebih kompleks seperti komunitas, atau dalam bahasa Levinass sebagai "kemunculan pihak ketiga," harus mengambil bentuk kedalam sistem simbolik dalam realitas, yang dengan kata lain, mengaktualisasikan dirinya kedalam realitas melalui sistem bahasa. Dan semenjak keterceburannya ini, relasi tanggung jawab sebagai moralitas primitif, yang mana ia membuka penerimaan terhadap yang lain, menjadi *aktual* sekaligus *partikular*. Ia tidak dapat lagi merangkul semuanya, melainkan harus melakukan tindak eksklusi sebagai limit posibilitasnya. Dititik inilah artinya 'dimensi etis' yang

menyimpan segala bentuk keterbukaan, penerimaan, dan tanggung jawab total terhadap yang lain menjadi bentuk tataran nilai atau norma-norma yang bersifat regulatif. Tataran nilai dan norma ini bukanlah suatu bentuk penerimaan dan tanggung jawab yang sesungguhnya karena merupakan sistem yang mempengaruhi individu secara derivatif dan ia telah terbahasakan, teraktualisasi sekaligus terkurung, di dalam realitas. Artinya, ia bukan *absolute hospitality*, sebagaimana dirumuskan oleh Derrida:

*“... with which they mean to condition to the Great Law of Hospitality – an unconditional Law, both singular and universal, whichg ordered that the borders be open to each and every one, to every other, to all who might come, without question or without their even having to identify who they are or whence they came.”*  
(Derrida, Jacques. 2005. Hal. 18)

Dengan begitu, *hospitality*, sebuah bentuk penerimaan tak berkondisi terhadap yang lain, selain merupakan basis kemungkinan terbentuknya komunitas dan sistem hidup bersama, ia juga harus hadir di dalam ketidakhadirannya, demi perannya dalam melemparkan dirinya dari daerah yang terumuskan untuk menjadi mungkin. Di dalam ketidakhadirannya itulah *hospitality* terus menerus menginterupsi, demi membuka kembali peluang penerimaan terhadap yang lain (Westmoreland, Mark. 2008). Westmoreland menuliskan dalam sebuah artikel, *“Interruptions. That which makes unconditional hospitality possible also allows for the impossibility of hospitality”* (2008: 6). Dari situlah maka jelas bahwa *hospitality* merupakan suatu etika yang berbeda dengan aliran etika lainnya, karena bukannya menawarkan kondisi tertentu, ia justru harus terlepas dari segala kondisi. *Hospitality* adalah interupsi, karena rumusan dirinya sebagai penerimaan total merupakan sebuah simbol bahwa berbagai penerimaan melalui regulasi sebelumnya tidak pernah cukup. Hospitalitas mengintervensi relasi antara subjek dengan yang lain tersebut untuk menunjukkan ketidakcukupannya, serta membawa se bentuk transformasi di dalam merumuskan kembali relasi subjek dengan yang lain. Relasi subjek dan yang lain, disini dapat digambarkan melalui *relasi A*, merupakan sebuah relasi yang diregulasi melalui derivasi tataran nilai-nilai sebelumnya, misalnya seorang penganut agama Islam memandang orang non-Muslim sebagai kafir, dan ini mengkonstitusi bagaimana cara ia berelasi dengan

sikafir. Disinilah hospitalitas melakukan intervensi, dengan menunjukkan bahwa relasi antara penganut Islam tersebut dengan orang non-Muslim bukanlah relasi yang mencukupi, *relasi A* yang terjadi antara mereka bukanlah sebuah bentuk relasi penerimaan total, tetapi sebuah penerimaan berkondisi dan dengan begitu mereduksi keliyanaan yang lain. Intervensi hospitalitas memungkinkan transformasi relasi antara subjek dengan yang lain, sehingga *relasi A* menjadi *relasi A'* dan seterusnya.

### 3.4 Antagonisme dalam Koeksistensi

Koeksistensi, yang mana merupakan sebuah kondisi berkehidupan subjek, menurut Laclau tidak pernah dapat terlepas dari dimensi antagonism. Sebaliknya, justru antagonism itu sendiri selalu berada di dalam ranah koeksistensi, yang mana hal ini berakar pada praktik-praktik artikulasi dan diskursus di dalam formasi sosial. Diskursus sendiri menurut Laclau merupakan totalitas yang terstruktur, yang mana ia merupakan hasil dari praktik artikulasi. Seperti dituliskan, “*The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse.*” (Laclau, Ernesto and Mouffe. 2001: 105). Dengan menempatkan dirinya sebagai sebuah struktur totalitas, maka praktik diskursus berusaha menaruh bentuk bagi formasi sosial, dan ia merupakan ontologi di dalam masyarakat.

Dengan formasi diskursif sebagai basis ontologi, tidak membuat struktur sosial terlepas dari dimensi antagonism. Diskursus, yang merupakan hasil dari praktik artikulasi, selalu menyimpan dimensi antagonistik. Hal ini terdapat di dalam praktik artikulasi itu sendiri, karena ia berusaha membangun sebuah relasi dengan *element*, yang mana *element* ini merupakan berbagai perbedaan yang belum terartikulasikan. Laclau menulis di dalam bukunya, “*By contrast, we weill call element any difference that is not discursively articulated.*” (2001: 105). Usaha penstabilan relasi antara berbagai identitas yang belum terartikulasikan inilah dimana momen antagonism mengambil tempat. Dengan kehadiran *element* sebagai sesuatu yang sama sekali belum terartikulasikan, maka suatu pembentukan relasi adalah sebuah antagonism antara kedua hal yang berada sebagai garda depan identitasnya. Ia menaruh batas bagi dirinya dengan



menghadapi sesuatu yang asing diluar sana. Sebuah upaya penstabilan maka adalah sebuah ketegangan antara berbagai *element*, sehingga dapat membentuk kondisi perbedaan tersebut menjadi sesuatu yang hadir sebagai posisi yang berbeda-beda dalam sebuah diskursus, yang disebut sebagai *moment*.

Berangkat dari hal-hal tersebut, maka menjadi jelas bahwa keempat aspek diatas merupakan komponen-komponen pembentukan masyarakat dengan diskursus sebagai basis ontologinya. Maka, dengan kehadiran *element*, sebagai sesuatu yang belum terartikulasikan secara diskursif, selalu membuat formasi diskursif mengalami posisi yang tidak pernah stabil. Formasi diskursus selalu mengalami kelebihan makna atau *excess of meaning*, yang berada diluar dirinya. Kondisi ini tidak dapat dirumuskan secara positif, karena perumusan dirinya secara positif hanya akan menimbulkan terbentuknya suatu formasi diskursus baru yang berposisi dengan formasi diskursus sebelumnya. Justru karena ia tidak pernah dirumuskan secara positiflah, ia menjadi berada diluar formasi diskursus sekaligus hadir sebagai limit bagi formasi diskursus tersebut. Sebagai sesuatu yang membuat formasi diskursus tersebut juga tidak dapat menjadi suatu formulasi positif, yang penuh dan utuh. Pada poin inilah, Laclau menyebutkan bahwa ketika ada suatu limit bagi objektivitas dan postivitas formasi diskursus, yang menghalangi penutupan pemaknaan terhadap dirinya, yang disebut sebagai antagonisme. Laclau menyebutkan, "*This 'experience' of the limit of all objectivity does have a form of precise discursive presence, and this is antagonism.*" (2001: 122)

Antagonisme dengan demikian tidak dapat diposisikan sebagai suatu kondisi dimana dua identitas yang bertentangan, dengan segala keutuhan dan kepenuhannya, mengalami benturan opisional. Misalnya, benturan antara subjek dengan identitas Islam dan subjek dengan identitas Katolik. Seandainya keduanya mengklaim bahwa identitas mereka merupakan sebuah identitas dengan kondisi yang utuh dan penuh, maka benturan antara keduanya tidak dapat dihindarkan lagi. Identitas yang satu harus mengeliminasi identitas yang lain. Sebaliknya, pada relasi antagonism, pembentukan identitas mustahil untuk terumuskan secara positif dan objektif. Antagonism justru menunjukkan bahwa kehadiran yang lain,

*the Other*, adalah batas bagi identitas diriku, bahwa ada yang kehadiran yang lain yang mencegah diriku untuk menjadi sebuah totalitas yang utuh dan penuh. Laclau menjelaskan, “*The relation arises not from full totalities, but from the impossibility of their constitution.*” (2001: 125). Antagonism mencegah segala bentuk konstruksi positif dan objektif, ia justru menaruh batas bagi segala bentuk objektivitas. Ia berada ‘diluar’ segala hasil formasi diskursus seperti posisi subjek maupun identitas, dan dengan kehadirannya yang mencegah segala bentuk penutupan, ia dapat masuk untuk melakukan subversi terhadap formasi diskursus tersebut. Karena kondisi inilah, diriku tidak pernah menjadi utuh, dan yang lain menjadi sesuatu yang benar-benar asing bagi diriku. Yang lain selalu menginterupsi objektivitas diriku sehingga aku selalu mengalami kegagalan dalam mengkonstitusi diriku. Antagonisme menunjukkan ketidakmungkinan subjek untuk mencapai totalitas dari identitas, ia menunjukkan batas-batas dirinya sehingga sebuah kondisi final dari identitas tidak pernah dapat dimungkinkan.

Dengan kehadiran antagonism di dalam dimensi sosial, yaitu sebuah bentuk kehadiran yang menaruh batas bagi segala bentuk objektivitas pemaknaan, maka relasi yang terjadi antara aku dan yang lain adalah relasi yang saling menegasikan pembentukan identitas diriku yang penuh dan utuh. Antagonisme menjelaskan relasi antara aku dan yang lain sebagai sesuatu yang benar-benar asing, yang tidak terjelaskan secara positif dan objektif, karena ia tidak pernah penuh dan selalu dirongrong dalam proses pemenuhannya tersebut. Kondisi inilah yang kemudian membutuhkan suatu bentuk hospitalitas di dalam koeksistensi. Sebuah penerimaan absolute terhadap yang lain, yang tanpa kondisi tertentu, karena relasi terhadap sesuatu yang benar-benar alien, benar-benar membutuhkan penerimaan tanpa kondisi. Sebuah bentuk penerimaan yang tidak terumuskan secara positif, yang selalu menghantui segala bentuk keputusan moralitas, hal inilah yang merupakan sebuah momen etis. Momen yang menghubungkan diriku terhadap yang lain sebagai sesuatu yang benar-benar asing.

### **3.3 Momen Etis: *Hospitality* Sebagai Interupsi**

Titik berangkat terhadap momen etis ini bermula dari keberadaan moralitas individu dalam bentuk tanggung jawab terhadap yang lain, dalam

sebuah bentuk hidup bersama. Tanggung jawab terhadap yang lain kemudianlah yang membentuk masyarakat, dengan begitu, moralitas mendahului masyarakat (Danujaya, Budiarto. 2012: 88). Keberadaannya memungkinkan koeksistensi, yang mendasari keberadaan konstitutif subjek, semakin meluas kedalam tahap hidup bersama, tidak sekedar sebagai ada bersama. Dengan begitu, suatu pengelolaan tanggung jawab sebagai dasar bagi kehidupan bersama kemudian dikelola secara lebih spesifik lagi secara sadar oleh para subjek etis tersebut, dan mereka sadar karena itu adalah kebutuhan mereka untuk tetap mempertahankan diri sebagai subjek, yang koeksistensial, yang membutuhkan yang lain diluar sana. Budiarto dalam bukunya menuliskan, *“Jadi, titik-tolaknya lebih sebuah kesadaran akan kebutuhan, yakni tanggung jawab keterhunungan manusia pada yang liyan—kebutuhan koeksistensial manusia.”* (2012: 87)

Selanjutnya, pembahasan mengenai momen etis adalah titik dimana kebutuhan koeksistensial tersebut, relasi tanggung jawab terhadap yang lain, yang mengelilingi *undecideable terrain*, mensyaratkan suatu bentuk hospitalitas tanpa kondisi. Mengenai hospitalitas sendiri, Derrida menggambarkannya sebagai kebudayaan itu sendiri, dan bukannya sekedar suatu aliran etika, karena itu menyangkut tentang tata cara kita bersikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Ia menuliskan dalam bukunya:

*“Hospitality is culture itself and not simply one ethic amongst others. Insofar as it has to do with the ethos, that is, the residence, one’s home, the familiar place of dwelling, inasmuch as it is a manner of being there, the manner in which we relate to ourselves and to others, to others as our own or as foreigners, ethic is hospitality; ethic is so thoroughly coexistent with the experience of hospitality.”* (Derrida, Jacques. 2005: 16)

Dengan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hospitalitas sendiri merupakan dimensi etis yang sangat luas. Ia adalah akar dari segala bentuk regulasi relasi antara aku dan yang lain. Karena itulah Derrida menekankan bahwa hospitalitas tidak dapat disamakan dengan etika yang lainnya, sebagai suatu aliran diantara berbagai aliran-aliran etika. Hospitalitas melampaui mereka semua, karena ia berada pada tataran sebelum regulasi tersebut terbentuk secara derivatif,

ia berada diwilayah yang tidak terumuskan, yang selalu menginterupsi sekaligus berusaha diinterupsi.

Dalam posisinya yang berada sebagai dasar itulah, kemudian hospitalitas memerlukan suatu tindak definitif dalam mengatasi wilayah koeksistensi. Pembentukan tindak definitif tersebut pada akhirnya melahirkan suatu sistem aturan atau tataran nilai yang aplikatif dan berelasi langsung dengan kondisi individu. Hal ini membuat hospitalitas menjadi basis pembentukan sistem nilai dan aturan yang bersifat partikular, seperti moralitas masyarakat tertentu dan pembentukan hukum sebagai pengejawantahan dimensi primordial hospitalitas. Perlunya suatu tindakan yang membentuk sebuah regulasi dalam tataran etis ini dikarenakan hospitalitas itu sendiri berada di dalam daerah yang tidak terumuskan, yang artinya ia adalah kemungkinan sekaligus imposibilitas tindakan etis, ia berada secara inheren, primordial, sekaligus asing dan alien. Pembentukan tataran regulatif nilai pada akhirnya membawa hospitalitas sebagai upaya yang nyata dalam mengatasi koeksistensi individu. Dengan kata lain, diperlukan suatu tindak serupa *decisionisme*, guna memagari batas-batas hospitalitas yang dapat langsung dijadikan acuan dalam sarana regulasi nilai. Westmoreland menulis bahwa “*Such hospitable act remains conditional.*” (Westmoreland, Mark. 2008: 4)

Tindak *decisionistic* terhadap hospitalitas ini terjadi dalam dimensi ‘kekinian’, dimana suatu bentuk regulasi nilai yang berelasi langsung dengan relasi antarindividu sebagai subjek etis dapat dibentuk. Ia bersifat sekarang dan emergensi, dan wilayahnya yang *aspasiotemporal* perlu *dispasiotemporalkan*. Pada saat itulah, hospitalitas mengambil bentuk, sekaligus kehilangan bentuk originalnya. Ia tidak lagi bersifat universal, dalam artian *infinite*, tak terbatas, sebagai bentuk penerimaan total yang mendasari setiap relasi intersubjektif, relasi yang memerlukan tanggung jawab sebagai kebutuhan primitif individu, tetapi diturunkan menjadi sekedar sistem nilai, suatu tataran yang aplikatif di dalam kehidupan sekaligus partikular dan spasiotemporal. Pengejawantahan diri hospitalitas kedalam dimensi partikular juga memungkinkan dirinya untuk selalu kembali diinterupsi. Sebuah pembentukan tataran nilai yang berasal dari

pengejawantahan hospitalitas tidak pernah bersifat absolut, pertama karena kondisi hospitalitas yang plural, dan kedua karena hasil pengejawantahan dirinya ini tidak pernah dapat mencapai totalitas, dalam artian selalu memunculkan tindak eksklusif. Di sini sebuah bentuk otonegativitas terhadap hospitalitas menjadi dimungkinkan. Otonegativitas ini berasal dari ketegangan yang dibawa oleh proses pengejawantahan hospitalitas kedalam partikularitas, yang dengan begitu ia tidak bersifat tertutup. Otonegativitas dalam pengejawantahan hospitalitas menunjukkan justru disitulah letak pluralitas dirinya yang tidak begitu saja menghadirkan diri sebagai totalitas. Kehadirannya adalah momen institusi sekaligus destitusi, karena ia selalu dihantui oleh instabilitas dirinya sendiri dan ketegangan antar keduanya inilah yang merangsang tindak decisionistik sehingga kontingensi dapat dimungkinkan.

Upaya mengkorupsi dimensi tak terbatas dari hospitalitas ini adalah sebuah tindak koruptif antara yang partikular di dalam dimensi kemewaktuannya dengan sifat tak terbatas dari hospitalitas. Pada poin inilah hospitalitas menunjukkan interupsinya, yakni sebagai batas dari ketidakcukupan sebuah tatanan moral yang derivatif dalam menyikapi yang lain, bahwa tatanan moralitas tersebut tidak pernah cukup dalam relasi antara aku dan yang lain. Hal ini misalnya terjadi di dalam pembentukan moralitas agama atau budaya, yang mana pada akhirnya bergantung pada suatu bentuk kekuasaan (*sovereignty*). Derrida berpendapat bahwa hal ini adalah sebuah bentuk 'kekerasan terhadap hospitalitas sebagaimana ditegaskan Derrida, "...hospitality, whether public or private, is dependent on and controlled by the law and the state of police." (Derrida, Jacques. 2005: 22). Pemberian bentuk terhadap tataran etis pada akhirnya memerlukan tindak eksklusif, sebagai jalan untuk memberikan bentuk terhadap dirinya, sekaligus menciptakan batas luar konstitutif bagi dirinya.

Sampai disini, jelas bahwa *hospitality*, sebagai tindak non-kondisional dalam penerimaan terhadap orang lain, menjadi suatu kemungkinan sekaligus imposibilitasnya. Dan segala bentuk perumusan tataran etis dalam sebuah tindak decisionis menjadikan hospitalitas sebagai sebuah kemungkinan dalam mengkondisikan yang tidak mungkin. Ketegangan tersebut menjadikan tindak

hospitalitas, yang telah diderivasikan, menjadi kehilangan makna orginalnya, sementara relasi terhadap yang lain, yang unik dan tak terbatas, selalu menuntut apa yang tidak mungkin tersebut. Dengan begitu, maka suatu pengambilan bentuk derivatif hospitalitas selalu mengalami ancaman karena luaran konstitutifnya, ia selalu dihantui dapat upayanya menuju yang tidak mungkin. Dalam upaya merumuskan ketidakmungkinan ini, momen etis hospitalitas merupakan sebuah situasi yang menyimbolkan sebuah bentuk kehilangan terhadap penerimaan total. Alih-alih sebuah rumusan yang padat, momen etis hospitalitas menunjukkan batas ketidakmungkinan akan suatu kecukupan dalam berelasi dengan yang lain pada sebuah regulasi moralitas. Hospitalitas justru menunjukkan segala regulasi moralitas tidak pernah cukup, ia hadir dalam bentuk negativitas terhadap regulasi tersebut yang kemudian merangsang sebuah transformasi melalui proses *decisionistic*. Pada kondisi tersebutlah kontingensi menjadi mungkin, dan suatu bentuk re-aktivasi terhadap hospitalitas dapat terjadi kapan saja. Saat itulah momen etis terjadi. Yaitu ketika sebuah tataran nilai dirasa tidak lagi mencukupi mengatasi relasi terhadap orang lain, dan kerinduan akan hospitalitas yang absolute, yang *unconditional*, merongrong tataran nilai yang dirasa tidak cukup tersebut. Westmoreland menuliskan, “*The law of hospitality opens up the possibility for contamination in that it calls for no governing body such as sovereign state or master of a home to establish laws and authority over another subject.*” (Westmoreland, Mark. 2008: 8) Momen etis hospitalitas pada akhirnya menginterupsi derivasinya sendiri yang kondisional, untuk menjemput originalitasnya yang tidak bergantung pada kondisi apapun, yang asing, sebagai imposibilitas.

Maka jelas disini, hospitalitas tidak dapat begitu saja direduksi menjadi sebuah tataran moralitas dan sistem nilai tertentu. Sebaliknya ia mendasari setiap pembentukan tersebut, sekaligus menghantui tataran nilai yang terbentuk, dan kemudian dimampakan oleh suatu kekuasaan, *sovereign*. Hospitalitas tidak pernah dapat direduksi karena merupakan basis moralitas individu yang primitive, yang *unconditional* dan *undecideable*. Hospitalitas hadir sebagai posibilitas dan sekaligus imposibilitas bagi sebuah keputusan pembentukan moralitas. Dengan demikian, maka setiap proses pembentukan sistem moralitas tertentu, yang selalu

menghasilkan luaran konstitutifnya, akan mungkin untuk selalu diinterupsi. Kehadiran hospitalitas dalam bentuk pengejawantahan diri kedalam tataran moral, sekaligus membawa potensi otonegativitas terhadap dirinya. Sehingga interupsi terhadap interupsi selalu dimungkinkan dan ini membuat hospitalitas selalu mengidap kontingensi. Hospitalitas adalah interupsi terhadap tataran moralitas tersebut, dan setiap momen inilah yang disebut sebagai momen etis.

Dengan pemahaman bahwa politik merupakan dimensi dimana koekstensi dikelola sedemikian rupa, tanpa melupakan dimensi antagonisme, sekaligus didasari oleh kebutuhan terhadap yang lain, sebagai bentuk koekstensi, maka politik tidak dapat dilepaskan begitu saja dari etika. Peran etika, dalam hal ini hospitalitas, di dalam kemunculan momen etis akan membawa segenap intervensi terhadap sedimentasi yang terjadi di dalam masyarakat. Sebuah pengingat akan ketidakcukupan hegemonik dan keberadaan dimensi antagonistik, yang selalu menghantui sekaligus penunjukan ketidakmungkinan totalitas identitas. Momen etis merupakan batas terluar dari politik, yang mana ia tidak dapat menjadi basis total dari sebuah tindak politik, tetapi merupakan sesuatu diluar politik, yang membawa simbol ketidakcukupan politik di dalam mengelola relasi koeksistensi. Pembahasan lebih lanjut akan penulis sampaikan pada bab selanjutnya.

## BAB 4

### MOMEN ETIS DALAM PROSES INSTITUSI/DESTITUSI

#### *THE SOCIAL*

Pada bab ini, pembahasan akan berfokus pada analisis terhadap momen etis di dalam proses institusi/destitusi *The Social*. Momen etis disini, dengan kata lain, bekerja secara ganda. Ia memungkinkan adanya sebuah dimensi *The Social* dimana kehidupan bermasyarakat dapat dimungkinkan. Lebih jauh lagi, ia bahkan turut menjadi suatu prasyarat di dalam proses pemaknaan terhadap *empty signifier* sehingga tidak hanya terjadi pembentukan dimensi *The Social*, tetapi sekaligus juga prosesnya di dalam memenuhi dirinya, dalam mempersiapkan sebuah penutupan terhadap dirinya, yaitu pembentukan *Society*. Hal ini merupakan kondisi yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanpanya, *The Social* tidak akan mendapatkan posibilitasnya dalam berproses, yaitu posibilitas dalam menggapai imposibilitasnya. Maka *Society* dalam pemikiran Laclau, sebagaimana ditegaskan Marchart, adalah *impossible* dan *necessary*. Ini dituliskan di dalam bukunya, “*Thus, we have to conclude that society is both impossible and necessary.*” (Marchart, Oliver. 2007: 137)

Selanjutnya, peran kedua momen etis akan kembali bekerja ketika paradoks internal di dalam sebuah sistem masyarakat atau dimensi *The Social*, semakin terakumulasi, dan hal ini menimbulkan berbagai elemen-elemen, yaitu yang berbagai perbedaan yang tidak diartikulasikan secara diskursif (Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001: 105), yang sebelumnya menghantui dimensi *The Social*, menjadi semakin mengintervensi dirinya. Pada poin inilah momen etis merupakan suatu momen mediasi bagi kehadiran elemen-elemen ini dalam mengintervensi *The Social*. Ia mengguncang formasi diskursus yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga mengangkat kembali apa yang tadinya telah tersedimentasi oleh proses pembentukan *Society* di dalam *The Social*, dan menunjukkan batas-batas terluar formasi diskursus tersebut sehingga mencegah proses pemenuhan dirinya. *Element* disini adalah apa-apa yang tidak dapat dapat



diserap begitu saja di dalam formasi diskursif *The Social*, sekaligus batas bagi *The Social* tersebut. Sebuah tindak intervensi terhadap formasi diskursif dan *The Social*, kemudian akan mencegah penutupan pemaknaan yang digambarkan oleh terbentuknya *Society*. Maka pada poin ini jelas bahwa *Society* tidak akan pernah terbentuk, karena penutupan terhadap dimensi sosial selalu menyisakan apa-apa yang dieklusikan, yang menjadi seluar konstitutif sekaligus batas bagi identitasnya. Segala macam eksese atau 'kelebihan' yang terjadi ini memungkinkan *The Social* memiliki potensi keterbukaan daripada suatu penutupan. *Society* tidak mungkin untuk terbentuk, tetapi ketidaktunggunannya itulah yang kemudian menciptakan berbagai kemungkinan bagi *The Social*, ketegangan diantara mereka adalah dimensi produktif di dalam politik. Dan di dalam pertengahan itulah momen etis dimungkinkan untuk hadir.

#### **4.1 Momen Etis Hospitalitas Sebagai Basis Pembentukan *The Social***

##### **4.1.1 Koeksistensi**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, subjek dalam menghadirkan eksistensinya di dalam realitas tidak dapat lagi terisolasi dari dunia diluarnya. Konsep subjek dalam pemikiran kontemporer dilihat bukan lagi sebagaimana pada konsep subjek pencerahan seperti pada pemikiran Cartesian. Ia bukanlah *subjectum*, sebagai subjek yang memiliki substansi, yang imanen di dalam dirinya, sehingga eksistensinya tidak bergantung pada apa yang terdapat diluarnya. Sebaliknya, subjek adalah *subjectus*, yaitu subjek yang terbentuk karena proses subjeksi. Artinya, individu membutuhkan sesuatu diluar dirinya sebagai agen yang mensubjeksikan dirinya, membentuk dirinya sebagai subjek. Ia membutuhkan yang lain, yang eksternal, guna membentuk dirinya, subjek tidak dapat lagi berdiri sendiri tanpa relasi terhadap eksternalitasnya (Robet, Robertus. 2010: 65). Mengenai proses subjeksi ini, para pemikir kontemporer menggunakan konsep-konsep yang berbeda, seperti Althusser dengan interpelasinya, atau Foucault melalui relasi kuasa. Laclau sendiri menganggap bahwa subjek merupakan hasil subjeksi dari proses artikulasi diskursif yang terjadi, sehingga kemudian ia selalu menjadi subjek yang berposisi (Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001: 115). Hal ini dituliskan Laclau dalam bukunya:

*“Whenever we use the category of ‘subject’ in this text, we will do so in the sense of ‘subject position within a discursive structure. Subjects cannot, therefore, be the origin of social relations – not even in the limited sense of being endowed with powers that render an experience possible – as all ‘experience’ depends on precise discursive conditions of possibility.”* (2001: 115)

Penjelasan lain tentang koeksistensi juga ditegaskan oleh Jacques Lacan melalui psikoanalisisnya, dimana subjek yang mengalami keterbelahan di dalam fase cermin kemudian selalu mengalami kondisi yang saling bersilangan antara koherensi egonya dan *the Other*, sesuatu yang berada diluar dirinya, yang tidak dapat terserap kedalam dirinya. Di dalam konsep koeksistensi secara umum jelas bahwa individu selalu membutuhkan orang lain dalam mengkonstitusi dirinya, baik sebagai sesuatu yang langsung melakukan proses subjektifikasi terhadap dirinya, maupun sebagai agen dari sistem yang melakukan subjektifikasi. Pada poin inilah koeksistensi menemukan titik produktifnya.

Selanjutnya, di dalam koeksistensi tersebut, kemunculan momen etis paling terlihat di dalam konsep etika Levinas. Levinas berpendapat bahwa manusia ada karena relasi tanggung jawab terhadap orang lain. Tanggung jawab terhadap orang lain inilah yang merupakan dimensi moralitas primordial manusia, ia mendahului segala jenis relasi lainnya, karena relasi tanggung jawab inilah yang bahkan mendahului eksistensi individu. Budiarto dalam *Demokrasi Disensus* menuliskan, *“... keterhubunganku dengan liyan, yang diistilahkan sebagai keterhubungan ‘wajah-ke-wajah’, memulia menjadi relasi etis primer karena terbebaskan dari keterkungkungan spontanitas egois dari yang ‘sama’.”* (Danujaya, Budiarto. 2012: 101). Dengan begitu, koeksistensi disini lebih ditekankan di dalam kerangka etisnya, sebuah bentuk tanggung jawab moral terhadap yang lain, yang kemudian mendorong diriku untuk bertindak terhadap dirinya, tanpa memperdulikan timbal balik yang akan terjadi. Kehadiran yang lain memberi batas bagi diriku karena ia hadir sebagai sesuatu yang benar-benar asing dan diluar diriku, ia tidak dapat terserap kedalam prinsip ‘kesamaan’ dalam diriku, maka relasi tanggung jawab selalu antara dua subjek yang berbeda, yang dengan demikian memberikan bentuk terhadap diri masing-masing. Disini jelas

bahwa keduanya selalu memiliki identitas yang unik dan tidak tergantikan, tidak dapat diserap kedalam prinsip 'kesamaan' sehingga hal itu memungkinkan dirinya untuk hadir melalui koeksistensi tersebut.

Dari penjelasan diatas, maka jelas bahwa suatu sistem hidup bersama didahului oleh konsep mengenai koeksistensi. Koeksistensi memungkinkan subjek hadir sebagai dirinya yang berbeda dari yang lain, sekaligus bergantung terhadap keberlainan sang lain tersebut. Eksistensi dirinya bukanlah lagi independen terhadap eksternalitas, melainkan identitas yang relatif, yang justru membutuhkan eksternalitas dalam mengkonstitusinya. Koeksistensi, dengan begitu, adalah syarat bagi terbentuknya kehidupan bermasyarakat.

#### **4.1.2 Formasi Diskursus dan Antagonisme**

Berangkat dari kondisi koeksistensi tersebut, maka sekarang kita dapat beralih pada dimensi antagonisme. Di dalam ketidakreduksian antar berbagai subjek kedalam sebuah prinsip kesamaan, membuat setiap subjek menjadi suatu unikum, sesuatu yang tunggal dan tidak tergantikan. Keberadaan unikum-unikum ini inilah yang mendasari kondisi pluralitas dan dimensi antagonisme. Pertama, keberadaan unikum dengan sendirinya menggambarkan sebuah bentuk pluralitas, kondisi dimana berbagai unikum mengambil tempat yang berbeda di dalam realitas. Kedua, kehadiran unikum-unikum ini di dalam koeksistensinya yang membuahkan kondisi pluralitas, tidak terlepas dari artikulasi diskursif. Formasi diskursif yang telah ada sebelumnya turut mengkonstitusi unikum-unikum ini justru menjadi sebuah unikum, yang tidak pernah total, sekaligus selalu asing di dalam relasinya dengan lain. Dengan kata lain, selalu tidak pernah dapat terjembatani secara utuh. Formasi diskursif, melakukan artikulasi terhadap subjek dalam pembentukan dirinya, ia menaruh identitas bagi sang subjek sekaligus batas terluar dari dirinya, yang bersifat konstitutif. Dititik ini saja, maka jelas di dalam formasi diskursif, telah terjadi suatu tindak eksklusi, demi mempertahankan kondisi koheren dari unikum tersebut sekaligus mengancam kestabilannya. Formasi diskursif yang memberikan identitas terhadap subjek menghasilkan *moment* di dalam prosesnya. Mengenai *moment* ini, Laclau menjelaskan, "*The differential positions, insofar as they appear articulated within a discourse, we will call*

*moments.*” (Laclau, Ernesto. 2001: 105). Dengan begitu, jelas bahwa formasi diskursif memberikan posisi yang berbeda terhadap berbagai identitas di dalam proses artikulasinya.

Sekalipun demikian, setiap proses artikulasi diskursif tidak pernah dapat menyerap penuh segala bentuk objek diskursus menjadi *moment*, dengan kata lain, proses artikulasi diskursif selalu menyisakan *element*, sebagai sesuatu yang berada diluar, yang belum terartikulasikan secara diskursif. Kondisi ini dimungkinkan karena proses artikulasi itu sendiri, yang mana dalam melakukan spesifikasi terhadap dirinya, di dalam membentuk sebuah identitas, maka ia selalu menyisakan apa-apa yang bukan dirinya, sebagai sebuah keberlebihan, yang justru bersifat konstitutif. Kehadiran luaran konstitutif inilah yang membuat setiap formasi diskursus tidak pernah total, sebaliknya, ia selalu terbuka terhadap intervensi. Keterbukaan formasi diskursif ini bukan karena ia dapat diintervensi oleh sesuatu yang lain yang berada diluar dirinya, yang objektif dan positif, dan menghasilkan tabrakan antar formasi diskursif. Tetapi sebaliknya, keterbukaan ini terjadi justru karena hal itu inheren di dalam formasi diskursif, karena ia selalu menghadirkan sesuatu yang asing, yang tidak dapat direduksi, yaitu *element* yang tidak dapat dimodifikasi menjadi *moment*, sehingga mencegah totalitas dirinya.

Kondisi dimana totalitas selalu mendapat halangan dari luaran konstitutif itulah basis dari antagonisme. Laclau dan Mouffe menuliskan di dalam *Hegemony and Socialist Strategy*, bahwa “*This ‘experience’ of the limit of all objectivity does have a form of precise discursive presence, and this is antagonism.*” (Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001: 122) Dengan begitu, kondisi dimana sebuah pembentukan objektivitas selalu mengalami kegagalan, adalah kondisi yang didasari oleh antagonisme. Antagonisme ini adalah relasi yang terjadi antara berbagai objek-objek diskursus, yang bertempat pada posisi yang berbeda-beda karena proses artikulasi diskursif tersebut, dan dengan begitu maka mereka tidak pernah dapat penuh dan terumuskan secara objektif. Perumusan tentang objektivitas mereka selalu mengalami kegagalan karena kehadiran yang lain, *the Other*, yang tidak terumuskan dan tidak dapat direduksi menjadi *moment*. Dengan begitu, relasi terhadap kehadiran yang lain inilah yang merupakan relasi

antagonis, sebuah relasi yang mencegah perumusan identitas secara penuh dan objektif. Seperti pada Laclau dan Mouffe, *“the presence of the ‘Other’ prevents me from being totally myself. The relation arises not from full totalities, but from the impossibility of their constitution.”* (2001: 125) Ini menunjukkan bahwa antagonisme adalah sebuah kehadiran akan batas dari segala kemungkinan dalam merumuskan totalitas, ia menunjukkan ketidakmungkinan tercapainya bentuk totalitas dengan menghadirkan yang lain yang berada diluar dirinya.

Sampai disini, jelas bahwa antagonisme bukanlah sebuah relasi oposisional, karena relasi oposisi hanya dapat terjadi pada sebuah kontradiksi antara dua objek yang mengandaikan posisi keterpenuhan identitas, dan hal ini akan memicu proses eliminasi dibanding eksklusi. Sementara karena berangkat dari eksklusi pada artikulasi diskursif, maka antagonisme adalah sebuah relasi antara identitas yang tidak dapat terumuskan secara positif dan objektif, melainkan selalu menghadirkan dirinya melalui tindak eksklusi apa-apa yang bukan dirinya. Dengan begitu, maka antagonisme menunjukkan bahwa sebuah identitas tidak dapat pernah penuh, ia merupakan identitas yang selalu mengalami kondisi keberkurangan, karena ia merupakan negasi dari positivitas, dan penegasian ini menciptakan luaran konstitutif yang memungkinkan instabilitas identitas. Di dalam kondisi yang seperti inilah, momen etis mengambil tempat dalam memberikan sebuah pijakan bagi proses penyatuan identitas-identitas yang unik dan dan tak terjembatani tersebut. Sekalipun demikian, pijakan ini bukanlah berupa dasar yang stabil dan absolute, sehingga dapat menyatukan unikum-unikum secara utuh, yang artinya mereduksi keunikannya kedalam prinsip kesamaan. Sebaliknya, pijakan yang terbentuk di dalam momen etis adalah sebuah pijakan yang tetap menghargai perbedaan antar berbagai identitas unikum ini, dan penyatuan ini, bukannya mereduksi perbedaan tersebut kedalam prinsip persamaan, justru mengikat perbedaan-perbedaan tersebut dalam sebuah ‘kebersamaan’, yang mana di dalamnya setiap identitas masih dapat mempertahankan unikumnya masing-masing. Mengenai peran momen etis ini akan dikhususkan pada prinsip etika hospitalitas Jacques Derrida.

### 4.1.3 Momen Etis Di Dalam Dimensi Antagonisme dan Pembentukan *The Social*

Dimensi antagonisme, seperti dijelaskan sebelumnya, sebagai sebuah kondisi pertegangan antara kawan/seteru, ketegangan antara dua identitas yang tidak pernah utuh, yang saling mencegah totalitas dirinya, selalu diwarnai oleh dimensi etis. Bagaimanakah peran dimensi etis di dalam relasi antagonistik? Pada poin inilah kita perlu merujuk pada suatu prinsip etis tertentu yaitu etika hospitalitas. Hospitalitas, sebagai sebuah etika yang merujuk pada penerimaan terhadap yang lain tanpa terikat kondisi apapun, dengan menghargai yang lain sebagai sesuatu yang benar-benar asing, alien, yang tidak dapat saya pahami apalagi saya reduksi kedalam prinsip kesamaan. Dengan begitu, hospitalitas adalah sebuah etika koeksistensial yang mana penghargaan terhadap yang lain sebagai suatu unikum dapat dimungkinkan. Di dalam relasi antagonisme, yang penuh dengan ketegangan antara berbagai unikum yang tidak terjembatani, dapat didamaikan dengan hospitalitas. Hospitalitas menerima berbagai perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam ketegangan tersebut sehingga, sebuah kondisi dimana pembagian kerangka simbolik yang sama dapat dimungkinkan.

Sebelumnya, kita perlu memberi penekanan pada istilah *momen etis*. Momen etis mengacu pada sebuah situasi tertentu, yang terikat oleh determinasi spasio-temporalnya, dan muncul hanya pada situasi yang spasio-temporal tersebut. Dengan demikian, ia tidak dapat terus menerus hadir di dalam masyarakat. Ia bukanlah Leviathan yang menjaga stabilitas order, sebagaimana aliran-aliran etika lainnya, sehingga kehadirannya menjadi sebuah bentuk fondasi yang mendasari segala bentuk putusan moral. Sebaliknya, momen etis membebaskan individu sebagai subjek moral dari segala bentuk tataran normatif tersebut, dari segenap regulasi nilai-nilai. Momen etis, dengan begitu adalah sebuah momen dimana individu kembali kepada kondisi koeksistensialnya, kondisi dimana ia dapat menerima yang lain sebagai yang lain, tanpa harus mereduksi kedalam prinsip kesamaan maupun tindak opresif. Kehadiran momen etis mendahului segala pembentukan tataran regulasi nilai-nilai, sebagai bentuk pengejawantahan dirinya. Karena itulah momen etis selalu bersifat temporal,

hanya muncul dalam situasi tertentu saja, karena ia merupakan imposibilitas sekaligus posibilitas dari segala bentuk prinsip-prinsip etika.

Kehadiran momen etis hospitalitas tidak dapat diasumsikan hadir terus-menerus di dalam kondisi antagonistik. Bila demikian, maka ia tidak lebih merupakan sebuah bentuk konsepsi akan sebuah regulasi yang telah terumuskan, suatu rumusan partikular yang sebelumnya telah mengkoruptisasi universalitas. Keberadaan momen etis hospitalitas sebagai penerimaan total tidak terbatas dan tak bekondisi merupakan sebuah penunjukan akan ketidakcukupan tataran moralitas tersebut, bahwa setiap bentuk tataran moralitas selalu tidak dapat tidak terbatas, bahwa harus mengkondisikan dirinya dalam mengatasi relasi antara aku dan yang lain. Justru karena kehadirannya yang menegaskan sebuah regulasi nilai inilah, maka momen etis hospitalitas hadir sebagai interupsi, sebagai batas terluar yang mengganggu regulasi moralitas, mengingatkan ketidakcukupannya, dan memungkinkan adanya transformasi dan kontingensi. Ia ‘mendamaikan’ kembali relasi antara aku dan yang lain, antara identitas yang satu dengan yang lain, dalam artian menjadi bentuk relasi baru antar mereka.

Upaya pendamaian dimensi antagonisme ini tidak dapat diartikan begitu saja sebagai sebuah upaya pendamaian yang benar-benar total, yang benar-benar terlepas dari kondisi yang penuh dengan pertegangan dan konflik. Sebaliknya, upaya pendamaian ini adalah sebuah pemagaran terhadap konflik dan ketegangan yang terjadi di dalam relasi antagonistik, yang mencegah pengkutuban antara dua identitas yang saling mencegah antara kepenuhannya, menjadi dua kutub yang benar-benar penuh. Jika ini sampai terjadi, maka relasi antagonistik berubah menjadi relasi kontradiktoris, dimana identitas yang satu harus berhadapan dengan identitas yang lain sebagai sesuatu yang objektif dan utuh. Disini dapat diilustrasikan sebuah contoh, misalnya pertentangan antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Formasi diskursif dalam mengkonstitusi pemeluk agama tersebut ternyata selalu menemui kegagalan, karena ia tidak pernah dapat mengkonstitusi ‘subjek beragama’ yang penuh dan total. Sebaliknya, ia menghasilkan berbagai kelebihan yang mana bukan merupakan kategori pembentukan ‘subjek beragama’. Dari kondisi yang tidak pernah penuh dan

objektif itu, maka antara pemeluk agama yang satu (Agama A) dengan pemeluk yang lain (Agama B), terdapat relasi antagonisme, relasi yang mencegah totalitas identitas yang penuh satu sama lain. Pada kondisi ini, yang lain (Agama A terhadap Agama B dan sebaliknya) merupakan sesuatu yang asing, yang berada diluar dan tidak dapat direduksi. Karena itulah, sebuah proses tanggung jawab dan penerimaan terhadap sesuatu yang benar-benar asing ini dan tidak terpahami serta tereduksi ini diperlukan. Penerimaan terhadap yang asing sebagai sesuatu yang benar-benar asing artinya menerima perbedaannya, dan tetap menaruh dirinya sebagai batas luar yang konstitutif bagi identitas tertentu. Ia dapat diterima sebagai yang asing, yang tetap berposisi sebagai batas terluar dari identitasku. Ia tetap mencegah totalitas dari pembentukan suatu identitas, yang artinya, hospitalitas disini menjaga ketegangan yang terjadi di dalam dimensi antagonisme. Tetapi, tanpa mencoba menutup identitas yang bersitegang tersebut, hospitalitas juga mencegah sebuah transformasi relasi antagonisme menjadi relasi oposisional, yang mana antara identitas yang satu benar-benar berposisi dengan identitas yang lain sebagai identitas penuh yang objektif. Dalam hal ini, relasi antara agama A dengan B yang sebelumnya telah terumuskan melalui regulasi tertentu, diinterupsi oleh hospitalitas. Hospitalitas menunjukkan ketidakcukupan relasi tersebut, membawa kembali daerah yang tidak terumuskan, yang tidak terbatas, sebagai basis intervensi terhadap regulasi nilai. Ia mencegah totalitas relasi antara A dengan B di dalam sebuah dimensi ketidakreduksian identitas A dan B, dimana A dan B merupakan identitas yang tidak pernah penuh dan tak dapat dirumuskan dalam sebuah totalitas, yang diperlihatkan di dalam relasi antagonistik.

Selain menjaga ketegangan dan transformasi dimensi antagonisme, hospitalitas juga menjadi media dalam ‘menjembatani’ berbagai identitas-identitas berbeda tersebut. Proses penjembatanan ini bukan dalam artian mereduksi berbagai unikum identitas kedalam suatu prinsip kesamaan, melainkan menyediakan landasan bagi para unikum-unikum identitas tersebut untuk hadir secara ‘bersama’. Artinya, mereka hadir tetap dalam keunikannya masing-masing. Hospitalitas sebagai momen etis mengingatkan sebuah dimensi realitas yang sama di dalam koeksistensi, tanpa mencoba menyeragamkan perbedaan yang berada di



dalamnya, karena ia bukanlah aturan yang terumuskan, melainkan batas dari aturan itu sendiri, sebuah penunjukan terhadap ketidacukupannya. Di dalam momen kehadiran bersama inilah, setiap identitas, di dalam berbagai macam perbedaannya, dimungkinkan untuk berbagai kerangka simbolik yang sama. Membangun sebuah *chain of equivalence* mendasari kehadiran *empty signifier*, dan memungkinkan tindak hegemoni. Kehadiran *empty signifier* ini merupakan kemunculan dari sebuah penanda yang tidak pernah total dan penuh, *empty signifier* merupakan batas dari segala proses pemaknaan yang selalu menyisakan kelebihan makna yang tak dapat diraih. Kehadirannya yang berada diluar merupakan sebuah penunjukan akan ketidakmungkinan totalitas proses pemaknaan, yang artinya ketidacukupan dalam mengisi *empty signifier* itu sendiri. Sampai disini maka dapat dipahami bahwa *empty signifier* bukanlah sebuah penanda yang benar-benar kosong, ia merupakan ketidakmungkinan kehadiran makna yang penuh di dalam suatu sistem penandaan. Karena itulah, *empty signifier* dapat juga dimaknai sebagai *signifier of the lack*, penanda yang maknanya tidak pernah hadir secara total.

Dengan begitu, maka momen etis hospitalitas, berada jauh mendahului segala tindak hegemoni yang menghasilkan berbagai formasi diskursif di dalam *The Social*. Ia berada diluar hukum, undang-undang, atau moralitas objektif lainnya yang terdefiniskan secara positif. Sebagaimana dituliskan oleh Westmoreland, "*This absolute hospitality rests outside of right, above that which is juridical.*" (Westmoreland, Mark. 2008: 3) Hospitalitas merupakan moralitas primer yang primordial itu sendiri, karena ia muncul ketika momen koeksistensi terjadi. Ia memberikan bentuk ketegangan artikulatif di dalam dimensi antagonisme, sampai akhirnya memungkinkan keterbentukan *chain of equivalence* dan proses hegemonik. Tanpa tendensi hierarkis dari etika hospitalitas, maka posisinya pada relasi antagonisme antara berbagai perbedaan posisi identitas memungkinkan mereka hadir dengan setara. Sekalipun setiap identitas yang berposisi memiliki tujuan dan kepentingan representasinya sendiri, tetapi karena dimensi antagonisme, yang mana mengandung dimensi etis hospitalitas, memungkinkan setiap perbedaan identitas tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai kepentingan representasinya. Hospitalitas mencegah sebuah

bentuk penyerapan identitas, sebaliknya justru ia memungkinkan setiap identitas melebarkan sayap representatifnya sehingga mampu menarik identitas-identitas yang lain. Fenomena ini oleh Laclau disebut sebagai *chain of equivalence*, dimana suatu identitas, dalam mencoba menghegemoni identitas lainnya, justru dengan upaya meng-universalkan apa yang ingin ia representasikan. Dengan begitu, apa yang direpresentasikan semakin menjauh dari bentuk awalnya, karena ia harus mengakomodir identitas-identitas lainnya. Semakin kaburnya bentuk representasi ini membuat sebuah representasi semakin ‘kosong’, dan memungkinkan untuk dioleh siapa saja. *Empty signifier*, muncul melalui *chain of equivalence*, yang dimungkinkan dengan keberadaan momen etis hospitalitas.

Proses pembentukan *The Social* secara runut tidak dapat terlepas dari dimensi etis. Pertama, berangkat dari kondisi koeksistensi dan antagonisme, subjek sosial adalah subjek selalu mencari pemenuhan identitasnya sekaligus tidak pernah penuh. Antagonisme mencegah totalitas identitas yang dirumuskan secara positif dengan menghadirkan apa yang berada diluarnya, yang tidak dapat diraih demi mencapai totalitas itu sendiri. Kondisi antagonistik ini ditopang lagi oleh dimensi koeksistensi yang merupakan sebuah relasi primer dalam kehidupan bermasyarakat, dimana setiap identitas yang tidak pernah penuh membutuhkan identitas lain sebagai basis konstitusi terhadap dirinya, demi menunjukkan kehadirannya sebagai *difference*. Selanjutnya, di dalam jurang ketidakcukupan totalitas ini, intervensi momen etis hospitalitas mengambil tempat. Relasi koeksistensial antar berbagai identitas ini yang berbasiskan pada regulasi nilai-nilai, selalu mengalami ketidakcukupan. Sebuah penerimaan total yang tidak berkondisi dan tak terbatas adalah batas terluar dari segala bentuk relasi yang didasari regulasi nilai-nilai tersebut. Momen etis hospitalitas menunjukkan kondisi ketidakcukupan tersebut, ia membuka daerah yang tidak dapat terumuskan sehingga justru merangsang proses perumusan itu sendiri. Interupsi hospitalitas disini adalah basis produktivitas dari tindak *decisionistic*.

Intervensi momen etis hospitalitas selanjutnya membawa kemungkinan akan sebuah kelahiran bentuk relasi baru terhadap yang lain. Di dalam perumusannya, ia tidak terlepas sama sekali dengan dimensi universal dan yang

tidak terbatas. Justru relasinya dengan yang universal inilah yang memungkinkan ketidakcukupan relasi sebelumnya dapat ditunjukkan. Hanya saja, dalam tindak perumusan setelahnya, dimensi yang universal dan tak terbatas haruslah mengejawantahkan diri kedalam dimensi yang partikular. Dimensi inilah yang mengkoruptisasi universalitas yang sejatinya tidak terbatas tersebut. Korupsi universalitas melalui yang partikular adalah proses transendensi partikularitas di dalam tindak hegemonik yang memungkinkan kehadiran *chain of equivalence* dan *empty signifier*, dimana yang terakhir ini dapat disebut juga sebagai *signifier of the lack*. Laclau menuliskan di dalam bukunya, “*This means that the universal is part of my identity as far as I am penetrated by constitutive lack, that is as far as my differential identity has failed in its process of constitution.*” (Laclau, Ernesto. 2007: 28) Bentuk universalitas yang demikianlah yang dapat disebut juga sebagai universalitas relatif, karena ia harus berelasi dengan partikularitas demi mengejawantahkan dirinya, yang membuat dimensi ketidakterbatasannya menjadi terbatas.

Lebih jauh lagi, di dalam tindak hegemonik, suatu proses transendensi partikularita identitas membuat dirinya mampu meng-ekuivalenkan diri dengan komunitas, yang artinya ia memperluas partikularitas dirinya sehingga *chain of equivalence* dan pemunculan *empty signifier as signifier of the lack* dapat dimungkinkan. Identitas yang melakukan tindak hegemoni ini berelasi dengan universalitas melalui interupsi hospitalitas, sehingga relasi antar berbagai sebelumnya menjadi goyah. Kegoyahan inilah yang memicu setiap identitas muncul bersama di dalam berbagai perbedaannya, dalam sebuah relasi yang setara antar mereka, dan proses pemaknaan terhadap *empty signifier* dapat dimungkinkan. *Empty signifier as signifier of the lack* dengan begitu adalah sebuah kehadiran yang menunjukkan ketidakmungkinan totalitas proses pemaknaan. Dengan kondisi keserbakekurangannya itu, maka setiap proses pemaknaan terhadap dirinya selalu menyisakan apa-apa yang tidak dapat dirumuskan. Sesuatu yang berada diluar ini kemudian menjadi sebuah kehadiran yang menghantui tindak pemaknaan melalui ketidakhadirannya. Hal ini misalnya dapat ditunjukkan pada kasus *state of nature* ala Hobbes, dimana pada tahap itu kondisi yang terjadi adalah sebuah kekacauan total. Kondisi yang penuh dengan

kekacauan ini selalu dihantui oleh *order*, ia yang tidak hadir di dalam kekacauan tersebut. Dalam kondisi inilah sebuah identitas yang menjalin relasinya dengan yang universal dapat memunculkan apa yang sebelumnya tidak dapat hadir tersebut. Identitas yang melakukan tindak hegemonic memunculkan *order* sebagai *empty signifier*, yang menunjukkan batas kemungkinan dari *chaos*. Selanjutnya kehadiran *order* sebagai sebuah penanda kosong ini tidak pernah benar-benar kosong, karena kehadirannya serta merta dikorupsi oleh partikularitas identitas-identitas di dalam proses pemaknaan.

Sampai disini, maka dapat dilihat bahwa momen etis merupakan dasar di dalam pembentukan *The Social*, yang bersemayam di dalam dimensi *The Political*. Dan pada momen etis itu, hospitalitas adalah sebuah konsep etika yang paling ideal dengan kondisi dalam dimensi *The Political*, karena ia tetap menjaga pertentangan pada relasi antagonisme sekaligus juga memungkinkan sebuah *chain of equivalence* terbentuk tanpa harus ada tindak eliminatif dari pertengahan yang bertransformasi menjadi relasi oposisional.

#### **4.2 Sedimentasi *The Social* Terhadap Dimensi Antagonisme dan Momen Etis**

Dengan berposisi sebagai sebuah bentuk yang menjaga kondisi perbedaan yang saling bersitegang tersebut, momen etis hospitalitas turut menempatkan dirinya menjadi basis pembentukan dimensi *The Social*. Momen etis terjadi di dalam dimensi antagonisme yang mana di dalamnya terjadi tindak pencegahan sebuah pemenuhan totalitas sebuah identitas. Pada situasi tersebut, momen etis bertindak lebih jauh lagi. Kehadiran dirinya di dalam dimensi antagonisme tidak hanya membuat pemenuhan sebuah identitas menjadi tidak dimungkinkan, tetapi bahkan setiap identitas yang tidak pernah utuh dan total tersebut harus menerima yang lain sebagai yang asing, yang berbeda, yang tidak dapat tereduksi kedalam prinsip kesamaan. Ia menerima yang asing dan alien tersebut sehingga ketegangan tersebut tidak hanya menjadi sebuah bentuk relasi oposisional, tetapi bahkan membuat suatu identitas menjadi bertanggung jawab terhadap yang lain. Momen etis mengingatkan diri pada sebuah moralitas primordial, yaitu kebertanggungjawaban terhadap yang lain. Titik berangkat ini yang kemudian menjadi acuan di dalam terbentuknya sebuah proses representasi antar berbagai

identitas di dalam tindak persaingan hegemonik dan perluasan makna representasi tersebut di dalam *chain of equivalence*. Maka dengan begitu, etika hospitalitas menemukan emergensinya di dalam momen etis ini, karena ia adalah sebuah prinsip yang dapat mengakomodir perjalanan dari terbentuknya dimensi *The Social*.

Selanjutnya, setelah dimensi *The Social* ini muncul, maka selanjutnya ia akan mencoba mengisi ‘petanda kosong’ yang muncul sebelumnya karena tindak hegemonik dan *chain of equivalence*. *The Social* adalah dimensi dimana segala bentuk upaya dalam melakukan proses fiksasi makna dilakukan. Artinya, ia berusaha memantapkan posisi berbagai penanda yang tadinya berstatus sebagai *floating signifier* dengan mengasosiasikannya dengan sebuah makna yang tetap dan mantap. Pemantapan di dalam proses pemaknaan ini membuat *The Social* semakin membentuk dirinya kedalam identitas yang jelas dan spesifik, sekaligus juga semakin instabil. Proses fiksasi makna tersebut dilakukan melalui artikulasi tindak diskursif yang telah dijelaskan sebelumnya, ia mengkonstruksi makna pada dimensi *The Social* dan membentuk sebuah formasi diskursus di dalam masyarakat.

Pembentukan formasi diskursus ini perlu di dalam kehidupan bermasyarakat, karena ialah yang mengkonstruksi segala bentuk realitas sosial di dalam masyarakat. Misalnya formasi diskursif membuat sebuah kategorisasi yang distingtif antara ‘waras’ dan ‘gila’, yang mana selanjutnya individu bergerak di dalam masyarakat tersebut dengan mengikuti pakem dari kedua kategori tersebut di dalam menjalankan kehidupannya. Seseorang yang sesuai dengan artikulasi diskursif makna ‘gila’ tentu tidak menjalankan kehidupan yang sama dengan orang yang ‘waras’. Orang gila ini harus mengikuti konstruksi artikulasi diskursif dari penanda ‘gila’, artinya ia harus ditangani oleh agen masyarakat yang mengurus kegilaan, yaitu rumah sakit jiwa. Ia juga mendapat tempat yang tidak setara dihadapan hukum, karena kondisi dirinya yang sangat tidak stabil, dan tentu saja ia menjadi harus terkucilkan dari masyarakat. Sampai disini makan dapat dilihat bahwa konstruksi *The Social* di dalam upaya fiksasi makna terjadi melalui

proses artikulasi diskursif, dan selanjutnya, artikulasi diskursif inilah yang menjadi basis ontologi di dalam masyarakat.

Dengan proses konstruksi makna yang dilakukan oleh praktik artikulasi diskursif di dalam masyarakat, maka ia mengasosiasikan sebuah penanda dengan petanda, sehingga menghasilkan suatu makna yang jelas. Tetapi selain itu, dengan adanya tindak pemaknaan tersebut, maka formasi diskursif sekaligus juga melakukan tindak eksklusi dalam memantapkan identitas dirinya. Bagaimanapun, hal ini tetap diperlukan dalam formasi diskursus, karena tindakan itulah yang menjaga koherensi dan kepastian makna dari sebuah penanda. Konstruksi makna melalui artikulasi diskursif memungkinkan sub-sistem lainnya di dalam tertib *The Social* untuk bekerja dan menjalankan suatu fungsi. Proses pemaknaan ini membuat berbagai sub-sistem tersebut menjadi memiliki pakem-pakem yang jelas di dalam proses pembangunan *The Social*. Misalnya, dimensi hukum menjadi sebuah sub-sistem yang memiliki objeknya sendiri, yaitu objek hukum, yang berbeda dari objek sub-sistem lainnya, seperti objek politik atau objek ekonomi. Artikulasi diskursif menaruh sebuah batu fondasi di dalam sistem kehidupan bermasyarakat pada dimensi *The Social*. Dengan begitu, ia berupaya menstabilisasi makna sehingga bertendensi untuk menutup dirinya kedalam sebuah bentuk totalitas.

Segala bentuk sistem kerja di dalam struktur *The Social* dengan praktik artikulasi diskursif yang mendahuluinya di dalam proses konstruksi makna dan fondasi ini membuat kehidupan bermasyarakat terus menerus mengalami repetisi. Repetisi inilah yang membuat fiksasi makna pada proses sebelumnya, yaitu tindak artikulasi diskursif, menjadi seakan-akan sebuah mitos yang absolute dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Repetisi ini membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan sistem pemaknaan yang telah ada, dengan berbagai asosiasi petanda dan penanda, karena hal inilah yang membuat kehidupan bermasyarakat berjalan mulus dan cukup stabil. Repetisi mengikis originalitas dari pemaknaan (Marchart, Oliver. 2007: 141), ia menenggelamkannya kedalam praktik-praktik material sehari-hari. Dengan demikian, makna repetisi, praktik material terhadap hasil pemaknaan tindak artikulasi diskursif, serta merta melakukan proses sedimentasi.

Sedimentasi ini membuat fondasi yang telah terkonstruksi sebelumnya menjadi tidak dipertanyakan. Ia menstabilkan makna hingga pada kondisi tertentu dan membuat pemaknaan tersebut menjadi mungkin untuk terealisasi atau mengejawantah di dalam kehidupan masyarakat. Marchart, dengan berlandaskan pada Husserl, menuliskan tentang sedimentasi ini sebagai berikut, “*Following Husserl, sedimentation is a name for the routinization and forgetting of origins – a process that tends to occur as soon as certain articulatory advance has led to a hegemonik success.*” (2007: 139) Sekalipun pada akhirnya, upaya sedimentasi tidak pernah bersifat total dalam menutup makna-makna yang terartikulasi tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa semenjak praktik artikulasi diskursif sekalipun, ia selalu membawa keberlebihan makna yang tidak dapat diserap sepenuhnya kedalam formasi diskursif. Dengan kata lain, proses asosiasi makna ini tidak pernah total dan selalu menghadirkan apa-apa yang bukan dirinya sebagai luaran konstitutif, yang selalu menghantui stabilitas makna tersebut. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

Proses artikulasi diskursif yang membuat sebuah makna terlepas dari originalitasnya, sekaligus syarat di dalam mengejawantahkan atau merealisasikan dirinya, membuat dimensi antagonisme dan momen etis semakin tersedimentasi. Antagonisme dan momen etis, yang merupakan basis atau origin dari konstruksi dimensi *The Social*, mau tidak mau harus tersedimentasi di dalam realitas makna-makna yang telah diartikulasikan kedalam formasi diskursif. Hal ini membuat *The Social* menjadi produktif, karena ia dengan begitu membentuk dirinya melalui ketegangan antara posibilitas dan imposibilitas yang dihasilkan oleh kedua dimensi tersebut, antagonisme dan momen etis. Antagonisme dan momen etis diredam melalui institusionalisasi sebagai subsistem dari *The Social*, yang merupakan salah satu upaya pengejawantahan ruang posibilitasnya. Misalnya, sebuah hospitalitas yang absolute di dalam *The Social* mengejawantahkan dirinya melalui pembuatan hukum dan undang-undang, yang didasari oleh konsepsi ‘k’eadilan. Sebuah perumusan ‘k’eadilan melalui hukum dan undang-undang membuat dimensi etis menemukan bentuk yang paling konkrit dari dirinya. Ia menjadi sebuah derivasi yang regulatif dalam mencampuri hal-hal yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Sekalipun demikian, hukum dan undang-undang

ini bukanlah representasi dari 'k'eadilan secara menyeluruh, 'K'eadilan dengan K besar, melainkan salah satu upaya pencarian jejak terhadapnya. Begitu pula dengan hospitalitas, sebuah bentuk penerimaan tanpa kondisi, yang mampu mengayomi segala bentuk perbedaan direduksi sekaligus dijawantahkan melalui derivasinya, yaitu sistem norma pada masyarakat. Sistem norma ini merupakan bentuk derivatif dari hospitalitas, karena sekalipun ia berupaya dalam menjaga koeksistensi individu dengan yang lain, tetapi ia harus terbentuk berdasarkan standar regulasi tertentu. Misalnya, tradisi adat kesukuan atau sopan santun dalam bertutur, adalah contoh dari hasil derivatif hospitalitas kedalam struktur moralitas yang membataskan diri pada sistem norma. Disini, hospitalitas, seperti juga antagonisme, merupakan suatu batas dari upaya konstruksi struktur moralitas di dalam masyarakat. Ia menaruh batas antara yang mungkin dan tidak mungkin, dan ketegangan diantara keduanya menghasilkan efek produktif di dalam membangun regulasi struktur moralitas tersebut melalui artikulasi diskursif. Hasil derivatif dari momen etis ini yang kemudian mengalami sedimentasi di dalam *The Social*, ia merealisasikan dirinya sekaligus membatasi dirinya, sehingga tidak pernah total dan tidak pernah stabil.

Proses pembentukan *The Social* dan upaya sedimentasi yang dilakukannya adalah suatu upaya bagi dirinya dalam membentuk *Society*, dimana ia adalah sebuah totalitas yang menutup segala bentuk kemungkinan pemaknaan. Sekalipun demikian, berbagai paradoks dan keberlebihan makna di dalamnya, yang muncul semenjak praktik artikulasi diskursif, membuat *Society* menjadi tidak pernah mungkin, hal ini disebutkan oleh Laclau sebagai *the impossibility of society*. Laclau dan Mouffe menuliskan, "*The limit of the social must be given within the social itself as something subverting it, destroying its ambition to constitute a full presence.*" (Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001: 127) *The Social* menjadi selalu terbuka dan berpotensi untuk terus diinterupsi. Dengan begitu, maka *Society* merupakan batas bagi *The Social*, ia merupakan imposibilitas sekaligus posibilitasnya dalam perjalanan historis *The Social*. Sebuah intervensi terhadap *The Social* dapat diungkapkan dengan menganalisa krisis-krisis di dalamnya yang mendasari proses reaktivasi momen etis dan dimensi *Political*, sehingga sebuah penutupan dan klaim totalitas tidak pernah tercapai.



### 4.3 Krisis Di Dalam *The Social*

Dimensi *The Social* yang selalu memiliki potensi keterbukaan pada akhirnya tidak pernah dapat mencapai sebuah bentuk totalitas yang menutup segala kemungkinan proses pemaknaan. Keterbukaan *The Social* disebabkan karena berbagai macam tindak diskursif di dalam dirinya, yang tidak pernah dapat mengartikulasikan berbagai identitas kedalam sebuah totalitas yang absolute, melainkan selalu menyisakan sesuatu diluarnya, sebagai batas bagi dirinya dalam membentuk identitas. Sesuatu yang berada diluar inilah yang kemudian selalu mengancam totalitas dari formasi diskursif, mengancam stabilitas makna yang telah dikonstruksi. Ia menyimpan dimensi antagonisme, yang menghantui stabilitas formasi diskursif. Segala bentuk potensi keterbukaan dari *The Social* akan penulis coba ungkapkan melalui krisis-krisis yang terjadi di dalamnya. Dengan mengacu pada term krisis, hal ini bukan berarti sebuah eksternalitas yang kemudian menyerang dimensi *The Social*, melainkan muncul karena potensi keterbukaan dari *The Social* itu sendiri. Krisis ini timbul karena proses yang terjadi di dalam konstruksi dimensi *The Social*, dan memang berada di dalamnya.

#### 4.3.1 Proses Pemaknaan Terhadap *Empty Signifier*

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa suatu identitas, di dalam merepresentasikan dirinya dalam sebuah tindak hegemoni, memerlukan suatu upaya universalisasi terhadap apa yang direpresentasikan. Tujuan dari universalisasi terhadap apa yang direpresentasikan adalah demi meningkatkan kapabilitasnya dalam merangkul identitas-identitas yang lain. Suatu identitas yang mencoba merepresentasikan kepentingannya sendiri, tanpa menyisakan celah bagi identitas lainnya, akan berujung pada penolakan dari identitas-identitas lain yang tidak memiliki kesempatan dalam melakukan hegemoni. Pada poin ini, relasi yang terjadi adalah relasi oposisional, karena pemaksaan representasi tunggal dalam proses hegemoni menunjukkan sebuah totalitas identitas yang tidak dapat dimodifikasi lagi. Tindakan seperti ini sangat rentan dengan kegagalan dalam menghegemoni, karena itulah sebuah bentuk representasi harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ia dapat mengakomodir kepentingan identitas lainnya, dengan cara memperluas atau menguniversalkan apa yang ingin

direpresentasikan. Contohnya, gerakan buruh yang mencoba melakukan tindak hegemoni dalam menentang eksploitasi kapitalisme. Kaum buruh melihat ketidakcukupan kapitalisme bahkan memandangnya sebagai ketidakadilan. Proses ini merupakan sebuah ekspansi *empty signifier* terhadap hasil proses pemaknaan sebelumnya, yang kemudian menginterupsi rumusan-rumusan sebelumnya sebagai sebuah ketidakadilan. Pada poin ini, kaum buruh mungkin untuk mengkuivalenkan diri dengan komunitas sosial, dengan menghadirkan kapitalisme sebagai ketidakadilan maka artinya kaum buruh berusaha menggigit dimensi universal keadilan sebagai kehadiran yang menunjukkan ketidakcukupan kapitalisme. Ini memicu proses pemaknaan terhadap *empty signifier* mengalami transformasi, bahkan tidak menutup kemungkinan kehadiran penanda baru sebagai *empty signifier*, penanda yang tidak pernah benar-benar kosong dan kehadirannya menunjukkan ketidakmungkinan totalitas. Dalam berposisi dengan sistem kapitalistik, kaum buruh ini ingin menghapus eksploitasi terhadap diri mereka yang mereka anggap merugikan, karena itulah kaum buruh mencoba menghadirkan sebuah sistem baru sosialisme, dimana di dalamnya terdapat objek representasi dari kaum buruh tersebut, yaitu penghapusan sistem kapitalisme dan penganjuran sosialisme, sebagai bentuk pengejawantahan universalitas yang telah dikorupsi oleh dimensi partikular. Dalam kasus ini, mereka membawa kepentingannya sebagai sesuatu yang direpresentasikan, tetapi mengklaim bahwa hal tersebut merupakan kepentingan semua orang dan mengangkat diri mereka sebagai agen historis yang membawa kepentingan universal .

Di dalam kasus tersebut, kaum buruh sebenarnya tidak melakukan tindak universalisasi terhadap representasi kepentingannya. Mereka menaruh kepentingan mereka dan mengklaim bahwa kepentingan yang mereka bawa tersebut bersifat universal. Pada kondisi saat ini, hal itu tidaklah lagi efektif dalam melakukan tindak hegemoni. Tindak hegemoni memerlukan sebuah modifikasi guna meluaskan representasi identitas tertentu sehingga mampu merangkul segenap identitas lainnya. Terkait dengan kasus sebelumnya, kaum buruh bisa saja merubah apa yang direpresentasikan kedalam term yang lebih universal, misalnya 'pembebasan'. Term 'pembebasan' ini lebih bersifat universal karena kemudian dapat ditempelkan kedalam identitas apapun, tidak hanya sebatas kaum buruh.

Pembebasan dapat dihubungkan dengan gerakan feminis, environmentalis, anarkis, gerakan mahasiswa, dan identitas-identitas lain yang memiliki korespondensi dengan term pembebasan. Dengan demikian, suatu upaya perangkulan terhadap identitas lain dapat lebih dimungkinkan. Kehadiran term ‘pembebasan’ sebagai penanda kosong membuat dirinya dapat dimaknai oleh berbagai identitas dengan tuntutan yang berbeda-beda. Penanda kosong yang selalu mungkin untuk diisi di dalam proses pemaknaan menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah mencapai totalitas, sekaligus juga tidak pernah benar-benar kosong. Kehadirannya adalah sebuah penunjukan akan ketidakmungkinan totalitas yang sekaligus juga selalu diisi yang partikular. Dengan membawa term yang berelasi dengan universalitas, tanpa adanya kooptasi yang total terhadap term tersebut oleh identitas tertentu, maka *chain of equivalence* dimungkinkan untuk hadir, di mana setiap identitas memiliki kesempatan yang sama dalam memaknai kehadiran penanda yang berkekurangan tersebut.

Dengan begitu, sekalipun berelasi terhadap dimensi universal bukan berarti mengakibatkan identitas yang berusaha melakukan hegemoni, memiliki fondasi yang stabil. Justru karena ia memperluas makna dari kepentingannya, maka apa yang direpresentasikan menjadi semakin kabur. Sebuah bentuk representasi dengan apa yang direpresentasikan semakin mengalami kelonggaran jalinan. Pada kasus diatas, term ‘pembebasan’ semakin jauh dari tujuan awal kaum buruh dalam melakukan tindak hegemoni. Sekalipun ia masih berkorelasi dengan tujuan representasi awalnya, tetapi ia tidak lagi memiliki posisi yang sama kuatnya. Hal ini disebabkan karena generalisasi yang dilakukannya, sehingga asosiasi makna harus bertautan di dalam rantai penanda-penanda secara lebih jauh lagi, dan hal ini semakin mendekati titik yang disebut Laclau sebagai ‘penanda kosong’ atau *empty signifier* (Laclau, Ernesto. 2007: 37). Penanda kosong ini disebutkan oleh Laclau di dalam *Emancipation(s)*, “*Again, we see here the possibility of an empty signifier announcing itself through this logic in which differences collapse into equivalential chains.*” (2007: 39) Artinya disini, selain ia semakin jauh dari apa yang direpresentasikan, dalam kasus diatas kaum buruh, penanda kosong ini juga memungkinkan identitas lainnya untuk masuk dan mengisi kekosongan tersebut. Terjadi sebuah jalinan antar berbagai identitas yang

berbagi kerangka representasi yang sama, dalam kasus diatas misalnya terhadap term ‘pembebasan’. Hal ini mengakibatkan setiap identitas terjalin di dalam rantai yang sama, yang disebut oleh Laclau sebagai *chain of equivalence*. Jalinan antar berbagai identitas mengakibatkan situasi kontestasi semakin ramai, karena setiap identitas mencoba mengisi kekosongan pada penanda kosong tersebut. Mereka semua berupaya melakukan tindak hegemonik di dalam jalinan yang setara.

Sebelumnya, perlu ditegaskan disini bahwa representasi yang dilakukan oleh berbagai identitas tersebut tentu saja tidak terlepas dari nilai. Segala bentuk representasi selalu mengandung muatan moralitas dalam proses pemaknaan. Hal ini terjadi karena tindak hegemoni adalah upaya pada ranah koeksistensial, yang mana ia harus membawa segenap moralitas tertentu guna membangun bentuk relasinya terhadap yang lain. Di dalam masalah koeksistensi ini, maka struktur nilai menjadi dimensi yang primer dalam sebuah tindak hegemonik. Pada contoh sebelumnya, yaitu pemunculan term ‘kebebasan’ sebagai bentuk representasi, adalah sebuah seruan etis. Seruan yang memanggil berbagai identitas-identitas lainnya dalam melakukan pemaknaan terhadap term tersebut dalam dimensi etis dengan membawa segenap struktur moralitas masing-masing identitas yang berkorelasi dengan term ‘pembebasan’.

Proses kontestasi dalam upaya hegemonik ini, mengakibatkan setiap tindak hegemonik, dalam upayanya memaknai penanda kosong, selalu dihantui oleh instabilitas. Justru karena penanda tersebut kosong, selain dapat merangkul berbagai identitas, maka ia juga selalu dapat diisi melalui proses artikulasi yang berbeda-beda. Dengan begitu, ia selalu mustahil untuk dapat diisi secara total, melalui proses pemaknaan yang menghasilkan asosiasi penanda-petanda yang tetap dan utuh. Penanda kosong ini selalu dapat diisi karena tindak pengisian terhadapnya artinya adalah mencanangkan batas terluar dirinya. Proses pemaknaan terhadapnya selalu menyisakan apa-apa yang tidak dapat diserap kedalam dirinya, dan ini menjadi batas bagi imposibilitasnya dalam mencapai totalitas. Laclau menuliskan, “*An empty signifier can, consequently, only emerge if there is a structural impossibility in signification as such, and only if this impossibility can signify itself as an interruption (subversion, distortion, etcetera)*”

*of the structure of the sign.*” (2007: 37) Dengan menyisakan apa yang tidak dapat dirangkulnya, maka proses pemaknaan tidak pernah absolute, ia selalu memiliki potensi untuk diintervensi dikarenakan imposibilitas pemaknaannya. Potensi bagi intervensi terhadap penanda kosong adalah sebuah krisis bagi *The Social*, karena artinya ia tidak pernah dapat membentuk dirinya pada sebuah penutupan proses pemaknaan.

#### 4.3.2 Tindak Eksklusi Pada Proses Artikulasi Diskursif

Krisis selanjutnya terdapat pada proses artikulasi diskursif. Artikulasi diskursif selalu membentuk perbedaan posisi yang oleh Laclau disebut sebagai *moment*. Misalnya saja, suatu tindak artikulasi diskursif membentuk sebuah formasi diskursif yang membuat distingsi antara ‘gila’ dan ‘waras’, ‘rasional’ dan ‘irasional’, termasuk juga ‘baik’ dan ‘buruk’. Distingsi antara berbagai perbedaan posisi itu menghasilkan berbagai tindakan yang berbeda-beda dalam menyikapi keduanya. Dalam kasus ‘gila’ dan ‘waras’, subjek yang dimasukkan dalam kategori ‘waras’ akan berelasi dengan term-term yang berbeda dengan subjek yang masuk pada kategori ‘gila’, dan hal ini yang menyebabkan perbedaan situasi pada keduanya. Subjek ‘waras’ akan didengarkan ketika ia melakukan ujaran, ia memiliki kesempatan dalam menaikan status sosialnya maupun karir, karena ia diterima di dalam sistem masyarakat berdasarkan kategori ‘waras’ yang ditempelkan pada identitasnya. Sebaliknya, subjek yang dikategorikan sebagai ‘gila’ harus dimasukkan kedalam *asylum* ataupun rumah sakit jiwa, atau panti sosial. Dan disana ia akan mendapat perlakuan yang benar-benar berbeda dari subjek yang waras, misalnya menjalani pengobatan, terapi, dan terikat oleh aturan-aturan khusus.

Perbedaan posisi sebagai hasil dari artikulasi diskursif ini juga mengandung muatan etis. Pertama, bahwa perbedaan posisi akan mengakibatkan sebetuk perlakuan yang berbeda pula, maka disini ada sejumlah kondisi dalam berelasi terhadap yang lain. Perbedaan perlakuan seperti pada contoh sebelumnya tentang pemisahan posisi antara ‘gila’ dan ‘waras’ dapat ditunjukkan dimensi etisnya. Pada kasus subjek yang masuk dalam kategori ‘waras’, ia memiliki potensi untuk meningkatkan status sosialnya. Kemungkinan untuk mendapat

sejumlah penghargaan dari masyarakat menjadi terbuka bagi dirinya karena ia diterima sebagai subjek yang berposisi sama dengan masyarakat pada umumnya. Sementara subjek yang masuk dalam kategori 'gila' tidak mendapat kesempatan tersebut. Sebaliknya, ia harus diobati, karena formasi diskursif telah mengkonstruksinya menjadi sesuatu yang menyimpang, dengan begitu ia dikategorikan belum siap untuk terjun kedalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan perlakuan diantara perbedaan posisi ini mengandung muatan hierarkis dan sebuah kondisi tertentu, yang tidak lepas dari hasil sedimentasi artikulasi diskursif, sehingga ia memunculkan urgensi dari dimensi etis dalam menyikapi struktur hierarkis tersebut. Urgensi dimensi etis hospitalitas, sebagai sebuah penerimaan total tanpa kondisi, menjadi batas imposibilitas sekaligus posibilitas dari perlakuan dan struktur hierarkis di dalam relasi terhadap yang lain, yang berasal dari konstruksi artikulasi diskursif tersebut.

Kedua, praktik artikulasi diskursif adalah sebuah upaya dalam melakukan fiksasi sekaligus dislokasi terhadap asosiasi makna. Artinya, artikulasi diskursif mampu membentuk identitas sebuah objek diskursif dengan cara mengejawantahkan dirinya melalui tindak eksklusi terhadap apa-apa yang bukan dirinya. Artinya disini, sebuah proses fiksasi sebuah makna tidak pernah total, karena ia membatasi diri pada spesifikasi tertentu, dan menyisakan apa-apa yang belum terartikulasi secara diskursif dalam merumuskan maknanya. Proses fiksasi/dislokasi muncul secara sekaligus, karena makna hanya mungkin untuk mengejawantahkan dirinya melalui spesifikasi tertentu, yang mana spesifikasi ini tidak dapat merepresentasikan totalitas dari makna yang dicoba direpresentasikan. Contohnya, dalam tema keadilan, maka keadilan selalu dapat dirumuskan melalui struktur derivasi tertentu dari dirinya, seperti hukum dan undang-undang, tetapi hukum dan undang-undang itu sendiri bukanlah Keadilan, dengan K besar. Selalu ada yang lewat untuk direpresentasikan, sehingga kemungkinan untuk merepresentasikannya secara utuh adalah sebuah kemustahilan. Tetapi upaya representasi dalam bentuk spesifik tersebut diperlukan karena hanya itulah cara bagi dirinya untuk mengejawantahkan diri. Disini, imposibilitasnya dalam merepresentasikan menjadi sekaligus posibilitas dirinya. Dalam kondisi yang demikian, maka praktik artikulasi diskursif tidak pernah dapat merepresentasikan

makna yang absolute dan total, ia selalu menghasilkan kelebihan yang menghantui stabilitasnya.

Sekalipun berangkat dari persoalan struktur bahasa, krisis kedua ini juga tidak terlepas dari dimensi etis. Berbagai regulasi moralitas menjejawantahkan dirinya melalui praktik artikulasi diskursif pada bahasa tersebut. Lebih gembalangnya, etika hospitalitas, sebagai upaya dalam menerima yang lain sebagai *the radical other*, selalu menjejawantahkan diri melalui susunan moralitas yang regulative sebagai derivasi upaya hospitalitas itu sendiri. Pembentukan struktur moralitas melalui artikulasi diskursif ini adalah upaya aktualisasi sekaligus alienasi bagi hospitalitas. Dengan demikian, ia hadir di dalam posibilitasnya, yang mana dengan kehadirannya itu menaruh kembali hospitalitas absolute sebagai batas terluarnya, yang mencegah totalitas dan sumber imposibilitas dirinya.

Berangkat dari krisis-krisis inilah, kemudian *The Social* menyambut intervensi terhadapnya. Intervensi ini berangkat dari reaktivasi momen etis hospitalitas dan dimensi antagonisme yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

#### **4.4 Reaktivasi Momen Etis dan Intervensi Terhadap *The Social***

Penjelasan dari krisis pada dimensi *The Social* kemudian menyimpulkan bahwa *The Social* selalu rentan terhadap potensi intervensi. Keterbukaan dan kontingensi dari dirinya menyebabkan sebuah tindakan intervensi dapat dimungkinkan. Selanjutnya, dengan menilik pada krisis *The Social* diatas, maka saat ketika intervensi dimungkinkan adalah ketika sebuah regulasi etis yang dibentuk oleh artikulasi diskursif dirasa tidak mencukupi lagi. Ketidacukupan ini tidak dapat dirumuskan secara objektif, karena perbedaan yang disebabkan oleh berbagai variasi artikulasi diskursif, tetapi hanya subjek-subjek berposisi di dalamnya lah yang dapat merasakan situasi ketidacukupan tersebut. Pada akhirnya situasi ini menimbulkan suatu guncangan di dalam diri *The Social*, yang memungkinkan bagi momen etis hospitalitas untuk melakukan reaktivasi, yang kemudian memunculkan kembali relasi antagonisme dalam dimensi *Political*.

Krisis pertama mengenai permasalahan penanda kosong menunjukkan situasi keterbukaan dimensi *The Social*, bahwa suatu tindak hegemoni yang menghegemoni dimensi tersebut selalu mengidap keterbukaan dan kontingensi. Selanjutnya mengenai reaktivasi, dikhususkan pada krisis selanjutnya, yaitu pada permasalahan artikulasi diskursif.

#### **4.4.1 Reaktivasi Momen Etis Pada Hierarki Di dalam Formasi Diskursif**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, artikulasi diskursif akan menghasilkan suatu bentuk formasi diskursif, dimana di dalamnya terdapat penerapan berbagai *element* sehingga mampu menghasilkan perbedaan posisi. Perbedaan posisi ini, dalam melakukan kategorisasi dan distingsi terhadap *moment* artikulatif ternyata menghasilkan struktur yang hierarkis. Perbedaan posisi akan mempengaruhi perbedaan tindakan dan perlakuan, dan disini kesetaraan antara subjek-subjek yang berposisi tersebut menjadi dipertanyakan. Perbedaan perlakuan tersebut menyebabkan sebuah situasi dimana suatu kondisi diperlukan di dalam relasi terhadap yang lain. Kondisi ini diperlukan sekaligus tidak cukup, ia diperlukan karena hanya dengan cara itulah sebuah regulasi moral dapat dirumuskan, sekaligus tidak cukup, karena bentuk regulasi tersebut tidak dapat merepresentasikan bentuk penerimaan yang lain secara total. Ketika ketimpangan di dalam kondisi ini, yaitu situasi hierarkis yang semakin jauh dari titik equilibrium dan menghasilkan banyak opresi, maka berbagai elemen yang sebelumnya belum dirumuskan oleh artikulasi diskursif melakukan intervensi terhadap formasi diskursif.

Penerimaan penuh terhadap yang lain muncul sebagai sesuatu yang berada diluar, yang tidak dapat diserap secara utuh, untuk kembali menginterupsi regulasi moral yang menghasilkan kondisi hierarkis dan opresif ini. Sebuah bentuk penerimaan terhadap yang lain secara total kembali hadir dan meminta untuk diartikulasikan secara ulang. Momen etis hospitalitas adalah sebuah tindak interupsi terhadap relasi sebelumnya antar subjek sosial. Kehadirannya menunjukkan dari batas kemungkinan relasi tersebut dengan berbagai ketidacukupannya. Karena relasi yang sebelumnya tidak pernah cukup,



hospitalitas menginterupsi relasi tersebut dengan menautkan diri pada wilayah tak penerimaan yang tidak terbatas, dan pertautan ini memicu kembali konstitusi relasi antara aku dengan yang lain di dalam bentuk yang baru, yang juga langsung mengejawantahkan diri melalui regulasi moralitas dalam dimensi partikular. Pemunculan kembali momen etis hospitalitas absolut ini adalah sebuah imposibilitas bagi regulasi moral yang telah diartikulasikan sebelumnya guna mencari posibilitas baru. Pencarian posibilitas baru yang berasal dari imposibilitasnya inilah yang kemudian memunculkan relasi antagonisme. Dengan demikian, reaktivasi momen etis hospitalitas selalu memunculkan dimensi antagonisme yang merongrong formasi diskursif sebelumnya.

#### **4.4.2 Reaktivasi Momen Etis Hospitalitas dan Koeksistensi**

Proses reaktivasi momen etis ini selalu mengacu kembali pada permasalahan koeksistensi, dimana individu bergantung pada eksternalitas dirinya dalam mengkonstruksi dirinya menjadi subjek. Kondisi koeksistensial itulah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, yang mendasari pembentukan hidup bermasyarakat. Karena itulah, setiap reaktivasi momen etis, selalu mendasarkan kembali terhadap kondisi koeksistensial tersebut, terhadap relasinya dengan yang lain. Hospitalitas menawarkan bentuk paling radikal di dalam penerimaan terhadap yang lain, karena penerimaan yang ditawarkan oleh hospitalitas bersifat absolute, tanpa struktur yang hierarkis maupun opresif. Hospitalitas memungkinkan kondisi koeksistensial yang paling ekstrem, yang penuh dengan berbagai pluralitas di dalamnya, dengan menunjukkan batas-batas kemungkinan sebuah relasi yang berbasiskan regulasi nilai-nilai normatif. Reaktivasi momen etis hospitalitas yang mengembalikan kondisi koeksistensial ini, dengan menunjukkan ketidakcukupan pada relasi sebelumnya, sehingga kemudian ia merupakan imposibilitas sekaligus posibilitas dalam merumuskan regulasi nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Ia adalah etika sekaligus kemungkinan bagi prinsip-prinsip moral yang merupakan derivasi dirinya. Karena itu ia dapat menghasilkan kemungkinan produktif yang tak terbatas dari pertegangan antara imposibilitas dan posibilitasnya. Interupsi hospitalitas di dalam merumuskan

relasi antar subjek ini kemudian semakin merangsang tindak *decisionistic* di dalam merumuskan wilayah yang tidak terumuskan.

Reaktivasi momen etis ini mengintervensi regulasi moral pada *The Social* dan mengembalikan pembentukannya di dalam dimensi antagonisme. Dengan begitu ia melakukan intervensi terhadap *The Social* sehingga pencapaiannya menuju totalitas dimana penutupan terhadap segala tindak pemaknaan menjadi tidak mungkin. Reaktivasi momen etis membawa kekacauan pada sistem subordinasi di dalam *The Social*, ia juga mengguncang fondasi yang membangunnya. Segala bentuk kekacauan yang dihasilkan oleh reaktivasi momen etis hospitalitas sebagai imposibilitas di dalam mengatasi dimensi koeksistensi kemudian memunculkan kembali relasi antagonisme, dimensi *The Political*, dalam mengintervensi *The Social*. Kehadiran *The Political* adalah batas imposibilitas bagi *The Social* sekaligus posibilitasnya. Munculnya kembali *The Political* yang didasari oleh reaktivasi momen etis, membuat konstruksi pada dimensi *The Social* menjadi runtuh. Relasi dirinya dengan universalitas membuat apa yang sebelumnya terisi melalui proses pemaknaan terhadap *empty signifier* dirasa tidak mencukupi lagi. Poin ini menunjukkan proses intervensi terhadapnya yang menyebabkan destitusi bagi *The Social*. Destitusi ini mengharuskan *The Social* untuk kembali mengkonstruksi dirinya, untuk mentransformasikan segala hasil konstruksinya kembali, yang telah didekonstruksi oleh dimensi *The Political*. *Empty signifier* sebagai penanda yang tidak pernah penuh ini kemudian dimungkinkan untuk hadir kembali demi menunjukkan kegagalan totalitas proses pemaknaan, sekaligus menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengisi dirinya.

Pada momen kehadirannya, momen etis menginterupsi segala bentuk tataran moralitas lama yang dibentuk di dalam *The Social*, dengan menunjukkan ketidakcukupan dari tataran nilai moral tersebut dan kembali membuka wilayah toleransi seluas-luasnya. Hal ini adalah upaya di dalam proses “memaafkan yang tidak termaafkan” (*forgive the unforgiveable*), yang mana hal ini memicu penerimaan terhadap yang lain dalam bentuknya yang paling radikal. Ketegangan antar keduanya inilah yang merangsang proses konstitusi moralitas dalam

mengelola sistem kehidupan bersama, karena ia kembali mengangkat identitas-identitas yang tadinya asing dan tidak pernah didengarkan. Hospitalitas berada melampaui segala bentuk tataran hukum dan nilai-nilai moral, ia tidak sekedar regulasi normatif, melainkan justru merupakan batas dari regulasi-regulasi tersebut. Kehadirannya yang memungkinkan sebuah keterbukaan terhadap yang lain ini, kondisi yang melampaui penerimaan melalui mediasi regulasi nilai-nilai, memungkinkan kehadiran hospitalitas menjadi interupsi bagi *The Social*, yang mana didalam mengelola segala bentuk regulasi kondisi dalam relasi antara subjek dengan yang lain selalu dihantui oleh yang lain itu sebagai batas terluar dirinya. Sebuah luaran yang menciptakan ketegangan dan memungkinkan intervensi dalam proses konstitusi regulasi-regulasi tersebut. Derrida menyebutkan pada *On Forgiveness*:

*“In order to inflect politics, or what you just called the ‘pragmatic processes’, in order to change the law (which, thus, finds itself between the two poles, the ‘ideal’ and the ‘empirical’ – and what is more important to me here is, between these two, this universalizing mediation, this history of the law, the possibility of this progress of the law), it is necessary to refer to a ‘“hyperbolic” ethical vision of forgiveness’.”* (Derrida, Jacques. 2005:66)

Dengan demikian, maka reaktivasi momen etis hospitalitas sejalan dengan proses institusi/destitusi bagi *The Social*, ia memberi batas imposibilitas di dalam relasinya terhadap yang lain pada dimensi koeksistensial yang membawahi segala bentuk kehidupan bermasyarakat sekaligus posibilitasnya. Selanjutnya, ketegangan antara batas posibilitas dan imposibilitas ini memicu dimensi antagonisme, sehingga proses institusi/destitusi dapat dimungkinkan.

#### **4.4.3 Subjek Emansipatoris dalam Menyambut Momen Etis**

Pada bukunya *Emancipation(s)*, Laclau menyebutkan bahwa setiap tindak hegemonik selalu berelasi dengan universalitas. Artinya, disini ia mencoba mengatakan bahwa tindak hegemonik tidak dapat sepenuhnya membawa sebuah bentuk partikularitas berdasarkan identitas tertentu, di dalam mengisi kekosongan kuasa pada penanda kosong. Keberadaan penanda kosong memungkinkan dirinya untuk dimaknai secara berbeda oleh berbagai macam identitas, tetapi dengan begitu, berbagai identitas akan akan berusaha mengisi kekosongan tersebut

melalui konstestasi berdasarkan identitasnya sebagai sesuatu yang penuh. Pada kasus ini, sebuah tindak hegemonik tidak dapat terjadi, justru hanya dapat menimbulkan semacam kondisi *chaos* di dalam pemenuhan penanda kosong tersebut. Suatu tindak hegemonik hanya dapat dimungkinkan bila pertama, subjek yang mencoba melakukannya berelasi dengan yang universal, sehingga mampu merangkul berbagai identitas lainnya yang memiliki pandangan lain. Kedua, terbukanya dimensi universalitas ini memungkinkan berbagai identitas untuk saling membaurkan diri dan membentuk kemungkinan bagi identitas baru, yang Laclau sebut sebagai *hybridization* (Laclau, Ernesto. 2007: 65). Proses ini penting karena ia hanya dimungkinkan dengan keterbukaan identitas, artinya identitas sebagai sesuatu yang tidak pernah utuh dan total, yang mana hal ini memungkinkan adanya tindak hegemoni dan kontingensi.

Dalam proses hegemoni yang penuh dengan kontestasi ini, maka diperlukan subjek radikal dalam melakukan proses hegemoni sehingga tindak emansipatorik dapat tercapai. Subjek radikal diperlukan karena kehadirannya memungkinkan proses mengisi kekuasaan ini menjadi suatu tindakan yang dapat membuahkan perubahan dalam membangun masyarakat demokratis. Tindak emansipatorik yang dibawa oleh subjek radikal membuat sebuah intervensi dan transformasi *The Social* tidak sekedar merupakan sebuah perubahan struktur masyarakat. Karena dengan begitu, dengan memungkinkan segala bentuk struktur sebagai hasil dari transformasi, bahkan Hitler sendiri dengan Nazismenya adalah sebuah hasil transformasi sosial. Laclau menuliskan dalam *Emancipation(s)*:

*“...because the place of power is empty and we can conceive the democratic process as a partial articulation of the empty universality of the community and the particularism of the transient political forces incarnating it. This is true, but precisely because the universal place is empty, it can be occupied by any force, not necessarily democratic.”* (2007: 65)

Perubahan kearah totalitarianisme, yang menghasilkan penutupan segala proses pemaknaan pemaknaan bukanlah sebuah kondisi yang ideal di dalam kerangka politik *post-foundational*, karena penutupan ini mengandaikan totalitas yang pada akhirnya mematikan kontingensi dan keterbukaan. Karena itulah, subjek radikal adalah subjek yang mampu menghadirkan emansipasi sebagai

tindak hegemonik yang mengandaikan instabilitas dari dimensi sosial dan ketidakmungkinannya dalam mencapai sebuah totalitas tunggal. Tindak emansipatoris adalah upaya utopia di dalam kerangka demokrasi yang menghargai pluralitas.

Selanjutnya, di dalam merumuskan subjek radikal tersebut, kita tidak dapat melepaskannya begitu saja dari kehadiran momen etis. Momen etis sebagai basis bagi reaktivasi dimensi antagonisme, sebelum akhirnya menciptakan *chain of equivalence* yang memungkinkan tindak hegemonik, adalah wilayah dimana subjek dapat dikatakan sebagai subjek radikal. Pada poin ini, subjek perlu mempersiapkan diri dalam menyambut kehadiran momen etis tersebut. Penerimaannya terhadap momen etis artinya ia kembali pada kondisi hospitalitas, dimana disana terdapat nuansa koeksistensial yang primer dalam kehidupan bermasyarakat. Subjek radikal mampu mengembalikan situasi tersebut, sebuah kondisi dimana penerimaan absolut terhadap yang lain tanpa terikat oleh kondisi apapun, seperti ras, gender, kelas, ataupun kepercayaan. Penerimaan total ini memungkinkan yang lain, yang tadinya tidak dapat bersuara, menjadi bersuara. Dan yang tidak didengar menjadi memiliki kesempatan untuk didengar. Di dalam situasi penerimaan total itulah subjek radikal perlu guna mengembalikan kesempatan terhadap yang tadinya terkucilkan. Yang lain menjadi mungkin untuk kembali masuk kedalam *chain of equivalence*, dan di dalam pertautan antar berbagai perbedaan tuntutan identitas inilah subjek radikal menjalin relasi dengan yang universal.

Dengan kehadiran hospitalitas yang niscaya ini, karena berangkat dari kondisi koeksistensial dan krisis di dalam *The Social*, haruslah disikapi dengan merelasikan identitas dengan universalitas. Relasi antara identitas yang partikular dengan dimensi universal bukannya justru menutup sebuah identitas sebagai suatu totalitas ala Marxian, dimana kaum proletar hadir sebagai agen historis, melainkan sebuah bentuk radikalitas dari identitas yang partikular tersebut sehingga memungkinkan perangkulan identitas lain dalam sebuah *chain of equivalence* dapat dimungkinkan. Penerimaan terhadap hospitalitas artinya menunjukkan ketidakcukupan regulasi sebelumnya dan sistem subordinasi yang ditetapkan oleh

*The Social*, sehingga finalitas proses pemaknaan atau *Society* tidak pernah dimungkinkan. Ketidacukupan inilah yang kemudian membawa subjek radikal kembali berelasi terhadap universalitas, demi ‘menyegarkan’ kembali *chain of equivalence* dan melakukan deklasifikasi terhadap hasil subordinasi *The Social* sebelumnya, dengan membuka kembali dimensi penerimaan terhadap yang lain sekaligus yang tidak didengarkan untuk kembali bersuara dan dimungkinkan untuk didengar.

Dapat dicontohkan misalnya pada reformasi 1998. Rezim orde baru sebagai rezim yang sedang mengisi kekuasaan mencoba merumuskan sebuah masyarakat yang penuh dan total sehingga tidak memungkinkan lagi adanya proses pemaknaan. Disini, formasi diskursif telah terbentuk dengan ketat, dan menghasilkan berbagai identitas yang tereklusi, yang terasing dan tidak memiliki kesempatan untuk didengarkan karena ia merupakan eksekusi dari artikulasi diskursif sebelumnya. Contohnya pada ilustrasi ini misalkan kaum feminis dan sekular merupakan dua identitas yang tereklusi dan terasing sehingga tidak memiliki kesempatan bersuara dan didengarkan. Pada kondisi inilah subjek radikal dimungkinkan hadir, dengan menyambut kedatangan momen etis hospitalitas, ketika ia menyadari situasi koeksistensial yang paling primitif, suatu kebutuhan terhadap yang lain. Subjek radikal mencoba mengembalikan situasi tersebut dengan penerimaan total terhadap yang tadinya terpinggirkan, dalam kasus ini kaum feminis dan sekular. Proses penerimaan total ini memungkinkan tuntutan dari identitas yang terpinggir tersebut memiliki kesempatan untuk didengarkan, dan dengan begitu ia memiliki tempat di dalam *chain of equivalence*. Dengan begitu, dimensi universal yang ditawarkan subjek radikal semakin meluas karena penerimaan terhadap yang lain, yang membuat jangkauan hegemoniknya melebar dalam memenuhi tuntutan berbagai identitas-identitas yang antagonis.

Relasi terhadap yang universal, yang didahului dengan penyambutan terhadap momen etis adalah kondisi yang membedakan antara subjek yang sekedar melakukan perubahan dengan subjek radikal. Kedua hal tersebut mempengaruhi tindak hegemonik yang dilakukannya, dan subjek radikal memiliki kapabilitas dalam melakukan tindak hegemonik menjadi sebuah upaya mengisi

kekuasaan yang kosong dalam kerangka demokrasi plural. Sekalipun sebuah tindak intervensi selalu didahului dengan kehadiran momen etis dan dilanjutkan dengan menyikapi kehadirannya tersebut sebagai rangsangan terhadap proses decisionistik dan ketegangan yang memungkinkan destitusi/institusi, pembentukan regulasi dan subordinasi baru yang berdasarkan kehadiran momen etis itu tidak pernah final. Momen etis hospitalitas selalu mengidap kemungkinan untuk melakukan otonegativitas, sebuah penyangkalan terhadap dirinya sendiri, yang kembali merumuskan dirinya sebagai sesuatu yang tidak cukup. Interupsi terhadap hasil interupsi sebelumnya ini justru membuat politik semakin padat dengan ajang kontestasi, menjaga tempat kosong bagi kekuasaan untuk tetap kosong, dan membuat politik semakin kreatif didalam menentukan kembali pembentukan *The Social*, tanpa harus mencapai totalitas final. Sebuah kondisi masyarakat yang tidak berhenti pada suatu bentuk kepenuhan proses pemaknaan tetapi sebaliknya, masyarakat yang selalu mengandung keterbukaan dan potensi untuk diinterupsi sehingga ia selalu bersifat kontingen.

## BAB 5

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada pemaparan sebelumnya, penulis telah menunjukkan bahwa politik, sebagai upaya koeksistensial demi menjaga kehidupan bersama, tidak dapat dimaknai sebagai aktivitas yang mengandaikan sebuah kondisi totalitas atau penuh. Politik berangkat dari kondisi ketegangan antar berbagai elemen-elemen yang selalu mengandung keberkekurangan atau *lackness*. Kondisi menyebabkan politik tidak pernah bisa menutup masyarakat sebagai sebuah kondisi final perjalanan sejarah. Masyarakat, sebagai sebuah bentuk struktur dalam kehidupan bersama, selalu juga merupakan sebuah kegagalan dalam membentuk struktur bersama. Tetapi karena itulah, ia selalu memiliki potensi untuk terus meregulasi dirinya sehingga transformasi dan kontingensi dapat dimungkinkan.

Kondisi kontingensi ini, yang disebabkan karena kegagalan dimensi sosial masyarakat di dalam mengkonstitusi struktur dirinya, tentu tidak terlepas dari individu dan identitas yang mengisi dimensi tersebut. Individu sejak awal telah mengalami kondisi keberkekurangan ini, sehingga ia tidak pernah mencapai sebuah keutuhan identitas yang mampu merepresentasikan dirinya secara utuh. Sebaliknya, setiap identitas adalah upaya representasi sekaligus kegagalan baginya. Hal ini sama seperti yang terjadi di dalam kegagalan struktur masyarakat, kegagalan individu di dalam merepresentasikan dirinya melalui sebuah identitas tunggal yang penuh pada akhirnya memungkinkan individu menjadi subjek. Kegagalan dirinya adalah bentuk otonomi relatif bagi dirinya, subjek tidak pernah utuh karena ia selalu memunculkan yang lain bagi dirinya. Yang lain inilah yang memungkinkan dirinya untuk menjadi subjek, katakanlah untuk mengaktualisasi dirinya sebagai subjek, sekaligus membuat dirinya tidak pernah utuh. Karena kehadiran yang lain menunjukkan keberadaan subjek lain yang bukan diriku. Kegagalan subjek di dalam upaya pemenuhan dirinya menyebabkan identitas yang berusaha merepresentasikan dirinya menjadi selalu instabil. Subjek adalah



subjek yang instabil. Dan instabilitas identitas dari subjek-subjek yang gagal merepresentasikan dirinya inilah yang merupakan basis dari pembentukan dimensi sosial, sehingga menyebabkan dimensi sosial selalu dihantui oleh instabilitas yang dikandung oleh dirinya.

Seperti disebutkan sebelumnya, politik adalah upaya koeksistensial. Kebutuhan terhadap yang lain yang menyebabkan terbentuknya politik, karena ia merupakan upaya dalam menjaga koeksistensi individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, kehadiran yang lain merupakan elemen paling utama di dalam politik.

Sekalipun ia merupakan sebuah upaya dalam pengelolaan koeksistensi, politik tidak dapat begitu saja direduksi kedalam sebuah basis ontologi tunggal, seperti Kant dengan ekonominya atau prinsip etika tertentu seperti utilitarian. Politik merupakan dimensi yang otonom, yang tidak dapat direduksi begitu saja karena disebabkan oleh instabilitas dirinya. Segala upaya pereduksian politik kedalam sebuah prinsip yang total dan tunggal hanya akan membuat dirinya tidak lebih dari pada derivasi prinsip-prinsip tersebut. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh Marx dimana politik berada di dalam wilayah supra-struktur yang mana merupakan perpanjangan tangan basis-struktur demi menjaga kondisi produksi dan relasi produksi. Begitu pula pada kasus pemerintahan teokrasi, dimana Agama merupakan representasi kehadiran Tuhan, sehingga kekuasaan tidak pernah kosong dan kontestasi tidak dapat dimungkinkan. Segala macam reduksi politik kedalam prinsip tertentu membuat politik kehilangan kontingensinya, ia menjadi kering dan tidak produktif. Upaya reduksi ini selalu bersamaan dengan pengandaian totalitas yang pada akhirnya mengancam kondisi koeksistensi itu sendiri. Totalitas pemaknaan di dalam konstruksi masyarakat menyebabkan yang lain tidak memiliki kesempatan untuk dihargai, dan ini terjadi di dalam sejarah misalnya yang paling fenomenal adalah pembantaian Yahudi oleh Nazisme Jerman.

Karena penutupan pada politik pada akhirnya hanya akan mengancam kondisi koeksistensi manusia, maka politik tidak dapat benar-benar berdiri sendiri. Sampai disini, konsep otonomi relatif menjadi penting. Otonomi relatif pada

politik tidak menghilangkan otonomi dan autentisitasnya, sebaliknya justru membuat politik semakin produktif dan terbuka dalam proses kontingensi. Otonomi relatif pada politik ini membuat dirinya tidak tertutup dan terisolasi, tetapi selalu memiliki dimensi lain diluar dirinya yang merupakan luaran konstitutif, dimensi yang merupakan batas terluar bagi politik. Ia membuat otonomi politik menjadi mungkin, sekaligus selalu menghantui dirinya sehingga intervensi terhadapnya dimungkinkan. Dan karena ia merupakan batas luar bagi dirinya, maka politik tidak dapat terserap secara total seperti yang dicontohkan sebelumnya misalnya pada kasus Abad Pertengahan. Hal inilah yang membuat otonomi relatif pada politik memungkinkan politik untuk terus berkontingensi di dalam perjalanan panjang sejarah.

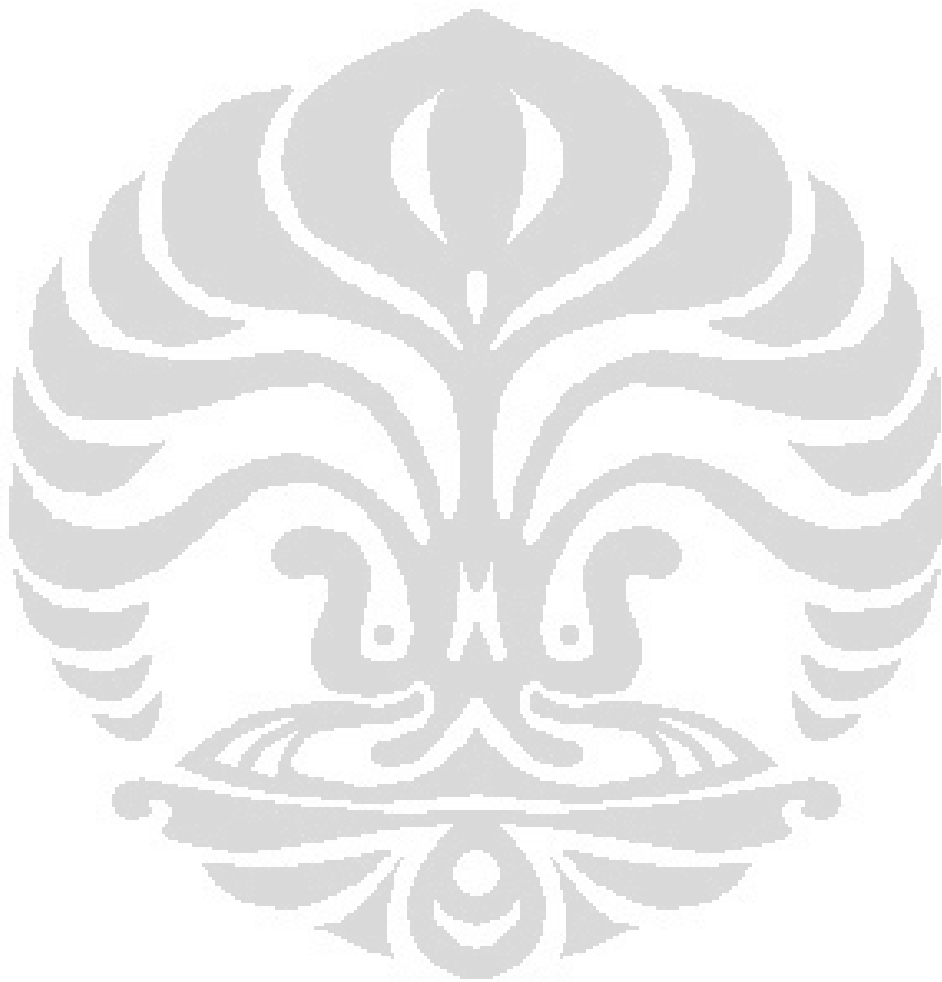
Diantara berbagai dimensi yang merupakan batas terluar dari dimensi politik, dimensi etis merupakan dimensi yang memiliki peran penting di dalam proses kontingensi. Dimensi etis berhubungan dengan ranah koeksistensi, yaitu hubungan antara subjek dengan yang lain, yang merupakan basis dari dimensi politik itu sendiri sebagai upaya dalam menyikapi koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun demikian, guna menjaga otonomi relatif bagi etika dan politik, kita tidak dapat mencampurkan keduanya begitu saja melalui sebuah reduksionisme. Sebaliknya, dimensi etis disini merupakan batas imposibilitas bagi politik sekaligus posibilitasnya.

Karena merupakan batas imposibilitas sekaligus posibilitasnya, keduanya menjadi tidak mungkin untuk direduksi, dan bentuk intervensi dimensi etis terhadap politik hanya dimungkinkan dalam sebuah momen. Momen etis inilah yang merupakan saat ketika politik menabrak dinding imposibilitasnya, ketika pengelolaannya terhadap wilayah koeksistensi dirasa tidak lagi mencukupi, sekaligus kemunculan posibilitasnya dalam mengkonstruksi kebaruan di dalam upaya pengelolaan koeksistensi tersebut. Di dalam kemunculan momen etis ini, hospitalitas memiliki dasar konseptual yang memadai. Hospitalitas sebagai sebuah bentuk penerimaan absolute terhadap yang lain tanpa kondisi apapun, membuat dirinya memiliki kecukupan di dalam mengintervensi politik dan dimensi sosial. Hospitalitas merupakan batas imposibilitas bagi dimensi sosial dan politik,

sementara karena tuntutan yang tidak mengenal kondisi, membuat dirinya harus kembali membuat rumusan derivatif dalam bentuk tataran nilai-nilai yang kemudian diartikulasikan secara diskursif di dalam dimensi sosial. Disini, momen etis hospitalitas tidak sama dengan berbagai prinsip etika lainnya, yang menyarankan segenap tindakan individu. Sebaliknya, ia mengatasi prinsip-prinsip tersebut, hospitalitas mengembalikan individu pada ranah koeksistensial tanpa terkooptasi oleh konsepsi moralitas tertentu. Kehadirannya justru memungkinkan tataran moralitas sebagai bentuk derivatif dirinya. Bentuk derivatif dari hospitalitas adalah sarana pengejawantahan dirinya sekaligus pemisahan dari dirinya, karena ia tidak merepresentasikan hospitalitas secara penuh. Ia adalah aktualisasi sekaligus kegagalan dalam merepresentasikan hospitalitas.

Di dalam proses intervensi dan pembentukan dimensi sosial ini juga diperlukan subjek yang mampu menyambut momen etis. Penyambutan dirinya terhadap momen etis pada akhirnya akan menguatkan relasinya dengan dimensi universal, dimana relasi ini dibutuhkan dalam sebuah tindak hegemoni. Penyambutan terhadap momen etis dan relasinya dengan universalitas membuat subjek perubahan ini menjadi subjek radikal, yang mampu membawa pembentukan masyarakat di dalam kerangka demokrasi pluralistik. Radikalisasi subjek ini terjadi ketika ia menyikapi kehadiran momen etis dengan merelasikan dirinya atau identitasnya yang partikular dengan universalitas, sehingga membuka wilayah yang tidak terumuskan dan membangun *chain of equivalence* antar berbagai identitas, dimana terhadap daerah yang tidak terumuskan itu setiap identitas memiliki kesempatan yang sama didalam merumuskannya.

Ketegangan-ketegangan antara berbagai imposibilitas dan posibilitas inilah yang menjadi dasar bagi konsep-konsep politik *post-foundational* di dalam merumuskan politik sebagai upaya dalam mengelola ranah koeksistensi. Ketegangan yang dihadirkan sebagai dasar pembentukan politik membuat politik selalu mengandung dimensi keterbukaan, sehingga kontingensi dan transformasi tidak dapat dihalang-halangi. Segala bentuk kontingensi dan transformasi ini diharapkan mampu membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik di dalam kerangka demokrasi plural.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. 2011. *Setelah Marxisme: Sejumlah Teori Ideologi Kontemporer*. Depok: Penerbit Koekoesan
- Al-Fayyadl, Muhammad. 2005. *Derrida*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Borradori, Giovanna. 2003. *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida*. London: University of Chicago Press Ltd
- Butler, Judith., Laclau, Ernesto dan Slavoj Zizek. 2000. *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*. London: Verso
- Danujaya, Budiarto. 2012. *Demokrasi Disensus: Politik Dalam Paradoks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Curran, Giorel. 2007. *21<sup>st</sup> Century Dissent: Anarchism, Anti-Globalization, and Enviromentalism*. New York: Palgrave Macmillan
- Derrida, Jacques. 2005. *The Politics of Friendship*. London: Verso
- Derrida, Jacques. 2005. *On Cosmopolitanism and Forgiveness*. New York: Routledge
- Fink, Bruce. 1995. *The Lacanian Subject*. New Jersey: Princeton University Press
- Gilbert, Paul. 2010. *Cultural Identity and Political Ethics*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd
- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso
- Laclau, Ernesto. 2007. *Emancipation(s)*. London: Verso
- Laclau, Ernesto. 2011. *Politics and Ideology in Marxist Theory*. London: Verso
- Levy, Calmann. 2000. *Of Hospitality: Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to Respond*. California: Stanford University Press

Magnis-Suseno, Franz. 2005. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Marchart, Oliver. 2007. *Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou, and Laclau*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd

Mouffe, Chantal. 1993. *The Return of the Political*. London: Verso

Mouffe, Chantal. (ed.). 1997. *Deconstruction and Pragmatism*. London: Routledge

Mouffe, Chantal. 2005. *On the Political*. London: Routledge

Newman, Saul. 2005. *Power and Politics in Poststructuralist Thought*. New York: Routledge

Newman, Saul. 2010. *The Politics of Postanarchism*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd

Robet, Robertus. 2010. *Manusia Politik: Subyek Radikal dan Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global Menurut Slavoj Zizek*. Tangerang: Marjin Kiri

Smith, Anna Marie. 1998. *Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary*. New York: Routledge

Zizek, Slavoj. 1994. *Mapping Ideology*. London: Verso

Zupancic, Alenka. 2000. *Ethic of the Real: Kant, Lacan*. London: Verso

### **Artikel**

Laclau, Ernesto. 2000. *Ethical Perspective 7*. Hal. 139-145

Westmoreland, Mark. 2008. *Interruptions: Derrida and Hospitality*. Kritike Volume Two Number One. Hal. 1-10

Beverungen, Armin. 2006. *Laclau, Discourse, Ideology*. Dipersembahkan pada 7<sup>th</sup> *International Conference on Organizational Discourse: Identity, Ideology, and Idiosyncrasy*